

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TAHUN 2026–2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan kualitas sumber air dan mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, diperlukan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan profesional;
 - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2026–2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 99/D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TAHUN 2026-2045.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
5. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat RISPAL adalah suatu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

Pasal 2

RISPAL disusun sebagai dokumen induk perencanaan jangka panjang penyelenggaraan SPALD dengan memperhatikan :

- a. kebijakan dan strategi nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- d. standar pelayanan minimal.

Pasal 3

(1) RISPAL disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN
- c. BAB III : ANALISIS KONDISI PENYELENGGARA SPALD
- d. BAB IV : PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

(2) Isi beserta uraian RISPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RISPAL berfungsi sebagai acuan bagi :

- a. pemerintah daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha;

- d. kelompok masyarakat; dan
- e. orang perorangan.

Pasal 5

- (1) RISPAL disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Peninjauan kembali dokumen RISPAL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Tim RISPAL yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (4) Tim RISPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Tim RISPAL sebagaimana dimaksud pada (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(5) Tim RISPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 28 April 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 28 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 21 /ε

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR **21** TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DOMESTIK TAHUN 2026-2045



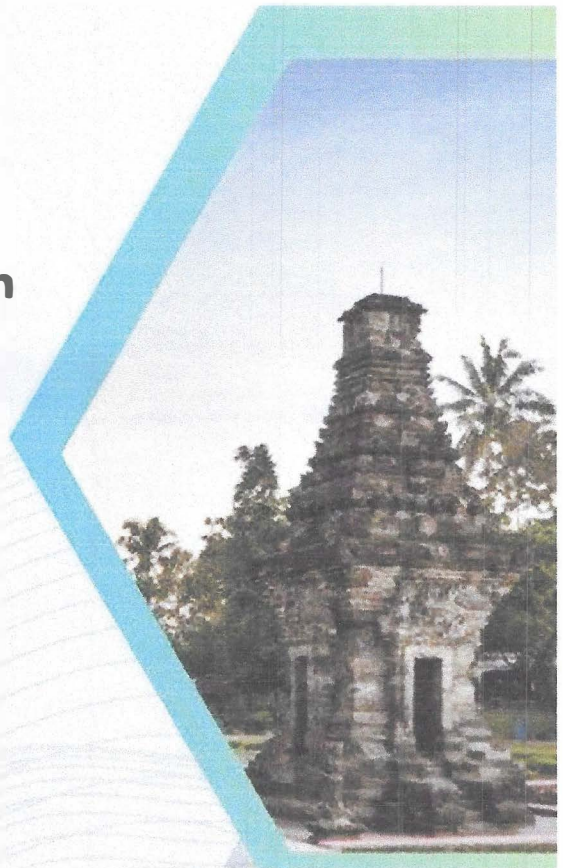
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. S. Supriadi No. 86, Telp: (0342) 808897
Pos-el : dpupr.kabblitar@gmail.com, Laman : dpupr.blitarkab.go.id

LAPORAN

AKHIR

**Penyusunan Rencana
Induk Sistem Pengelolaan
Air Limbah (RISPAL)
Kabupaten Blitar**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK TAHUN 2026-2045

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR TABEL.....vii

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I..... 2-1

PENDAHULUAN 2-1

1.1 LATAR BELAKANG.....2-1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....2-1

1.3 RUANG LINGKUP RENCANA INDUK2-2

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah.....2-2

1.3.2 RuangLingkup Kegiatan2-2

1.4 KEDUDUKAN RENCANA INDUK.....2-4

1.5 LANDASAN HUKUM DAN STANDAR TEKNIS2-5

1.5.1 Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah2-5

1.5.2 Standar Teknis.....2-6

1.5.3 Kemitraan Pemerintah Swasta2-7

1.5.4 Dokumen – Dokumen Terkait.....2-8

1.6 KELUARAN2-8

1.7 PERIODE PERENCANAAN.....2-8

1.7.1 Perencanaan Jangka Pendek2-8

1.7.2 Perencanaan Jangka Menengah2-9

1.7.3 Perencanaan Jangka Panjang.....2-9

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN.....2-9

BAB II 2-1

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN 2-1

2.1. KONDISI GEOGRAFIS.....2-1

2.2. KONDISI TOPOGRAFI.....2-4

2.3. IKLIM.....2-4

2.4. KUALITAS SUNGAI DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR2-5

2.5. KUALITAS AIR TANAH2-12

2.6. KONDISI GEOLOGI.....2-17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat membuat Laporan Akhir **Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar**, Provinsi Jawa Timur.

Laporan Akhir ini kami susun untuk melaksanakan pekerjaan **Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar**. Laporan ini memuat pendahuluan yang terdiri dari ruang lingkup kegiatan, deskripsi daerah rencana, dan analisis kondisi sistem pengelolaan air limbah domestik, strategi dan kebijakan

Kami menyadari bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Surabaya, September 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....vii

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I..... 2-1

PENDAHULUAN..... 2-1

1.1 LATAR BELAKANG..... 2-1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN..... 2-1

1.3 RUANG LINGKUP RENCANA INDUK 2-2

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah..... 2-2

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan..... 2-2

1.4 KEDUDUKAN RENCANA INDUK..... 2-4

1.5 LANDASAN HUKUM DAN STANDAR TEKNIS 2-5

1.5.1 Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah 2-5

1.5.2 Standar Teknis..... 2-6

1.5.3 Kemitraan Pemerintah Swasta 2-7

1.5.4 Dokumen – Dokumen Terkait..... 2-8

1.6 KELUARAN 2-8

1.7 PERIODE PERENCANAAN..... 2-8

1.7.1 Perencanaan Jangka Pendek 2-8

1.7.2 Perencanaan Jangka Menengah 2-9

1.7.3 Perencanaan Jangka Panjang..... 2-9

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN..... 2-9

BAB II 2-1

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN 2-1

2.1. KONDISI GEOGRAFIS..... 2-1

2.2. KONDISI TOPOGRAFI..... 2-4

2.3. IKLIM..... 2-4

2.4. KUALITAS SUNGAI DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 2-5

2.5. KUALITAS AIR TANAH 2-12

2.6. KONDISI GEOLOGI..... 2-17



Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

2.7.	KONDISI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS	2-19
2.7.1	Prasarana Air Minum	2-19
2.7.2	Prasarana Persampahan.....	2-22
2.7.3	Prasarana Drainase Lingkungan	2-24
2.8	RENCANA PENATAAN WILAYAH	2-27
2.9	DEMOGRAFI (KEPENDUDUKAN)	2-35
2.10	KONDISI SOSIAL EKONOMI.....	2-45
2.10.1	Struktur Penduduk Berdasarkan Sumber Mata Pencarian.....	2-45
2.10.2	Pendapatan Masyarakat.....	2-45
2.10.3	Data Non Permukiman (Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, Pariwisata)	2-47
2.10.4	Kondisi Masyarakat Miskin	2-51
2.10.5	Kesehatan Lingkungan.....	2-51
2.11	DATA SUMBER AIR BERSIH	2-62
2.12	DATA KONDISI SPALD SAAT INI.....	2-62
2.12.1	Data Teknis.....	2-62
2.12.1.1	SPALD-Setempat	2-66
2.12.1.2	SPALD-Terpusat.....	2-96
2.12.2	Data Non-Teknis	2-126
2.12.2.1	Kondisi Pengelolaan Keuangan SPALD.....	2-126
2.12.2.2	Kondisi Kelembagaan Pengelolaan SPALD	2-127
2.12.2.3	Data Pengaturan dalam Pengelolaan SPALD	2-126
BAB III		3-1
ANALISIS KONDISI PENYELENGGARAAN SPALD.....		3-1
3.1	HARMONISASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPALD KEMENTRIAN/LEMBAGA	3-1
3.1.1	Visi dan Misi Kabupaten Blitar	3-1
3.1.2	Sasaran RPJPN 2025-2045.....	3-1
3.1.3	Sasaran RPJPN 2025-2045 (Indonesia Emas)	3-2
3.1.4	Sasaran RPJMN 2025 – 2029	3-2
3.1.5	Sasaran RPJMD 2025-2029	3-2
3.1.6	Standar Pelayanan Minimal.....	3-3
3.1.7	Sasaran SDG’s 2030.....	3-5
3.1.8	Arah Kebijakan dan Strategi.....	3-5
3.2	Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	3-7
3.3	Analisis Gambaran Kondisi SPALD	3-10
3.3.1	Kondisi dan Perkembangan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan SPALD.....	3-10
3.3.2	Kondisi Kesehatan Masyarakat terkait Penyelenggaraan SPALD.....	3-10
3.3.3	Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPALD.....	3-18

3.3.4	Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPALD	3-18
3.3.4.1	Aspek Teknis.....	3-18
3.3.4.2	Aspek Pengaturan.....	3-20
3.3.4.3	Aspek Kelembagaan.....	3-21
3.3.4.4	Aspek Keuangan	3-23
3.3.4.5	Aspek Peran Serta Masyarakat/Swasta	3-23
3.3.5	Potensi Aspek Teknik	3-24
3.3.6	Potensi Aspek Keuangan	3-24
3.3.7	Potensi Aspek Kelembagaan	3-24
3.3.8	Potensi Aspek Peran Serta Masyarakat.....	3-24
3.3.9	Potensi Aspek Peraturan.....	3-25
BAB IV		4-1
PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI		4-1
4.1	PERUMUSAN ISU STRATEGIS	4-1
4.2	ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPALD DENGAN METODE SWOT.....	4-3
4.3	PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPALD.....	4-11
4.3.1	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana SPALD	4-11
4.3.2	Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Kelembagaan dan SDM	4-12
4.3.3	Kebijakan dan Strategi Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD	4-13
4.3.4	Kebijakan dan Strategi Peran Serta Masyarakat Penyelenggaraan SPALD	4-14
4.3.5	Kebijakan dan Strategi Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD	4-16
BAB V.....		5-17
RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM		5-17
5.1	RENCANA PROGRAM UMUM.....	5-17
5.1.1	Rencana Pengembangan Daerah.....	5-17
5.1.2	Penentuan Zona Perencanaan.....	5-6
5.1.3	Penentuan Zona Prioritas.....	5-6
5.1.4	Pemilihan Jenis SPALD	5-6

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar2-1

Tabel 2. 2 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Blitar Tahun 20242-4

Tabel 2. 3 Hasil Sampling Air Sungai2-7

Tabel 2. 4 Hasil Sampling Air Bersih..... 2-13

Tabel 2. 5 Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi 2-13

Tabel 2. 6 Pelanggan PDAM, Air Minum dan Nilai yang Disalurkan dari PDAM di Kabupaten Blitar.... 2-19

Tabel 2. 7 Kondisi sarana prasarana drainase lingkungan di Kabupaten Blitar..... 2-25

Tabel 2. 8 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 2-30

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024..... 2-36

Tabel 2. 10 Penduduk Kabupaten Blitar 2014 – 2024..... 2-38

Tabel 2. 11 Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Blitar 2-41

Tabel 2. 12 Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Kabupaten Blitar 2024 2-45

Tabel 2. 13 PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milliar rupiah) di Kabupaten Blitar tahun 2020 - 2024 2-45

Tabel 2. 14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (milliar rupiah) di Kabupaten Blitar tahun 2020-2024 2-46

Tabel 2. 15 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Blitar Tahun 2024/2025 2-47

Tabel 2. 16 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Blitar Tahun 2024 2-48

Tabel 2. 17 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik, Apotek di Kabupaten Blitar.....2-49

Tabel 2. 18 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2020-2024..... 2-50

Tabel 2. 19 Jumlah Industri di Kabupaten Blitar 2024..... 2-50

Tabel 2. 20 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin tahun 2017 – 2024 2-51

Tabel 2. 21 Jumlah Rumah Sehat Per Kecamatan Di Kabupaten Blitar 2022..... 2-52

Tabel 2. 22 Jumlah KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman (Jamban Sehat) Tahun 2024 2-54

Tabel 2. 23 Sumber Air Bersih..... 2-62

Tabel 2. 24 Jumlah KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman (Jamban Sehat) Tahun 2024 2-64

Tabel 2. 25 Sarana dan Prasarana SPALD-S di Kabupaten Blitar..... 2-67

Tabel 2. 26 Daftar Nama Perusahaan Sedot Tinja Swasta di Kabupaten Blitar 2-95

Tabel 2. 27 Jumlah Sebaran SPALD-T Kabupaten Blitar..... 2-98

Tabel 2. 28 Kondisi Eksisting SPALD-T di Kabupaten Blitar 2-100

Tabel 2. 29 Sarana dan Prasarana SPALD-T Kabupaten Blitar 2-120

Tabel 2. 30 Pehitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Blitar untuk Sanitasi 2-126

Tabel 2. 31 Matriks Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terkait Pengelolaan Limbah Domestik Kabupaten Blitar 2-128

Tabel 2. 32 Peraturan Daerah terkait Pengelolaan SPALD 2-126

Tabel 3. 1 Kegiatan Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Dasar (Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun < 25 jiwa/ha).....3-4

Tabel 3. 2 Kegiatan Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Dasar (Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun ≥ 25 jiwa/ha).....3-4

Tabel 3. 3 Kegiatan Pelayanan SPALD-T dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman3-4

Tabel 3. 4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah3-2

Tabel 3. 5 Jumlah Kasus 10 Penyakit terbanyak menurut Kecamatan tahun 2019 3-11

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPALD Tahun 2024..... 3-18

Tabel 4. 1. Analisis *Strenght, Weakness, Opportunity*, dan *Threatness* (SWOT).....4-5

Tabel 4. 2 Matriks Pembobotan Analisis SWOT Berdasarkan Hasil Analisis.....4-6

Tabel 5. 1 Strategi dan Indikasi Program5-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan Rencana Induk.....2-5

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Blitar.....2-3

Gambar 2. 2 Peta Pengembangan Sumber Daya Air2-6

Gambar 2. 3 Sampling Air Tanah2-12

Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Wilayah Jawa Timur2-16

Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Blitar2-18

Gambar 2. 6 Wilayah Pelayanan PERUMDA dan SPAM Perdesaan.....2-21

Gambar 2. 7 Peta Sebaran Lokasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Blitar.....2-23

Gambar 2. 8 Peta Lokasi Genangan di Kabupaten Blitar.....2-26

Gambar 2. 9 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Blitar2-29

Gambar 2. 10 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Blitar2-34

Gambar 2. 11 Grafik Perhitungan Nilai Korelasi metode Geometri2-40

Gambar 2. 12 Jenis Kelamin Responden.....2-55

Gambar 2. 13 Pendidikan Terakhir Responden.....2-55

Gambar 2. 14 Penghasilan Rata-rata per Bulan.....2-56

Gambar 2. 15 Jenis Bangunan Fisik yang Ditempati2-56

Gambar 2. 16 Jumlah Penghuni Rumah atau Tempat Tinggal2-57

Gambar 2. 17 Status Kepemilikan Tanah2-57

Gambar 2. 18 Kepemilikan Sumur2-58

Gambar 2. 19 Jarak Sumur ke Tangki Septik2-58

Gambar 2. 20 Presentase Kepemilikan Jamban di Kabupaten Blitar2-59

Gambar 2. 21 Lamanya Penggunaan Tangki Septik.....2-59

Gambar 2. 22 Terakhir Dilakukan Penyedotan Tangki Septik2-59

Gambar 2. 23 Konstruksi Tangki Septik yang Dimiliki2-60

Gambar 2. 24 Pembuangan Greywater2-60

Gambar 2. 25 Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Pentingnya Pengelolaan Air Limbah2-61

Gambar 2. 26 Tingkat Kesediaan Masyarakat untuk Melakukan Penyedotan Tangki Septik.....2-61

Gambar 2. 27 Tingkat Kesediaan Masyarakat terhadap Pembangunan IPAL Komunal2-61

Gambar 2. 28 Salah Satu Armada Sedot Tinja Swasta di Kabupaten Blitar.....2-96

Gambar 2. 29 Kondisi Salah Satu IPAL di Kabupaten Blitar2-97

Gambar 2. 30 Peta Penyebaran Lokasi Sarana-Prasarana SPALD-T di Kabupaten Blitar2-119

Gambar 3. 1 Target Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya.....3-2

Gambar 3. 2 Peta Zonasi Air limbah Domestik Kabupaten Blitar.....3-1

Gambar 4. 1 Kuadran Pemilihan dan Penetapan Arah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah.....4-4

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Gambar 4. 2 Posisi Kabupaten Blitar pada Kuadran Pemilihan dan Penetapan Arah Pengembangan Sistem
Pengelolaan Air Limbah..... 4-11

Gambar 4. 3 Keterkaitan Skala prasarana dengan Basis Kelembagaan Pengelola 4-13

Gambar 4. 4 Proses Rekayasa Sosial 4-15

Gambar 5. 1 Peta Zona Perencanaan.....5-7

Gambar 5. 2 Peta Angka Kepadatan Penduduk.....5-6

Gambar 5. 3 Peta Angka Sebaran Permukiman Kumuh.....5-6

Gambar 5. 4 Peta Angka Kepemilikan Sanitasi 5-7

Gambar 5. 5 Peta Overlay Zona Prioritas.....5-6

Gambar 5. 6 Kriteria Penentuan Jenis SPALD5-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Limbah dari kegiatan rumah tangga (baik *gray water* maupun *black water*) menjadi isu lingkungan karena dari segi jumlah maupun tingkat bahayanya dapat mengancam kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, pentingnya sanitasi, serta belum cukupnya pengetahuan masyarakat tentang dampak air limbah yang tidak dikelola berakibat pada munculnya penyakit yang berhubungan dengan pencemaran air, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Menurut Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Kabupaten Blitar dalam perkembangan mencapai 1.261.699 jiwa. Jika dilihat data penjualan air tahun 2023 sebesar 2.761.390 m³ dan jumlah sambungan sebanyak 14.659 unit, jika diasumsikan jumlah jiwa dalam setiap keluarga sebanyak 3,5 jiwa maka rata-rata konsumsi air sebesar 130,97 L/orang/hari. Situasi ini menunjukkan besarnya jumlah potensi air limbah baik *greywater* maupun *blackwater* setiap harinya. Di sektor limbah Kabupaten Blitar telah tersedia IPAL Komunal dan MCK + di sejumlah tempat, di samping itu masyarakat juga telah banyak memiliki *water closed* (WC) yang disertai dengan tangki septik. Namun terdapat kendala dalam pengelolaan limbah tinja, yaitu belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Keadaan ini mengakibatkan tantangan dalam pengolahan limbah tinja, baik dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun dari tangki septik warga.

Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang menyeluruh terkait pengelolaan air limbah di Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blitar mengadakan kegiatan “Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Kabupaten Blitar” dengan menggunakan dana APBD tahun 2025. Diharapkan hasil studi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Blitar pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan IPLT di Kabupaten Blitar.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan ini mempunyai maksud yakni melakukan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar sebagai acuan ke depan dalam pengembangan / pembangunan sistem air limbah.

Adapun tujuan pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan dokumen rencana pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Blitar

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Manfaat produk dokumen Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar sebagai pedoman pengelolaan air limbah yang dapat digunakan sampai 20 tahun mendatang.

1.3 RUANG LINGKUP RENCANA INDUK

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar ini dilaksanakan di lingkup wilayah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan paket pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan dan analisa data :
 - RTRW
 - Peta
 - Data Pendukung
 - Study EHRA, dan SSK
 - Peraturan – peraturan yang harus sekunder
 - Data – data lain yang diperoleh dari penyusunan Rencana Induk
- b. Melakukan survey diantaranya adalah:
 - Survey untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat tentang aspek topografi, demografi dan rencana pengembangan wilayah serta produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.
 - Melakukan survey buangan limbah penduduk, rata-rata buangan, debit buangan per kawasan, dan sarana prasarana pengelolaan air limbah.
 - Melakukan survey sosial-ekonomi untuk mengetahui jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, kebiasaan, persepsi dan keinginan masyarakat termasuk identifikasi jenis kontribusi masyarakat dan tingkat kemampuan masyarakat.
- c. Melakukan konsultasi dengan pihak Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar.
- d. Melakukan kajian terhadap:
 - Hasil studi sanitasi yang sudah dilakukan terdahulu
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar
 - Peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan air limbah dan sanitasi.
 - Kondisi sosial ekonomi dan demografi

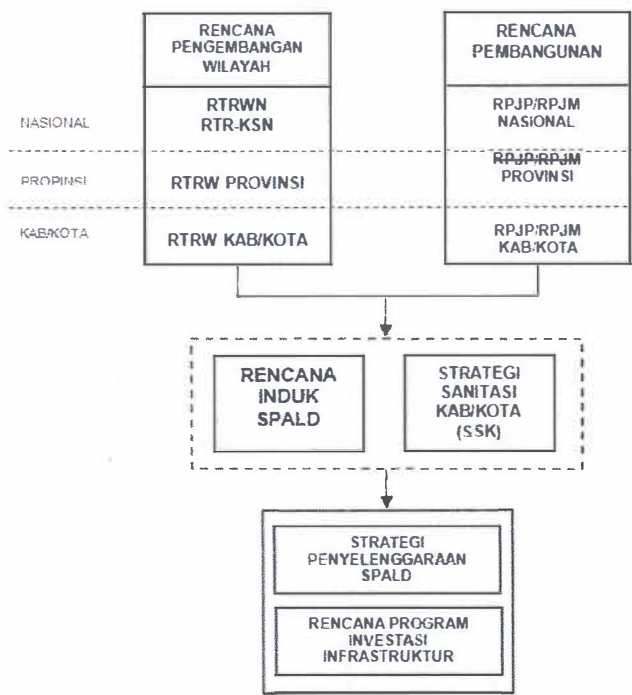
- Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar (*willingness and affordability to pay*) serta kapasitas fiskal Kabupaten Blitar (hal ini penting untuk kepentingan pembiayaan proyek, jika harus dibiayai *loan*)
- e. Mengkaji Pengelolaan Air Limbah Eksisting dengan memperhatikan aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek legalitas, aspek finansial dan aspek Peran serta masyarakat. Secara detail dapat dirinci sebagai berikut;
 - Mengkaji volume buangan limbah rumah tangga baik berasal dari WC (*black water*) maupun dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur (*grey water*).
 - Prasarana dan sarana air limbah yang ada.
 - Kelembagaan pengelola air limbah saat ini dan rencana kedepan.
 - Memetakan secara rinci kondisi fisik lingkungan, profil kesehatan masyarakat saat ini, dan kondisi sanitasi (peta sanitasi).
 - Pembiayaan dalam rangka pengelolaan air limbah.
 - Mengkaji produk hukum yang berakaitan dengan air limbah di Kabupaten Blitar.
- f. Menyusun Rencana Induk pengelolaan air limbah hingga 20 tahun mendatang. Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah dengan mengkaji aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek legalitas, aspek finansial dan aspek Peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya:
 - Membuat proyeksi hingga 20 tahun mendatang volume buangan limbah rumah tangga baik berasal dari WC (*black water*) maupun dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur (*grey water*). Proyeksi berdasarkan hasil survey dan hasil perhitungan produksi air limbah dari proyeksi jumlah penduduk.
 - Menyusun alternatif sistem pengelolaan air limbah secara umum di Kabupaten Blitar berdasarkan RTRW, (sistem cluster, sistem terpusat dll).
 - Merumuskan perencanaan pengelolaan air limbah sesuai dengan proyeksi perencanaan kedepan: - Mengarah kepada sistim pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), dan /atau - Mengarah kepada sistim pengelolaan air limbah domestik terpusat. (SPALD-T)
 - Menyusun kebutuhan prasarana dan sarana air limbah berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
 - Mendapatkan informasi ekonomi makro, dan identifikasi pembatasan dan kendala ekonomi,
 - Mengkaji kapasitas dan kemampuan institusi pengelola, SDM yang ada serta perangkat - perangkat peraturan/produk hukum yang ada untuk mendukung pengelolaan air limbah yang sesuai.

- Memberikan rekomendasi terkait dengan kebutuhan produk hukum yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Blitar.
- Menyusun program perencanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah.
- Menyusun pentahapan program pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan hingga 20 tahun mendatang:
 - Jangka Pendek (tahunan)
 - Jangka menengah (5 tahunan)
 - Jangka Panjang (20 tahunan)
- Menyusun rencana kebutuhan anggaran biaya yang diperlukan setiap tahapan pembangunan yang diperlukan untuk konstruksi,
- g. Melaksanakan pembahasan dan asistensi dengan pihak Satker BPBPK Jawa Timur. Melaksanakan Seminar awal dan seminar akhir di daerah. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi di daerah.

1.4 KEDUDUKAN RENCANA INDUK

Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah merupakan turunan sebagai konsekuensi logis dari perencanaan tata ruang, sehingga dalam proses penyusunannya mengacu pada rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW. Indikasi dan atau Kebijakan Program yg tertuang dalam RTRW merupakan dasar bagi Penyusunan Rencana Induk SPAL yang menjadi dasar pengembangan infrastruktur.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



Gambar 1. 1 Kedudukan Rencana Induk

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2017

1.5 LANDASAN HUKUM DAN STANDAR TEKNIS

1.5.1 Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah

Landasan Hukum untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang- Undang
 - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja;
 - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta kerja; dan
 - UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta kerja
- b. Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Kelayakan Nasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Nasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

1.5.2 Standar Teknis

Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar adalah Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah.

Adapun beberapa SNI yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar, antara lain sebagai berikut :

- SNI 03-6368-2000 tentang Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-gorong

- SNI 03-6379-2000 tentang Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkat Bau
- SNI 19-6409-2000 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Limbah tanpa Pemadatan dari Truk
- SNI 19-6410-2000 tentang Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan pada Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga
- SNI 19-6447-2000 tentang Metode Pengujian Lumpur Aktif
- SNI 19-6466-2000 tentang Tata Cara Evaluasi Lapangan untuk Sistem Peresapan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga
- SNI 03-2398-2002 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan
- SNI 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan

Standar teknis lainnya yang digunakan:

- Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Re-TC/001/98;
- Tata Cara Pembangunan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Ba-TC/002/98;
- Tata Cara Pengoperasian IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Op-TC/003/98;
- Tata Cara Pengolahan Air Limbah dengan Oxidation Ditch, CT/AL/Re-TC/004/98;
- Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), CT/AL-D/Re-TC/005/98;
- Tata Cara Survey Perencanaan dan Pembangunan Sarana Sanitasi Umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98;
- Tata Cara Pembuatan Bangunan Atas Jamban Jamak, CT/AL-D/Ba-TC/007/98;
- Tata Cara Pembuatan Bangunan Jamban Keluarga dan Sekolah, CT/AL-D/Ba-TC/009/98; dan
- Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, Departemen PU 2003.

1.5.3 Kemitraan Pemerintah Swasta

Terkait dengan kerjasama yang umumnya dilakukan dalam pengembangan, maka referensi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- c. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

1.5.4 Dokumen – Dokumen Terkait

Dokumen yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar, antara lain sebagai berikut :

- a. Kabupaten Blitar dalam Angka Tahun 2020-2025.
- b. Buku SSK Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2027
- c. Profil Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2022
- d. Dokumen RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031
- e. Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2030.
- f. Draft Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Blitar Tahun 2025-2044

1.6 KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar adalah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar.

1.7 PERIODE PERENCANAAN

Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Induk SPAL perlu ditetapkan periode perencanaan disertai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan waktunya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Nomor 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) menjelaskan bahwa rencana induk SPAL harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam proses penyusunan Rencana Induk SPAL yang dilakukan oleh konsultan juga didampingi oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah, 2016).

1.7.1 Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak. Rencana jangka pendek merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD untuk jangka waktu satu hingga dua tahun kedepan rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik, yang diprioritaskan pada pemenuhan

kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah domestik (Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017). Dengan periode jangka pendek pada perencanaan ini yaitu tahun 2026.

1.7.2 Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana jangka menengah merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 5 (lima) tahun mendatang, rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan (Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017). Dengan periode jangka menengah pada perencanaan ini yaitu tahun 2025 – 2030.

1.7.3 Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan (Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017). Dengan periode jangka panjang perencanaan ini yaitu tahun 2025 – 2045.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Selama proses pelaksanaan pekerjaan ini akan ada 4 tahap pelaporan yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Konsep Laporan Akhir, dan Laporan Akhir. Laporan Pendahuluan yang saat ini diajukan, sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini dijelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan dan konsep dan paradigma penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar, serta sistematika pelaporan.
Selain itu juga diuraikan konsep Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar.
- **Bab II Deskripsi Daerah Perencanaan.** Memberikan informasi tentang keadaan area studi, yang meliputi kondisi geografis, kondisi sosial – ekonomi – budaya, kondisi perekonomian, sarana dan prasarana pengelolaan limbah eksisting di Kabupaten Blitar
- **Bab III Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD.** Menjelaskan mengenai harmonisasi kebijakan dan strategi SPALD, harmonisasi RTRW, analisis kondisi SPALD yang meliputi dampak SPALD, permasalahan dalam penyelenggaraan SPALD, dan potensi dari beberapa aspek dalam melaksanakan SPALD.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

- **Bab IV Perumusan dan Penetapan Kebijakan Straregi.** Menjelaskan mengenai perumusan isu strategi, analisis arah kebijakan penyelenggaraan SPALD, dan penentuan arah kebijakan penyelenggaraan SPALD.
- **Bab V Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Program.** Menjelaskan mengenai penentuan zona perencanaan, penentuan zona prioritas, dan penyusunan rencana program, tahapan pelaksanaan, dan indikasi pembiayaan dalam penyusunan SPALD.

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN

Dalam Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah ini akan didapatkan strategi dan program yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik. Perumusan strategi dan rencana tersebut mengacu pada kondisi eksisting di Kabupaten Blitar, terutama kondisi sanitasi. Dalam bab ini akan dideskripsikan kondisi eksisting dari daerah perencanaan sehingga dapat dirumuskan strategi dan program yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan Jumlah Penduduk sebesar 1.261.699 jiwa dengan Luas Wilayah 1.588,79 Km², dan Kepadatan penduduk di mencapai 788 jiwa/km².

Kabupaten Blitar secara administratif terletak antara 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹ Lintang Selatan. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yakni Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan srengat, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Pomggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Udanawu dengan jumlah kelurahan keseluruhan berjumlah 248 desa/kelurahan. Peta administrasi Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 2.1. Batas – batas wilayah dari kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara

:

Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan

:

Samudra Indonesia
- Sebelah Barat

:

Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Timur

:

Kabupaten Malang

Tabel 2. 1 Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar

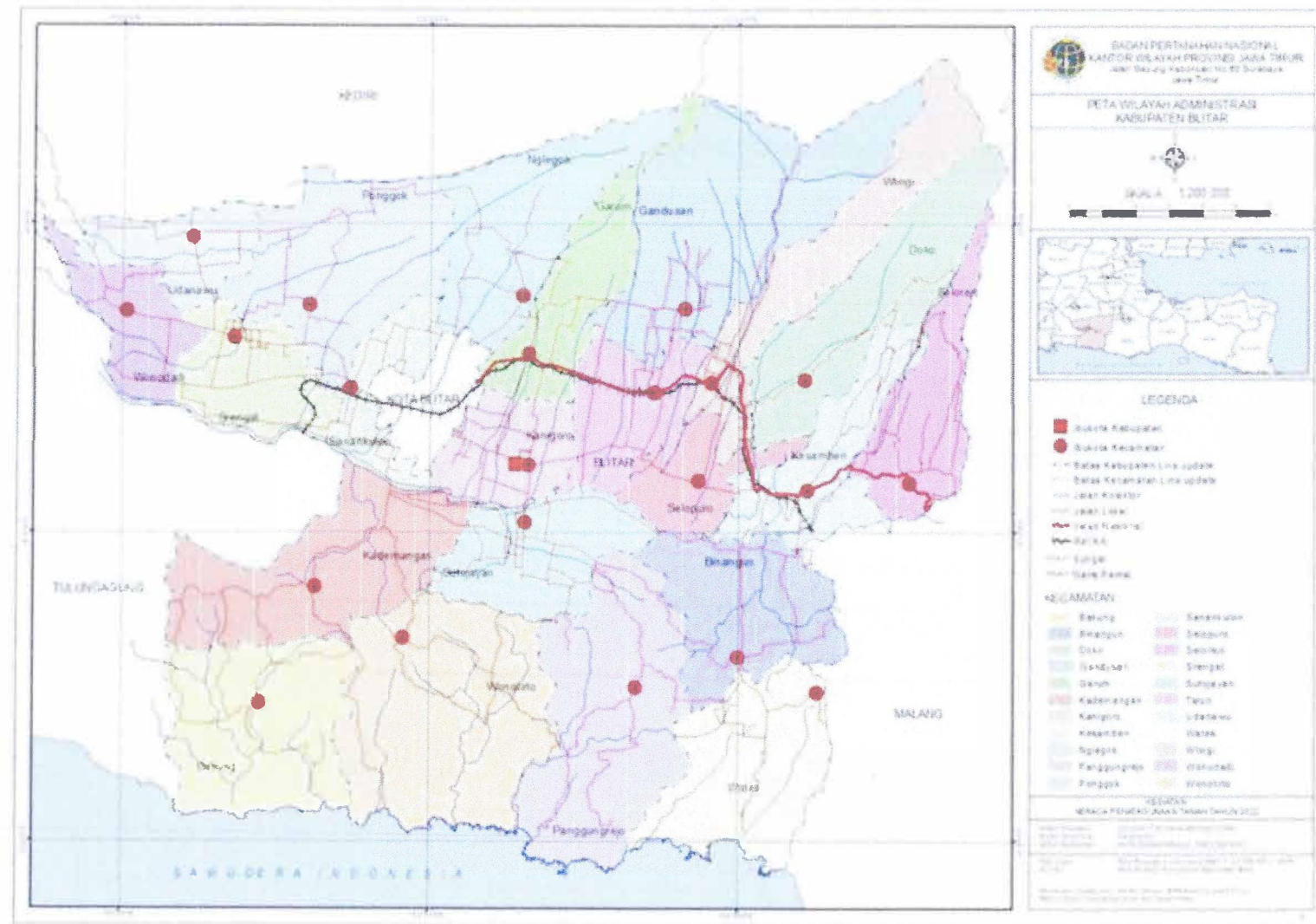
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (±ha)
1	Bakung	11	111,24
2	Wonotirto	8	164,54
3	Panggungrejo	10	119,04
4	Wates	8	68,76
5	Binangun	12	76,79
6	Sutojayan	11	44,2
7	Kademangan	15	105,28

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (±ha)
8	Kanigoro	12	55,55
9	Talun	14	49,78
10	Selopuro	8	39,29
11	Kesamben	10	56,96
12	Selorejo	10	52,23
13	Doko	10	70,95
14	Wlingi	9	66,36
15	Gandusari	14	88,23
16	Garum	9	54,56
17	Nglegok	11	92,56
18	Sanankulon	12	33,33
19	Ponggok	15	103,83
20	Srengat	16	53,98
21	Wonodadi	11	40,35
22	Udanawu	12	40,98

(Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025)

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Blitar
(Sumber: RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031)

2.2. KONDISI TOPOGRAFI

Kondisi alam Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Kondisi topografi kabupaten yang memiliki ketinggian ± 167 meter adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Kabupaten Blitar Utara memiliki kemiringan 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
- b. Wilayah Kabupaten Blitar Tengah merupakan daerah yang relative datar dengan kemiringan 0-20%. Namun, bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
- c. Wilayah Kabupaten Blitar Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15%-40%. Terdapat Sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Kabupaten Blitar dilalui Sungai Brantas yang membelah wilayahnya menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dengan luas 898,94 Km2 dan bagian selatan mempunyai luas 689.85 Km2. Dibandingkan dengan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur, hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu. Sebagian besar batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah dtanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya subur. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran aliran sungai yang cukup memadai.

2.3. IKLIM

Seperti pada daerah lain di Indonesia, Kabupaten Blitar memiliki iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung anantara bulan Mei – September. Musim penghujan berlangsung antara bulan November – April.

Tabel 2. 2 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Blitar Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata2 Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	105	23	
Februari	90	19	
Maret	224	20	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata2 Harian Penyinaran Matahari (jam)
April	113	19	
Mei	58	7	
Juni	58	6	
Juli	97	4	
Agustus	10	2	
September	58	5	
Oktober	90	10	
November	178	29	
Desember	229	28	

(Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025)

2.4. KUALITAS SUNGAI DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

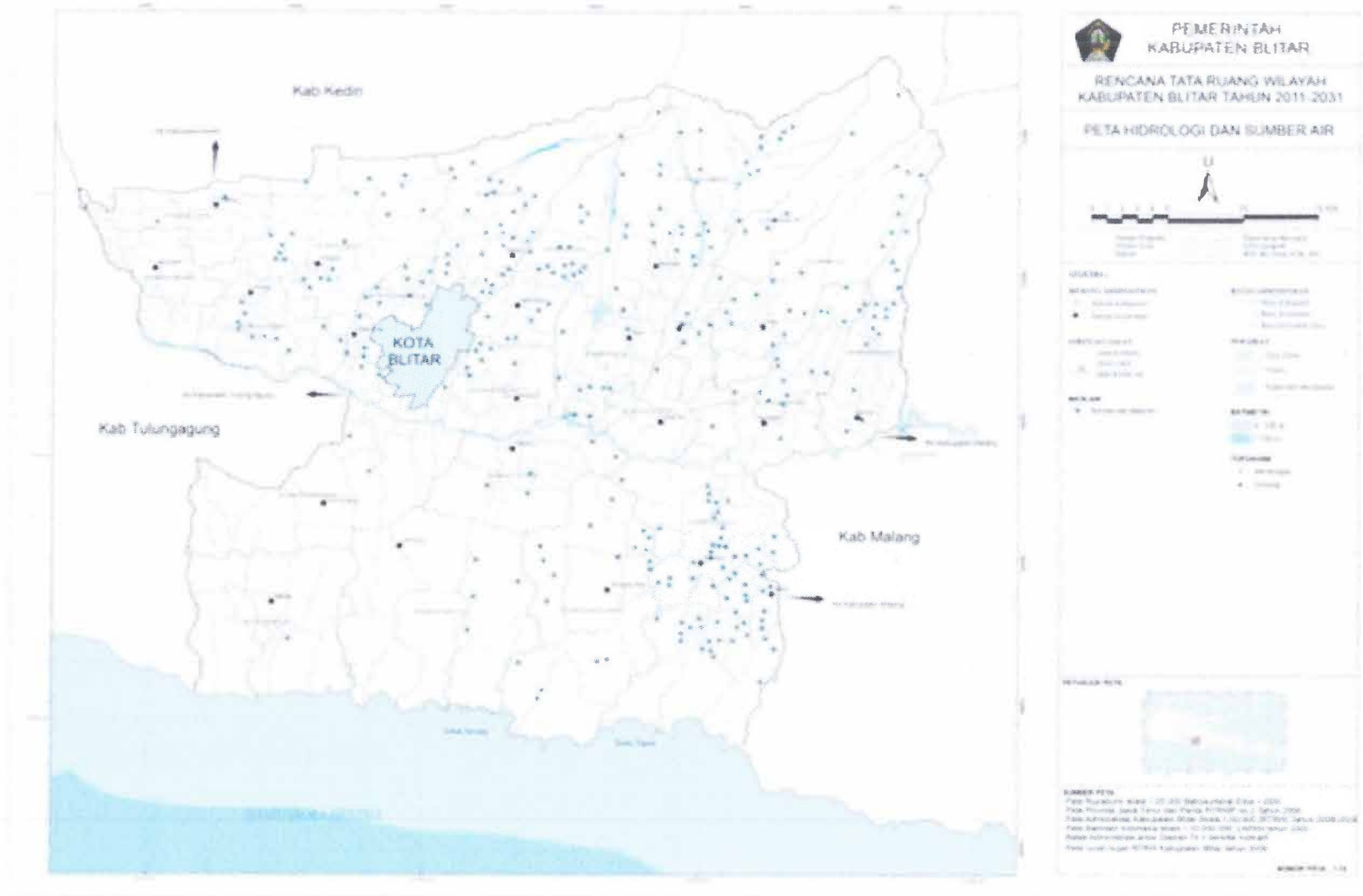
Rencana sistem sumber daya air pada Kabupaten Blitar meliputi wilayah sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air bersih dan sistem pengendalian banjir. Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

Sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar yakni Sungai Brantas. Sungai utama dan anak-anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia, hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) yang bermuara di Sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air yang cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi dan Kesamben, sedangkan sumber mata air lainnya mempunyai debit air yang relatif kecil (rata-rata < 5 liter/detik) seperti yang terdapat di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Bakung dan Sutojayan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tahun 2025 telah melakukan sampling kualitas air sungai pada beberapa titik lokasi sungai. Pada beberapa titik lokasi menunjukkan hasil parameter BOD dan Fecal Coliform yang melebihi baku mutu. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang langsung membuang air limbah domestik di sungai tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan rencana program untuk menurunkan kadar yang masih melebihi baku mutu pada beberapa parameter uji. Hasil sampling air sungai dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten Blitar dapat dilihat pad Gambar 2.2 berikut.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



Gambar 2.2 Peta Pengembangan Sumber Daya Air
(Sumber: RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031)

Berikut merupakan hasil sampling kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Blitar

Tabel 2. 3 Hasil Sampling Air Sungai

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 mL)	Latitude				Longitude			
						DD	MM	SS	Position	DD	MM	SS	Position
1	Brantas	BRANTAS Jembatan Kademangan /	PUSAT	3.25	1700	8	7	56.96	S	112	7	32.74	E
2	Brantas	BRANTAS Jembatan Glondang /	PUSAT	2.65	490	8	9	12.69	S	112	13	2.88	E
3	Brantas	BRANTAS Jembatan Selopuro Blitar	PUSAT	3.3	1400	8	9	59,00	S	112	18	2.97	E
4	Brantas	BRANTAS Jembatan Ngembul /	PUSAT	2.85	1700	8	10	16.8	S	112	20	8.6	E
5	Brantas	BRANTAS Jembatan Kalipare	PUSAT	2.25	790	8	9	23.52	S	112	26	2.37	E
6	Brantas	Jembatan kademangan / trisula blitar	PROVINSI	2	9870	8	8	23.3	S	112	8	47.4	E
7	Brantas	Jembatan selopuro blitar	PROVINSI	2.6	14500	8	9	58.9	S	112	18	2.9	E
8	Brantas	Jembatan kalipare / karangkates	PROVINSI	2.3	100	8	9	23.6	S	112	26	3.6	E
9	Manis	Hilir - Desa Pagergunung, Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1.45	600	8	9	2.3	S	112	22	28.5	E

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 mL)	Latitude				Longitude			
						DD	MM	SS	Position	DD	MM	SS	Position
10	Manis	Desa banjarsari kecamatan kesamben	KABUPATEN/KOTA	1	16000	8	6	36.67	S	112	24	26.05	E
11	Manis	Hulu - Desa Ampelgading. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1.65	16000	8	3	17,00	S	112	23	41.9	E
12	Genjong	Hilir Genjong (Desa Siraman	KABUPATEN/KOTA	1	16000	8	8	34.8	S	112	20	43.6	E
13	Genjong	Tengah Genjong (Desa Plumbangan	KABUPATEN/KOTA	5.85	16000	8	4	23.8	S	112	16	49.8	E
14	Genjong	Hulu Genjong (Desa Ngadirenggo	KABUPATEN/KOTA	1	241	8	5	51.65	S	112	25	54.48	E
15	Lekso	Hilir - Desa Mandesan. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1	16000	8	8	39.1	S	112	16	49.8	E
16	Lekso	Kerurahan tangkil kecamatan wlingi	KABUPATEN/KOTA	1	4300	8	5	25.11	S	112	19	23.86	E
17	Lekso	Hulu - Desa Slumbung. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	2.05	2800	7	59	32.1	S	112	20	13.8	E
18	Termas Baru	Hilir - Desa Salam. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1	78	8	1	21,00	S	111	58	34.82	E
19	Termas Baru	Tengah Termas Baru (Desa Bacem	KABUPATEN/KOTA	1	312	8	0	47.93	S	112	6	46.2	E
20	Termas Baru	Hulu - Sungai Termas Baru	KABUPATEN/KOTA	1	2800	7	59	3.31	S	112	10	44.49	E

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 mL)	Latitude				Longitude			
						DD	MM	SS	Position	DD	MM	SS	Position
-1	-2	-3	-4	-14	-24								
21	Abab	Hilir Abab (Desa Jatinom Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1	81	8	7	54.28	S	112	10	38.05	E
22	Abab	Tengah Sungai Abab (Kelurahan	KABUPATEN/KOTA	1	16000	8	4	20.43	S	112	13	17.69	E
23	Abab	Hulu Abab (Desa Karangrejo	KABUPATEN/KOTA	2.45	16000	8	1	8.3	S	112	14	5.29	E
24	Brantas	BRANTAS Jembatan Kalipare	PUSAT	2.81	630	8	9	23.52	S	112	26	2.37	E
25	Brantas	BRANTAS Jembatan Ngembul /	PUSAT	2.62	310	8	10	16.8	S	112	20	8.6	E
26	Brantas	BRANTAS Jembatan Selopuro Blitar	PUSAT	2.44	1100	8	9	59.00	S	112	18	2.97	E
27	Brantas	BRANTAS Jembatan Glondang /	PUSAT	2.17	940	8	9	12.69	S	112	13	2.88	E
28	Brantas	BRANTAS Jembatan Kademangan /	PUSAT	2.5	940	8	7	56.96	S	112	7	32.74	E
29	Brantas	Jembatan kalipare / karangkates	PROVINSI	2.7	100	8	9	23.6	S	112	26	3.6	E
30	Brantas	Jembatan selopuro blitar	PROVINSI	2.5	10760	8	9	58.9	S	112	18	2.9	E
31	Brantas	Jembatan kademangan / trisula blitar	PROVINSI	2	6160	8	8	23.3	S	112	8	47.4	E

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 mL)	Latitude				Longitude			
						DD	MM	SS	Position	DD	MM	SS	Position
32	Brantas	BRANTAS Jembatan Kalipare	PUSAT	2.13	490	8	9	23.52	S	112	26	2.37	E
33	Brantas	BRANTAS Jembatan Ngembul /	PUSAT	2.27	430	8	10	16.8	S	112	20	8.6	E
34	Brantas	BRANTAS Jembatan Selopuro Blitar	PUSAT	2.57	630	8	9	59,00	S	112	18	2.97	E
35	Brantas	BRANTAS Jembatan Glondang /	PUSAT	2.57	460	8	9	12.69	S	112	13	2.88	E
36	Brantas	BRANTAS Jembatan Kademangan /	PUSAT	2.42	330	8	7	56.96	S	112	7	32.74	E
37	Termas Baru	Hilir - Desa Salam. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	14.4	2200	8	1	21,00	S	111	58	34.82	E
38	Manis	Hilir - Desa Pagergunung. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	4.15	16000	8	9	2.3	S	112	22	28.5	E
39	Manis	Desa banjarsari kecamatan kesamben	KABUPATEN/KOTA	1	3500	8	6	36.67	S	112	24	26.05	E
40	Manis	Hulu - Desa Ampelgading. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1	330	8	3	17,00	S	112	23	41.9	E
41	Genjong	Hilir Genjong (Desa Siraman	KABUPATEN/KOTA	28.8	16000	8	8	34.8	S	112	20	43.6	E
42	Genjong	Tengah Genjong (Desa Plumbangan	KABUPATEN/KOTA	18.8	2800	8	4	23.8	S	112	16	49.8	E

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100 mL)	Latitude				Longitude			
						DD	MM	SS	Position	DD	MM	SS	Position
-1	-2	-3	-4	-14	-24								
43	Genjong	Hulu Genjong (Desa Ngadirenggo	KABUPATEN/KOTA	1	700	8	5	51.65	S	112	25	54.48	E
44	Lekso	Hilir - Desa Mandesan. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	6.35	1400	8	8	39.1	S	112	16	49.8	E
45	Lekso	Kerurahan tangkil kecamatan wlingi	KABUPATEN/KOTA	1	3500	8	5	25.11	S	112	19	23.86	E
46	Lekso	Hulu - Desa Slumbung. Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1	40	7	59	32.1	S	112	20	13.8	E
47	Abab	Hilir Abab (Desa Jatinom Kecamatan	KABUPATEN/KOTA	1	460	8	7	54.28	S	112	10	38.05	E
48	Abab	Tengah Sungai Abab (Kelurahan	KABUPATEN/KOTA	1	330	8	4	20.43	S	112	13	17.69	E
49	Abab	Hulu Abab (Desa Karangrejo	KABUPATEN/KOTA	1	5400	8	1	8.3	S	112	14	5.29	E
50	Termas Baru	Tengah Termas Baru (Desa Bacem Kecamatan Ponggok)	KABUPATEN/KOTA	1	16000	8	0	47.93	S	112	6	46.2	E
S1	Termas Baru	Hulu - Sungai Termas Baru	KABUPATEN/KOTA	1	3500	7	59	3.31	S	112	10	44.49	E

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.5. KUALITAS AIR TANAH

Sebagian besar sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Blitar adalah air sumur (air tanah). Dari data Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Blitar, tingkat pelayanan air bersih Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar 78,37% dengan rincian 3,94% pelayanan dari PERUMDA, 5,49% dari SPAM Perdesaan baik KP-SPAMS maupun HIPPAM dan 70,31% dari SPAM bukan jaringan perpipaan.

Tim konsultan telah melakukan sampling air tanah (air sumur) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran air limbah domestik ke badan air. Air sumur menjadi sumber bahan baku air bersih masyarakat Kabupaten Blitar. Pengambilan sampel air dilakukan di 3 titik yang lokasi pengambilannya dekat dengan IPAL Komunal. Dokumentasi pengambilan sampel air tanah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 3 Sampling Air Tanah

Air sampel diambil pada titik sampling dengan menggunakan metode sampling SNI 8990:2021, kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap semua sampel tersebut dengan parameter uji sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 68 tahun 2016 oleh pihak PT AXO Green Laboratory yang telah bersertifikat **KAN LP-1348-IDN**. Pengujian beberapa parameter tersebut menggunakan metode diantaranya:

- a. Analisis pH menggunakan metode SNI 06-6989.11-2019
- b. Analisis BOD₅ menggunakan metode SNI 6989.72-2009
- c. Analisis COD menggunakan metode SNI 6989.2-2019
- d. Analisis TSS menggunakan metode SNI 06-6989.3-2019
- e. Analisis NH₃ menggunakan metode SNI 06-6989.30-2005
- f. Analisis Minyak dan lemak menggunakan metode SNI 06-6989.10-2011
- g. Analisis Total Coliform menggunakan metode IKM AXO-45

Berikut ini terlampir daftar lokasi pengambilan sampel air beserta hasil pengujian kualitas airnya, dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Hasil Sampling Air Bersih

No.	Jenis Sampel	Koordinat	Lokasi	Alamat	Hasil Uji Kualitas Air						
					pH	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	NH ₃ (mg/L)	Minyak Lemak (mg/L)	Total Coliform (jumlah/ 100 mL)
1	Sumur	8°07'42,30" S - 112°19'10,89" E	Rumah Warga	Desa Ploso Kecamatan Selopuro	8,39	2,84	7,06	< 2,5	< 0,0268	1,41	140
2	Sumur	8°11'55,84" S - 112°20'11,85" E	Rumah Warga	Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi	7,75	2,59	6,47	< 2,5	0,180	1,34	179
3	Sumur	8°07'00,34" S - 112°11'17,06" E	Rumah Warga	Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro	7,70	1,49	< 5	< 2,5	< 0,0268	1,52	39

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil dari uji kualitas air bersih tersebut dibandingkan dengan baku mutu air bersih yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solid Per Aqua*, dan Pemandian Umum, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1	Kekeruhan	NTU	25
2	Warna	TCU	50
3	Zat padat terlarut (Total Dissolved Solid)	mg/l	1000
4	Suhu	°C	suhu udara ± 3
5	Rasa	-	tidak berasa
6	Bau	-	tidak berbau
7	Total Coliform	CFU/100 ml	50

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
8	E. coli	CFU/100 ml	0
9	pH	mg/l	6,5 - 8,5
10	Besi	mg/l	1
11	Fluorida	mg/l	1,5
12	Kesadahan (CaCO3)	mg/l	500
13	Mangan	mg/l	0,5
14	Nitrat, sebagai N	mg/l	10
15	Nitrit, sebagai N	mg/l	1
16	Sianida	mg/l	0,1
17	Deterjen	mg/l	0,05
18	Pestisida Total	mg/l	0,1

(Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solud Per Aqua, dan Pemandian Umum)

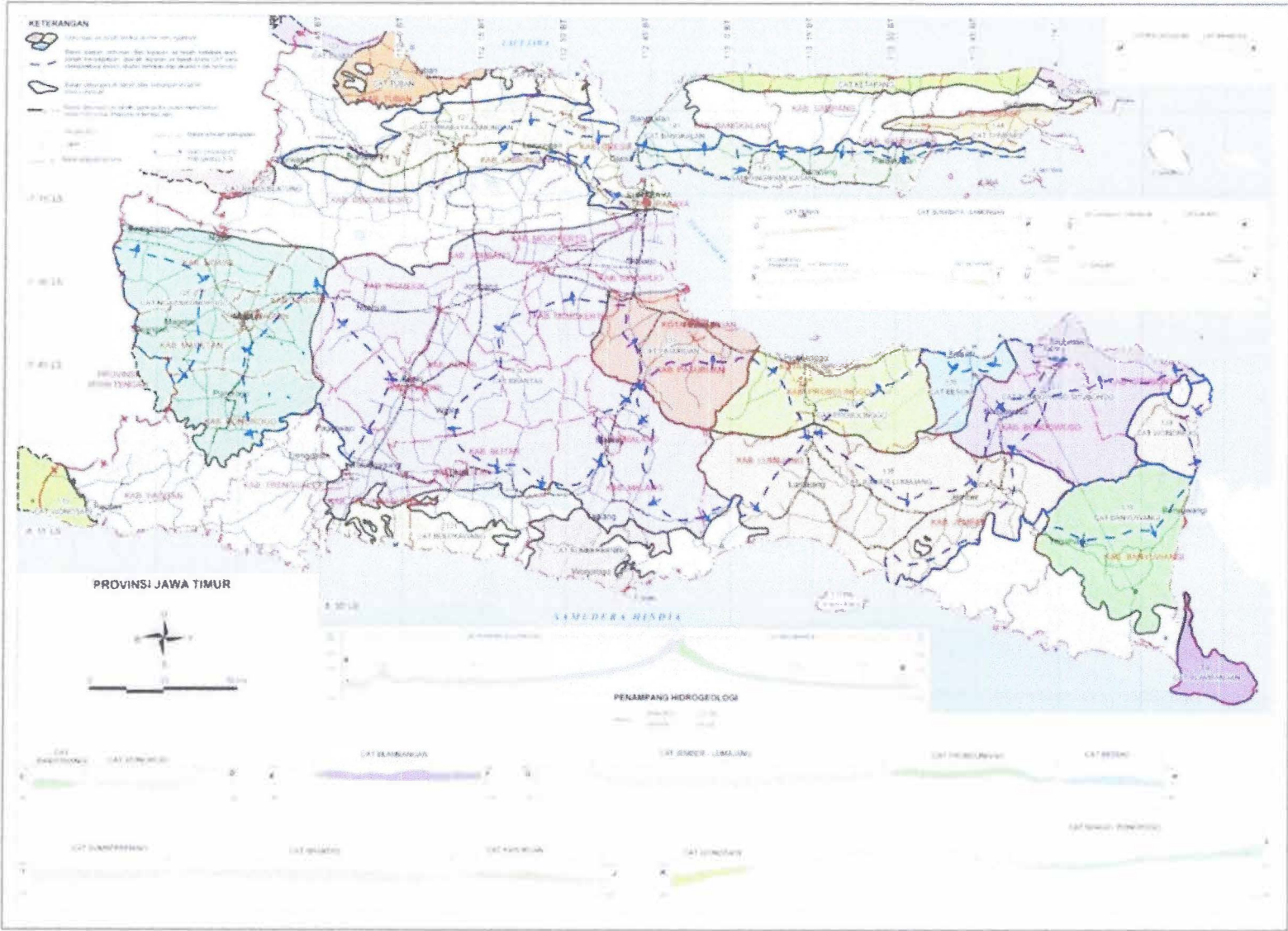
Baku mutu yang digunakan dalam analisa air bersih tersebut adalah baku mutu yang digunakan untuk keperluan Higiene Sanitasi, yaitu air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu juga dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Parameter air limbah yang bersinggungan dengan parameter air bersih adalah Total coliform, dengan baku mutu air bersih sebesar 50 CFU/ 100 ml. Dari hasil analisis tersebut mengindikasikan sudah terjadi pencemaran sumber air bersih yang dikonsumsi penduduk, hal ini terlihat dari jumlah pencemaran bakteri coliform dari sampling yang diperiksa, yaitu dari 3 sampel air sumur yang diperiksa, 2 sampel terindikasi tercemar (total coliform yang melebihi baku mutu).



Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar masuk dalam peta Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas, CAT Bulukawang, dan CAT Sumber Bening. Oleh karena itu, dapat diandalkan sebagai pengupayaan potensi air tanah yang ada untuk dioptimalkan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Blitar. Berikut peta terkait Cekungan Air Tanah (CAT) Wilayah Jawa Timur.



Gambar 2. 4 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Wilayah Jawa Timur
Sumber: RISPAM Kabupaten Blitar Tahun 2024-2043

2.6. KONDISI GEOLOGI

Jenis batu-batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Blitar sebagian besar berada dibagian selatan dan telah dieksploitasi, antara lain adalah :

- Kaolin di Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sutojayan
- Ball Clay di Kecamatan Sutojayan
- Bently di Kecamatan Binangun
- Batu Bintang di Kecamatan Binangun, Panggungrejo, Wonotirto dan Sutojayan
- Batu Tufa di Kecamatan Wates
- Felspar di Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Panggungrejo
- Pasir besi di Kecamatan Bakung dan Panggungrejo

Terdapat sekitar enam jenis tanah di Kabupaten Blitar, yaitu : Alluvial, Regosol, Litosol, Mediteran, Latosol dan Indosol. Jenis tanah alluvial terdapat di bagian barat Kabupaten Blitar dengan bahan induk endapan tanah liat dan pasir serta topografinya dataran. Jenis tanah yang mempunyai penyebaran paling luas adalah kompleks litosol, mediteran dan refina yang menyebar di bagian selatan.



Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Blitar

Sumber: RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

2.7. KONDISI PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Menurut UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana kota pada umumnya meliputi jalan kota, sanitasi kota, persampahan, air bersih, listrik/energi, telekomunikasi, gas serta drainase dan pengendalian banjir. Adapun beberapa prasarana kota yang terdapat pada Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan sanitasi yaitu Prasarana Air Minum, Prasarana Air Limbah, dan Prasarana Persampahan.

2.7.1 Prasarana Air Minum

Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia sehari-hari karena dibutuhkan dalam kegiatan memasak, mencuci, dan mandi. Pentingnya keberadaan air maka dalam pembangunan suatu wilayah harus diperhatikan dalam penyediannya sebagai sarana penunjang permukiman penduduk. Pelayanan air minum atau air bersih di Kabupaten Blitar sebagian telah dilayani jaringan PDAM terutama di kawasan perkotaan (IKK), tetapi sebagian lagi terutama di kawasan pedesaan masih mempergunakan air tanah (sumur). Tabel 2.6 menunjukkan pelanggan PDAM di Kabupaten Blitar

Tabel 2. 6 Pelanggan PDAM, Air Minum dan Nilai yang Disalurkan dari PDAM di Kabupaten Blitar

No	Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Daya Terpasang (000 KVA)	Pemakaian (Kwh)
1	Rumah Tempat Tinggal	7.012	1.278.307	1.450.355
2	Hotel/Obyek Wisata	-	-	-
3	Badan Sosial/Rumah Sakit	129	35.385	28.418
4	Tempat Peribadatan	-	-	-
5	Sarana Umum	-	-	-
6	Toko, Industri, Perusahaan	69	14.088	32.224
7	Industri/Kantor Pemerintahan	40	13.324	17.361
8	Lainnya	73	213.078	289.206
Jumlah		7.323	1.554.182	1.817.564

Sumber : RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

PERUMDA Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan baik sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. System Penyedia Air Minum (SPAM) dari PERUMDA Kabupaten Blitar telah melayani sebanyak 17 kecamatan, melalui sumber air baku seperti mata air dan sumur bor. Kapasitas terpasang tahun 2022 sebesar 260 L/detik. Sumber mata air yang berpotensi menjadi sumber air antara lain : mata air jurang banteng, mata air tirtomoyo semen, mata air umbulan balrejo, mata air swarubuluroto, mata air ds. Kalidukun, mata air ds. Ngembul, dan mata air bambang.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Blitar menggunakan air sumur gali dan sumur pompa tangan untuk memenuhi kebutuhan airnya. Oleh karena itu perlu sekali upaya untuk menjaga air sumur tersebut dari pencemaran utamanya adalah dari pencemaran air limbah domestik.

PETA WILAYAH PELAYANAN PERUMDA DAN SPAM PERDESAAN KABUPATEN BITAR

LEGENDA

	BINA MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI
	LIRIS MANDIRI		LIRIS MANDIRI

SKALA

0 1000 2000

Uraian

1. Bina Mandiri

2. Liris Mandiri

3. Liris Mandiri

4. Liris Mandiri

5. Liris Mandiri

6. Liris Mandiri

7. Liris Mandiri

8. Liris Mandiri

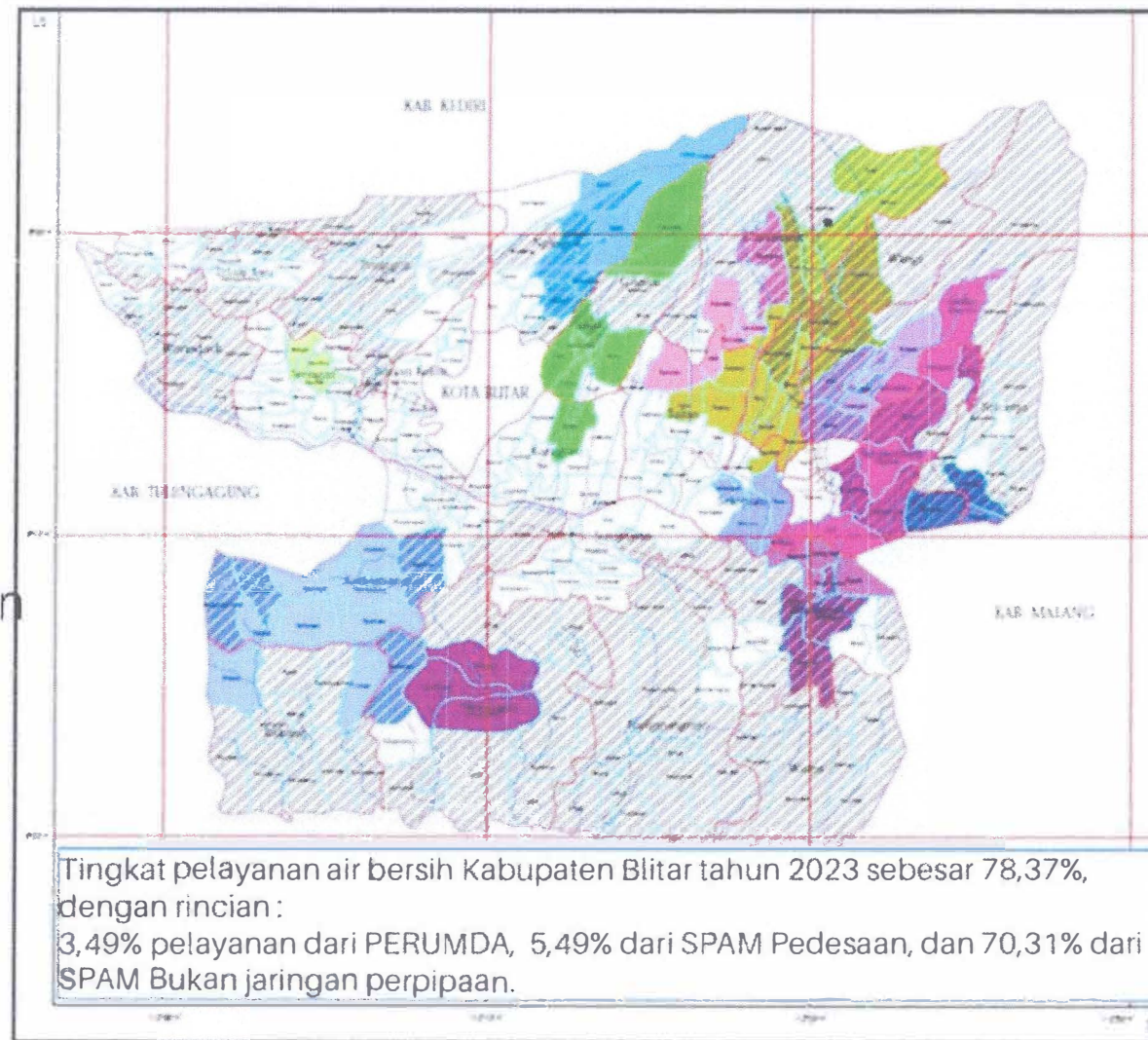
9. Liris Mandiri

10. Liris Mandiri

11. Liris Mandiri

12. Liris Mandiri

13. Liris Mandiri



LAPORAN AKHIR | 2025

2.7.2 Prasarana Persampahan

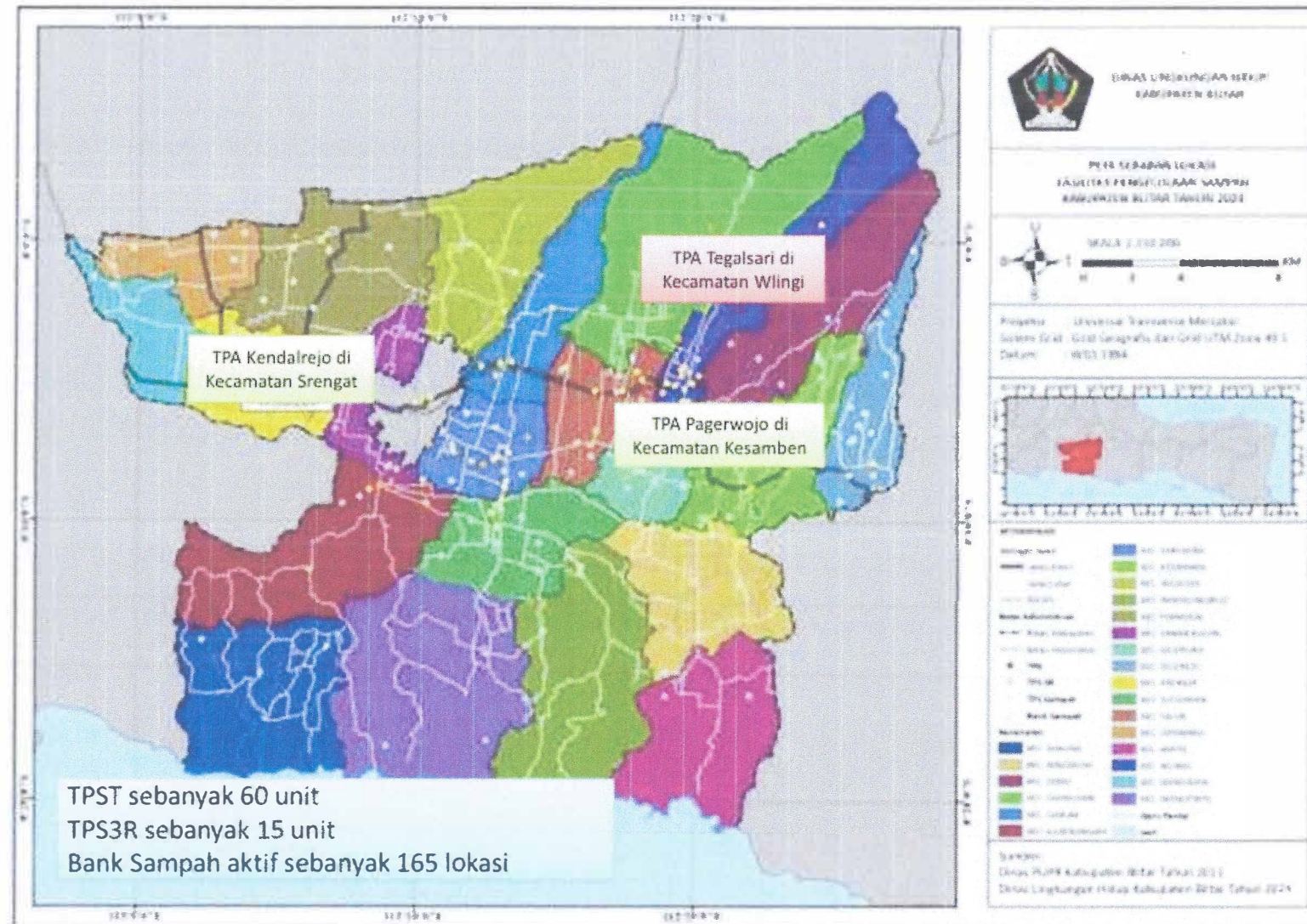
Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah akan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sumber sampah yang terdapat di Kabupaten Blitar berasal dari pemukiman, pasar, komersial, perkantoran, jalan/saluran, industri, dan fasilitas sosial lainnya.

Pengembangan pelayanan persampahan dilakukan dengan merencanakan atau meprediksi terhadap jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk pada kawasan rencana tiap harinya. Menurut RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.273.450 jiwa, total timbunan sampah yang dihasilkan mencapai 10 ton dan dengan jumlah tersebut dibutuhkan kurang lebih sejumlah 1 TPST.

Bentuk pengembangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan sampah yakni dilakukannya pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di kecamatan wlingi, kecamatan kesamben, kecamatan sutojayan, kecamatan srengat, kecamatan nglegok dan kecamatan kademangan. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan fungsi tempat pemrosesan akhir (TPA) dari sistem *open dumping* ke *sanitary landfill*.

Berikut Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten Blitar, dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



Gambar 2. 7 Peta Sebaran Lokasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Blitar

Sumber: Keputusan Bupati Blitar No. B/180.05/BJ/409.1.2/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blitar tahun 2025-2026

2.7.3 Prasarana Drainase Lingkungan

Dalam menyusun sistem drainase Kabupaten Blitar maka faktor-faktor yang berpengaruh adalah sistem drainase yang sudah (kondisi dimensi dan bentuk saluran, kemiringan dan arah aliran, fungsi saluran dan adanya sedimentasi dan penyumbatan saluran); kondisi perkembangan kota (perkembangan lahan terbangun dan pengaruh bangunan terhadap saluran); dan kondisi geografis atau topografi daerah.

Perwujudan Sistem Jaringan Drainase Kabupaten Blitar adalah :

- Pengembangan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
- Pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKL, dan PPK serta kawasan peruntukan industri;
- Pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan
- Pembangunan pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran sungai.

Jaringan drainase Kabupaten Blitar terdiri dari jaringan buatan dan alami dengan kondisi kurang terpelihara baik dan kurang optimal sehingga masih terdapat beberapa lokasi genangan yang nantinya jika tidak ditangani lebih lanjut akan menyebabkan banjir. Topografi Kabupaten Blitar merupakan daerah dataran rendah disamping itu terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai, sehingga pada saat curah hujan tinggi desa-desa yang berada di hilir sungai menjadi terendam dan tergenang untuk beberapa saat.

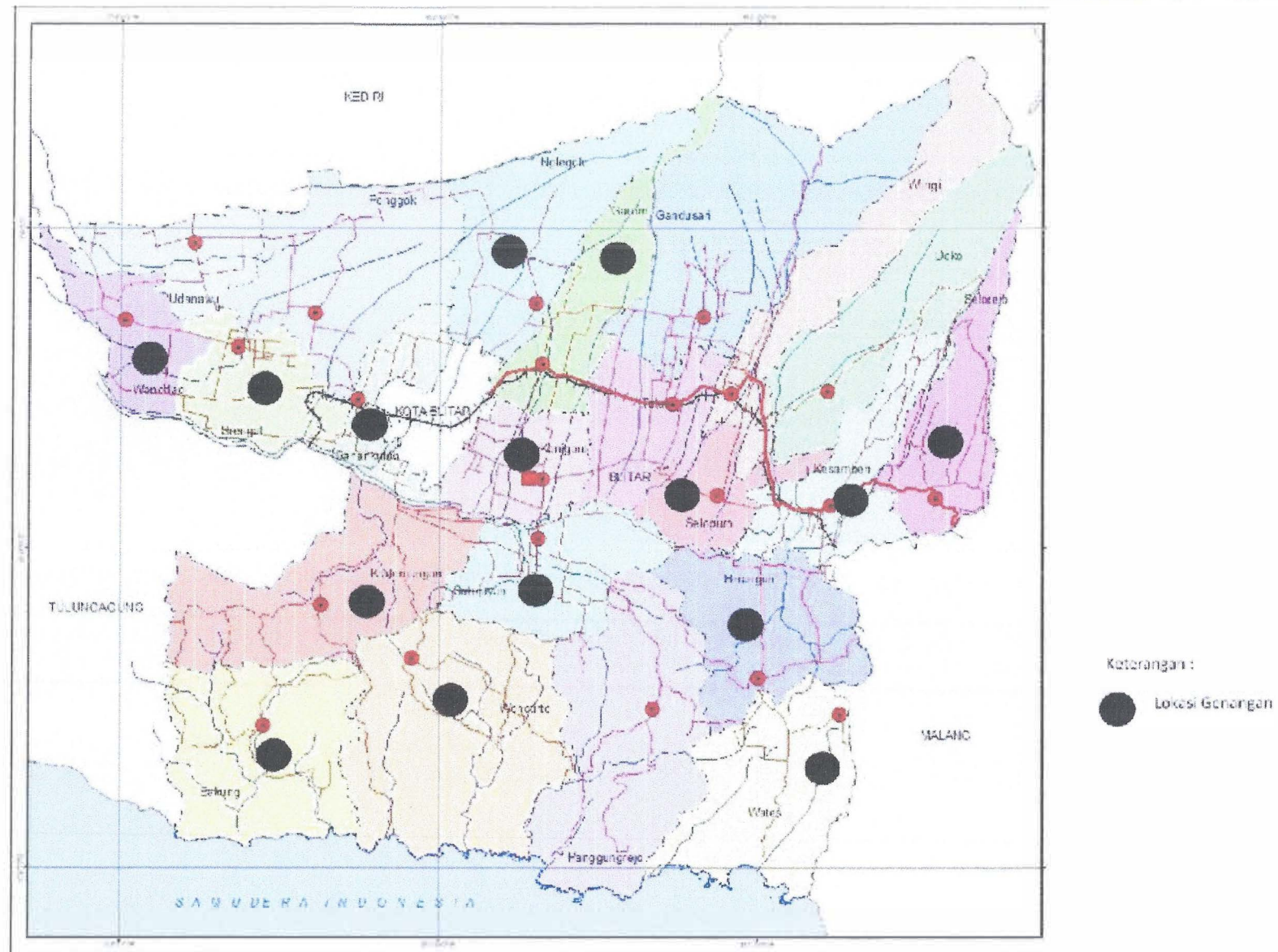
Kabupaten Blitar terdapat beberapa wilayah yang merupakan area potensi genangan. Lokasi potensi genangan di Kabupaten Blitar anatara lain di Kecamatan Sutojayan yang setiap tahunnya mengalami genangan paling luas yaitu 230 ha yang tersebar di Kelurahan Sutojayan, Kelurahan Kedungbunder dan Kelurahan Kalipang. Kondisi sarana prasarana drainase lingkungan di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Tabel 2. 7 Kondisi sarana prasarana drainase lingkungan di Kabupaten Blitar

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Jumlah/ Panjang	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
					Lebar	Tinggi	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	Kelurahan Beru	m	1200	Trapesium	50 cm	70 cm	✓		1
2	Kelurahan Wlingi	m	750	Trapesium	50 cm	80 cm	✓		1
3	Kelurahan Sutojayan	m	1500	Trapesium	50 cm	70 cm	✓		1
4	Kelurahan Garum	m	1000	Trapesium	50 cm	80 cm	✓		1
5	Kelurahan Ngelegok	m	2000	Trapesium	50 cm	80 cm	✓		1
6	Kelurahan Kanigoro	m	1400	Trapesium	50 cm	70 cm	✓		1
7	Sanankulon	m	1500	Trapesium	40 cm	60 cm	✓		1
8	Kel. Kalipang	m	1100	Trapesium	40 cm	60 cm	✓		1
9	Kel. Jingglong	m	1200	Trapesium	40 cm	60 cm	✓		1
10	Kel. Kademangan	m	1400	Trapesium	50 cm	80 cm	✓		1
2	Sal. Primer Kali Precet	M	-	-	-	-	-	-	-
	Bangunan Pelengkap	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Rumah Pompa	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pintu Air	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Kolam Retensi	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Trash rack/saringan sampah	Unit	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : SSK Kabupaten Blitar 2023-2027



Gambar 2. 8 Peta Lokasi Genangan di Kabupaten Blitar

(Sumber : SSK Kabupaten Blitar 2023-2027)

2.8 RENCANA PENATAAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031 disebutkan bahwa Rencana pusat kegiatan Kabupaten Blitar terdiri dari orientasi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang masing-masing memiliki fungsi dan peran Kabupaten Blitar dalam lingkup regional. Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud yang terdiri dari :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Perkotaan Kanigoro yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, industry agro, pusat pelayanan pendidikan, pusat peribadatan dan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
- b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yang terdiri dari :
 - Perkotaan Wlingi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan Kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan transportasi;
 - Perkotaan Srengat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan Kesehatan, pusat pelayanan pendidikan. Industry pengolahan, dan pusat pengembangan transportasi
 - Perkotaan Sutojayan berfungsi sebagai pusat pemerintah kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan Kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, industry pengolahan, pusat pengembangan transportasi dan pusat rekreasi, olahraga serta wisata.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terletak pada 12 kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, perikanan, industry pengolahan, pusat pendidikan, simpul transportasi dan pusat peribadatan. PPK terdiri dari : Perkotaan Nglegok, Perkotaan Kademangan, Perkotaan Talun, Perkotaan Selopuro, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Wonodadi, Kecamatan Ponggok, Perkotaan Selorejo, Perkotaan Udanawu, Perkotaan Gandusari, Perkotaan Garum, dan Perkotaan Sanankulon.
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan, pusat lokal, pariwisata, perikanan, industri pengolahan dan kerajinan tangan skala beberapa desa. PPL terdiri dari :
 - Perdesaan Plandirejo, Kecamatan Bakung
 - Perdesaan Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto
 - Perdesaan Serang, Kecamatan Panggungrejo
 - Perdesaan Ringinrejo, Kecamatan Wates

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

- Perdesaan Salamrejo, Kecamatan Binangun
- Perdesaan Doko, Kecamatan Doko

Berikut Gambar 2.7 merupakan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Blitar.

RISPALD
Kabupaten Blitar

Gambar 2. 9 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Blitar
(Sumber: RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031)

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Berikut merupakan Rencana penggunaan lahan Kabupaten Blitar untuk tahun perencanaan 2011 – 2031

Tabel 2. 8 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

No	Kecamatan	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Konservasi Sungai	Konservasi Mata Air	Konservasi Pantai	Konservasi Bendungan	Permukiman
1	Bakung	0	2603.75	573	12.56	736.4	0	1091
2	Wonotirto	0	4036.33	260.2	50.24	163.8	0	882
3	Panggungrejo	0	2223.14	432.6	263.76	98.35	0	2075
4	Wates	0	1434.1	269.5	439.6	150.15	0	584
5	Binangun	0	1523.24	112.7	351.68	0	0	1355
6	Sutojayan	0	1227.58	286.2	62.8	0	0	1147
7	Kademangan	0	2105.6	149.8	25.12	0	0	1634
8	Kanigoro	0	0	116.2	100.48	0	0	3017
9	Talun	0	0	40.6	113.04	0	87.41	1918
10	Selopuro	0	0	156.8	12.56	0	0	1184
11	Kesamben	0	622.27	159.6	200.96	0	0	1123
12	Selorejo	104.12	145.37	38.5	200.96	0	0	1583
13	Doko	1183.01	354.75	0	251.2	0	0	1571
14	Wlingi	2044.8	545.25	93.8	138.16	0	0	932
15	Gandusari	836.1	0	178.5	464.72	0	255.67	1705
16	Garum	266.88	0	37.1	238.64	0	0	1348
17	Nglegok	1361.5	0	317.8	376.8	0	0	2018
18	Sanankulon	0	166.65	67.9	188.4	0	0	738
19	Ponggok	0	1557.45	110.6	251.2	0	0	3478

**Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar**

No	Kecamatan	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Konservasi Sungai	Konservasi Mata Air	Konservasi Pantai	Konservasi Bendungan	Permukiman
20	Srengat	0	0	99.4	125.6	0	0	2800
21	Wonodadi	0	0	209.3	0	0	0	1110
22	Udanawu	0	0	105	25.12	0	0	1563
Kabupaten Blitar		5796.41	18545.48	3815.1	3893.6	1148.7	343.08	34856

No	Kecamatan	Perkebunan	Kebun Campur	Tegal	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Semak	Lahan Kosong
1	Bakung	0	3055.44	2342.85	0	0	0	0
2	Wonotirto	3277.38	1716.3	5648.6	0	858.15	0	0
3	Panggungrejo	0	930.48	5004.03	0	582.64	0	0
4	Wates	1240.45	743.16	1720.76	0	206.28	0	0
5	Binangun	0	1458.1	1863.3	0	679.98	0	0
6	Sutojayan	0	384.65	158.01	846.32	208.44	0	0
7	Kademangan	0	1579.2	3000.96	1052.8	526.4	315.84	105.28
8	Kanigoro	0	652.13	0	970.19	0	0	0
9	Talun	0	781.02	0	1635.37	0	0	99.56
10	Selopuro	0	358.13	0	1432.51	0	0	0
11	Kesamben	207.4	1078.6	269.65	622.27	1348.25	0	0
12	Selorejo	290.74	1453.7	218.06	290.74	508.81	0	0
13	Doko	1773.75	349.76	354.75	532.13	524.65	0	0
14	Wlingi	1817.5	227.34	72.7	727	530.45	0	0
15	Gandusari	2387.46	531.51	0	2126.04	0	0	0

**Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar**

No	Kecamatan	Perkebunan	Kebun Campur	Tegal	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Semak	Lahan Kosong
16	Garum	2131.82	189.47	136.4	1073.69	0	0	0
17	Nglegok	661.5	868.44	925.6	1794.96	231.4	0	0
18	Sanankulon	0	417.44	333.3	1252.31	0	0	0
19	Ponggok	0	282.77	2076.6	1601.76	0	30.62	0
20	Srengat	0	939.66	539.9	626.44	0	0	0
21	Wonodadi	0	472.41	314.63	1889.66	0	0	0
22	Udanawu	0	190.2	196.85	1711.83	0	0	0
Kabupaten Blitar		13788	18659.91	25176.95	20186.02	6205.45	346.46	204.84

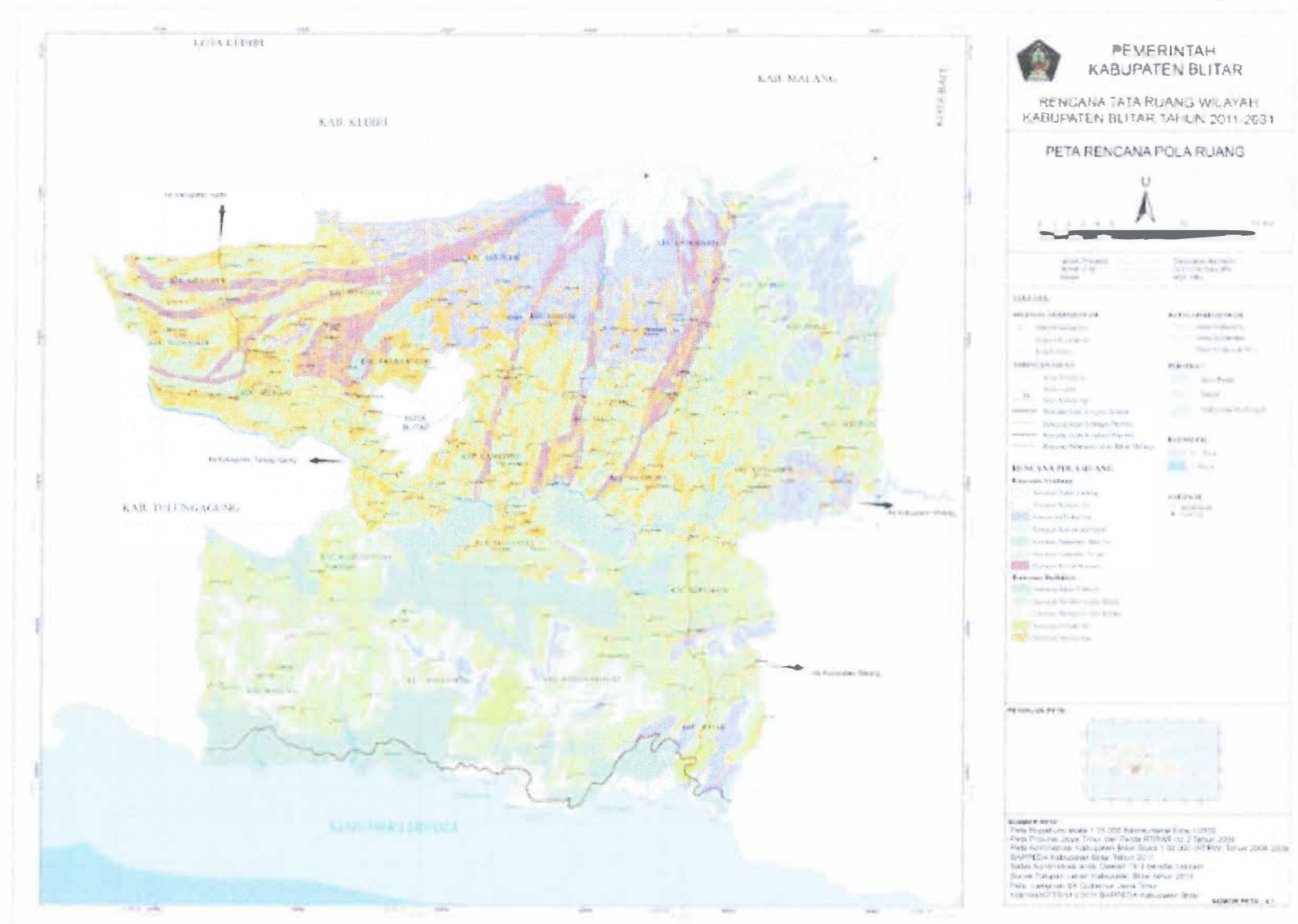
No	Kecamatan	Tambak	Kolam	Lain-lain	Jumlah
1	Bakung	0	0	0	10415
2	Wonotirto	0	0	270	17163
3	Panggungrejo	44	0	250	11904
4	Wates	0	0	88	6876
5	Binangun	0	0	335	7679
6	Sutojayan	0	4	95	4420
7	Kademangan	0	0	33	10528
8	Kanigoro	0	8	691	5555
9	Talun	0	5	298	4978
10	Selopuro	0	5	146	3295
11	Kesamben	0	4	71	5707
12	Selorejo	0	2	376	5212

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Tambak	Kolam	Lain-lain	Jumlah
13	Doko	0	0	200	7095
14	Wlingi	0	3	138	7270
15	Gandusari	0	6	332	8823
16	Garum	0	21	13	5456
17	Nglegok	0	32	668	9256
18	Sanankulon	0	0	169	3333
19	Ponggok	0	0	994	10383
20	Srengat	0	0	268	5399
21	Wonodadi	0	0	199	4195
22	Udanawu	0	0	145	3937
Kabupaten Blitar		44	90	5779	158879

(Sumber : RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031)

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



Gambar 2. 10 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Blitar
(Sumber: RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2030)

2.9 DEMOGRAFI (KEPENDUDUKAN)

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sebanyak 1.261.699 jiwa, yang terdiri atas 633.732 jiwa penduduk laki-laki dan 627.967 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kabupaten Blitar pada tahun 2023-2024 terjadi pada Kecamatan Gandusari sebesar 1,24% dengan jumlah penduduk 76.135 jiwa. Sementara itu rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di Kabupaten Blitar sebesar 100,92. Kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar tahun 2024 mencapai 788 jiwa/km².

Berdasarkan data Kabupaten Blitar Dalam Angka 2013 – 2024, persebaran dan kepadatan penduduk Kabupaten Blitar Per-kecamatan, tersaji dalam Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar berikut

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Kepadatan Penduduk per km2	Kategori Kepadatan Penduduk
Bakung	28.911	260	Rendah
Wonotirto	40.312	245	Rendah
Panggungrejo	44.326	372	Rendah
Wates	31.540	459	Rendah
Binangun	47.485	618	Sedang
Sutojayan	52.623	1191	Sedang
Kademangan	72.273	686	Sedang
Kanigoro	81.485	1467	Tinggi
Talun	66.811	1342	Tinggi
Selopuro	45.653	1162	Sedang
Kesamben	54.680	960	Sedang
Selorejo	40.010	766	Sedang
Doko	42.129	594	Sedang
Wlingi	55.315	834	Sedang
Gandusari	76.135	863	Sedang
Garum	69.408	1272	Tinggi
Nglegok	76.294	824	Sedang
Sanankulon	57.561	1727	Tinggi
Ponggok	112.865	1087	Sedang

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Kepadatan Penduduk per km2	Kategori Kepadatan Penduduk
Srengat	70.009	1297	Tinggi
Wonodadi	51.036	1265	Tinggi
Udanawu	44.838	1094	Sedang

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

Secara umum jumlah penduduk di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah penduduk tersebut secara langsung berdampak pada produksi limbah domestik (*gray water* dan *black water*) yang akan dihasilkan.

Dalam Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar, diperlukan proyeksi jumlah penduduk pada tahun perencanaan. Dari jumlah penduduk yang telah diproyeksikan tersebut, maka dapat diperhitungkan kebutuhan air bersih, dan beban air limbah yang akan dikelola. Dalam perhitungan proyeksi penduduk, terdapat tiga metode yang dapat digunakan, yaitu metode aritmatik, geometrik, dan metode *least square*. Dari ketiga metode tersebut kemudian dicari koefisien korelasinya terlebih dahulu untuk mencari metode mana yang akan digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk. Koefisien korelasi dari ketiga metode tersebut dipilih yang mendekati 1 (grafik linier) sehingga dapat ditentukan metode/rumus mana yang akan digunakan menghitung proyeksi penduduk Kabupaten Blitar.

Untuk mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2045 maka dilakukan proyeksi penduduk dengan data yang ada dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Dari periode perencanaan selama 20 tahun. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk dari tahun 2014 sampai tahun 2024 Kabupaten Blitar terdapat pada Tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Penduduk Kabupaten Blitar 2014 – 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan	
			Jiwa	%
1	2014	1140793	0	0
2	2015	1145396	4603	0,40349126
3	2016	1149710	4314	0,3766383
4	2017	1153803	4093	0,35600282
5	2018	1157500	3697	0,32041865
6	2019	1261932	104432	9,02220302
7	2020	1280512	18580	1,47234558
8	2021	1242207	-38305	-2,9913816
9	2022	1239565	-2642	-0,212686
10	2023	1252242	94742	7,64316514
11	2024	1261699	9457	0,75520546
Total		13285359	202971	17,1454027
Rata-rata				1,55867297
Standar Deviasi				3,54061928
Batas Atas Data				5,09929225
Batas Bawah Data				-1,9819463

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2015 – 2025

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

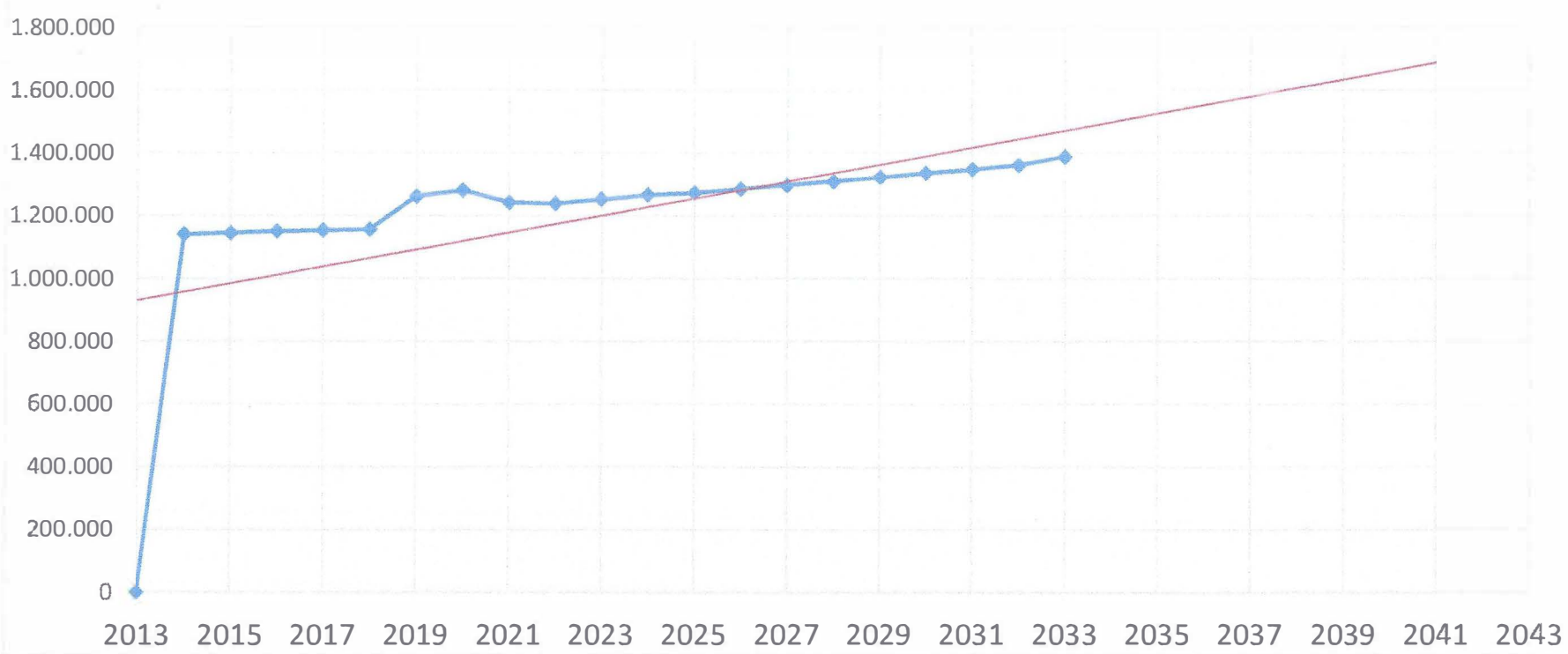
Karena terdapat nilai kematian yang besar, maka % pertumbuhan penduduk bernilai negatif dan menyebabkan biasanya suatu data. Maka perlu dihitung standar deviasi untuk membatasi data mana yang akan digunakan. Dari hasil perhitungan didapatkan standar deviasi % pertumbuhan penduduk sebesar $\pm 3,5406$. Dari nilai tersebut, maka batas maksimal dan minimum nilai % pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

- Deviasi maksimal = 5,099 %
- Deviasi minimal = -1,981 %

Selanjutnya mencari nilai koefisien korelasi dan pertumbuhan penduduk ditentukan dengan menggunakan metode Geometri sebagai berikut :

Metode Geometri								
No	Tahun	Jumlah	Urutan Data Tiap Tahun	Jumlah Penduduk Tahun	XY	X ²	Y ²	Koef. Korelasi
			X	Y				(r) geometri
1	2013	1136701	1	13,94364077	13,94364077	1	194,4251178	0,867949128
2	2014	1140793	2	13,94723419	27,89446839	4	194,5253416	
3	2015	1145396	3	13,95126099	41,85378296	9	194,6376831	
4	2016	1149710	4	13,95502029	55,82008118	16	194,7425914	
5	2017	1153803	5	13,958574	69,79287	25	194,8417881	
6	2018	1157500	6	13,96177306	83,77063839	36	194,9311071	
7	2019	1261932	7	14,04815444	98,33708107	49	197,3506431	
8	2020	1280512	8	14,06277056	112,5021644	64	197,7615157	
9	2021	1242207	9	14,03240019	126,2916017	81	196,9082552	
10	2022	1239565	10	14,03027107	140,3027107	100	196,8485063	
11	2023	1252242	11	14,0404461	154,4449071	121	197,1341268	
12	2024	1261699	12	14,04796978	168,5756374	144	197,345455	
Jumlah		13285359	77	16,40217316	1262,967333	5929	269,0312844	

PROYEKSI PENDUDUK KABUPATEN BLITAR METODE GEOMETRI



Gambar 2. 11 Grafik Perhitungan Nilai Korelasi metode Geometri
Sumber: Hasil Perhitungan Tim Konsultan, 2025

Hasil Perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Blitar tahun 2022 – 2045 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut :

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Tabel 2. 11 Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Blitar

Kecamatan	Tahun Proyeksi								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1.237.161	1.252.242	1.266.345	1.273.376	1.285.701	1.298.155	1.310.740	1.323.457	1.336.308
Kanigoro	83.243	80.697	84.458	85.072	85.690	86.313	86.940	87.572	88.209
Talun	66.420	66.433	67.631	68.245	68.864	69.489	70.120	70.756	71.398
Kesamben	53.740	54.409	54.807	55.349	55.896	56.448	57.006	57.569	58.138
Selorejo	39.240	39.906	40.171	40.645	41.125	41.610	42.101	42.597	43.100
Doko	41.140	42.024	41.939	42.345	42.754	43.167	43.584	44.006	44.431
Wlingi	54.260	55.077	55.125	55.563	56.004	56.448	56.897	57.348	57.804
Gandusari	74.340	75.205	75.990	76.829	77.677	78.535	79.402	80.278	81.164
Garum	69.300	68.975	70.399	70.955	71.515	72.080	72.649	73.223	73.801
Selopuro	44.650	45.431	45.752	46.313	46.881	47.456	48.037	48.627	49.223
Bakung	27.690	28.705	28.911	28.667	29.000	29.337	29.678	30.023	30.372
Wonotirto	38.294	40.014	40.312	39.524	39.943	40.366	40.793	41.226	41.662
Panggungrejo	42.460	44.162	44.326	43.317	43.606	43.898	44.191	44.486	44.783
Wates	30.521	31.453	31.540	31.498	31.831	32.167	32.507	32.851	33.198
Binangun	46.297	47.263	47.485	47.464	47.860	48.259	48.661	49.066	49.475
Sutojayan	51.717	52.279	52.623	53.108	53.580	54.056	54.537	55.021	55.510
Kademangan	70.674	71.833	72.273	74.634	76.002	77.396	78.815	80.260	81.732
Nglegok	74.599	75.570	76.294	76.652	77.348	78.051	78.761	79.476	80.199
Sanankulon	56.679	57.223	57.561	57.475	57.742	58.011	58.282	58.553	58.826

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Ponggok	109.992	111.575	112.865	113.700	114.963	116.241	117.532	118.838	120.159
Srengat	68.343	69.259	70.009	70.037	70.611	71.190	71.774	72.362	72.955
Wonodadi	49.949	50.418	51.036	51.140	51.543	51.949	52.359	52.772	53.188
Udanawu	43.613	44.331	44.838	44.846	45.265	45.688	46.115	46.545	46.980
Kecamatan	Tahun Proyeksi								
	2031	2031	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	1.349.294	1.362.417	1.375.677	1.389.078	1.402.621	1.416.306	1.430.136	1.444.113	1.458.238
Kanigoro	88.850	89.496	90.146	90.802	91.462	92.127	92.796	93.471	94.150
Talun	72.046	72.700	73.359	74.025	74.697	75.375	76.059	76.749	77.446
Kesamben	58.713	59.293	59.879	60.470	61.068	61.671	62.281	62.896	63.518
Selorejo	43.608	44.123	44.643	45.170	45.703	46.242	46.788	47.340	47.898
Doko	44.860	45.294	45.732	46.174	46.620	47.071	47.526	47.985	48.449
Wlingi	58.262	58.725	59.191	59.661	60.135	60.612	61.093	61.579	62.067
Gandusari	82.060	82.966	83.882	84.808	85.744	86.691	87.648	88.615	89.593
Garum	74.384	74.972	75.564	76.161	76.762	77.368	77.979	78.595	79.216
Selopuro	49.826	50.437	51.056	51.682	52.316	52.957	53.607	54.264	54.929
Bakung	30.726	31.083	31.444	31.810	32.179	32.554	32.932	33.315	33.702
Wonotirto	42.104	42.550	43.000	43.456	43.916	44.382	44.852	45.327	45.807
Panggungrejo	45.083	45.384	45.687	45.992	46.300	46.609	46.921	47.234	47.550
Wates	33.548	33.903	34.261	34.623	34.988	35.358	35.732	36.109	36.490
Binangun	49.888	50.303	50.723	51.145	51.572	52.002	52.435	52.872	53.313

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Sutojayan	56.003	56.501	57.003	57.510	58.021	58.536	59.057	59.581	60.111
Kademangan	83.231	84.757	86.311	87.894	89.506	91.147	92.818	94.520	96.254
Nglegok	80.928	81.663	82.405	83.154	83.910	84.673	85.442	86.219	87.003
Sanankulon	59.100	59.375	59.652	59.930	60.209	60.489	60.771	61.054	61.338
Ponggok	121.494	122.844	124.209	125.590	126.985	128.396	129.823	131.266	132.724
Srengat	73.553	74.156	74.764	75.377	75.994	76.617	77.245	77.878	78.517
Wonodadi	53.607	54.030	54.456	54.885	55.318	55.754	56.194	56.637	57.084
Udanawu	47.419	47.862	48.309	48.760	49.215	49.675	50.139	50.607	51.079
Kecamatan	Tahun Proyeksi								
	2040	2041	2042	2043	2044	2045			
	1.472.513	1.486.940	1.516.255	1.531.148	1.531.148	1.546.199			
Kanigoro	94.835	95.524	96.918	97.622	97.622	98.332			
Talun	78.148	78.858	80.295	81.024	81.024	81.759			
Kesamben	64.145	64.779	66.066	66.718	66.718	67.378			
Selorejo	48.463	49.035	50.199	50.791	50.791	51.390			
Doko	48.917	49.390	50.349	50.836	50.836	51.327			
Wlingi	62.560	63.057	64.062	64.571	64.571	65.083			
Gandusari	90.583	91.582	93.616	94.649	94.649	95.694			
Garum	79.842	80.472	81.748	82.394	82.394	83.045			
Selopuro	55.603	56.285	57.674	58.381	58.381	59.097			
Bakung	34.094	34.490	35.297	35.707	35.707	36.122			

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Wonotirto	46.292	46.783	47.779	48.285	48.285	48.797
Panggungrejo	47.867	48.187	48.833	49.160	49.160	49.488
Wates	36.876	37.265	38.057	38.459	38.459	38.865
Binangun	53.757	54.205	55.112	55.572	55.572	56.035
Sutojayan	60.645	61.184	62.276	62.830	62.830	63.388
Kademangan	98.019	99.816	103.510	105.408	105.408	107.341
Nglegok	87.793	88.591	90.209	91.029	91.029	91.856
Sanankulon	61.624	61.911	62.489	62.780	62.780	63.073
Ponggok	134.199	135.690	138.723	140.264	140.264	141.823
Srengat	79.160	79.809	81.123	81.788	81.788	82.458
Wonodadi	57.534	57.987	58.905	59.370	59.370	59.838
Udanawu	51.557	52.038	53.015	53.510	53.510	54.009

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Konsultan, 2025

2.10 KONDISI SOSIAL EKONOMI

Selain kondisi fisik wilayah, dalam penyusunan Rencana Induk Air Limbah Kabupaten Blitar membutuhkan data pendukung non fisik, termasuk didalamnya data kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya, dan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

2.10.1 Struktur Penduduk Berdasarkan Sumber Mata Pencapaian

Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat Kabupaten Blitar bekerja sesuai dengan lapangan pekerjaannya masing-masing. Penduduk usia kerja, yakni usia 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2. 12 Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Kabupaten Blitar 2024

No.	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Berusaha sendiri	163.987
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	122.566
3.	Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	24.560
4.	Buruh / karyawan / pegawai / employee	226.639
5.	Pekerja bebas	58.018
6.	Pekerja keluarga / tak dibayar	100.075
Jumlah		695.845

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

2.10.2 Pendapatan Masyarakat

Kondisi ekonomi Kabupaten Blitar dapat dilihat dari data berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar Rp 47.779,19 (miliar rupiah) atau meningkat di banding tahun 2023 yang sebesar Rp 44.891,7 (miliar rupiah).

Tabel 2. 13 PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Blitar tahun 2020 - 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.916,9	12.116,8	12.847,7	13.802,5	14.173,03
B	Pertambangan dan Penggalian	1.499,2	1.577,8	1.717,1	1.836,1	1.936,97
C	Industri Pengolahan	4.871,8	5.310,4	6.093,8	6.682,8	7.387,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,9	21,4	23,5	25,0	25,39
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,6	12,5	13,0	13,7	14,31
F	Konstruksi	3.227,2	3.295,0	3.730,8	3.964,3	4.242,33

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.349,8	6.954,5	7.811,5	8.588,1	9.207,73
H	Transportasi dan Pergudangan	460,6	511,6	637,1	747,4	832,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	352,3	381,7	428,6	476,1	519,61
J	Informasi dan Komunikasi	2.102,7	2.266,6	2.415,7	2.627,8	2.819,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	813,6	837,7	906,5	1.013,2	1.071,90
L	Real Estat	714,9	762,7	806,9	828,5	873,71
M,N	Jasa Perusahaan	123,0	127,6	138,5	147,0	159,54
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1.281,4	1.282,5	1.300,5	1.356,1	1.504,27
P	Jasa Pendidikan	1.535,2	1.563,1	1.606,1	1.746,2	1.875,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304,4	323,6	344,2	393,4	423,46
R, S, T, U	Jasa Lainnya	438,6	474,1	557,7	643,5	712,44
Produk Domestik Regional Bruto		36.024,0	37.819,7	41.379,3	44.891,7	47.779,19

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

Sedangkan jika dilihat menurut harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sebesar Rp 29.493,80 (miliar rupiah) meningkat dari tahun 2023 yang sebesar Rp 28.239,9 (miliar rupiah).

Tabel 2. 14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Blitar tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.375,2 7	7.376,3	7.439,2	7.564,1	7.543,02
B	Pertambangan dan Penggalian	999,5	1.015,2	1.069,1	1.112,5	1.164,90
C	Industri Pengolahan	3.422,5	3.609,2	3.997,1	4.211,0	4.489,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,7	19,1	20,5	21,5	21,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,8	10,4	10,5	10,8	11,07
F	Konstruksi	2.350,6	2.370,4	2.546,8	2.645,7	2.804,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.509,5	4.772,5	5.091,2	5.401,5	5.699,73
H	Transportasi dan Pergudangan	326,1	359,0	422,7	462,5	509,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,0	264,0	287,6	307,4	329,31
J	Informasi dan Komunikasi	1.969,0	2.104,4	2.240,4	2.379,5	2.530,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	556,9	566,5	585,2	631,4	663,09
L	Real Estat	530,5	553,8	574,3	585,7	612,74
M,N	Jasa Perusahaan	86,3	89,1	93,7	97,1	104,41

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Table with 7 columns: No., Lapangan Usaha, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include O (Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib), P (Jasa Pendidikan), Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial), R, S, T, U (Jasa Lainnya), and Produk Domestik Regional Bruto.

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

2.10.3 Data Non Permukiman (Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, Pariwisata)

Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Blitar membutuhkan data pendukung berupa data non permukiman, termasuk didalamnya data pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan industri di Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

a. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Blitar letaknya menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Fasilitas pendidikan tersebut meliputi TK, SD, SMP dan SMU serta perguruan tinggi. Penyebaran fasilitas pendidikan menyesuaikan dengan skala pelayanan wilayah. Adapun jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Blitar Tahun 2024/2025

Table with 7 columns: Kecamatan, TK, SD, SLTP, SMU, SMK, Perguruan Tinggi. Rows list various districts: Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, Kademangan, Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, and Wlingi.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Kecamatan	TK	SD	SLTP	SMU	SMK	Perguruan Tinggi
Gandusari	46	40	4	-	1	-
Garum	36	30	8	3	1	1
Nglegok	45	36	4	-	1	-
Sanankulon	31	30	6	2	1	1
Ponggok	65	53	8	1	1	-
Srengat	45	36	8	3	1	-
Wonodadi	35	21	6	2	4	-
Udanawu	27	23	2	-	1	-

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar terdiri atas Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, BKIA, Rumah sakit Bersalin, Poliklinik, Polindes, Apotik/Toko Obat dll. Untuk fasilitas berupa puskesmas dan puskesmas pembantu tersebar di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar. Fasilitas berupa Rumah Sakit dengan skala Kota mengelompok pada pusat kota yaitu Kecamatan Kanigoro. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17.

Tabel 2. 16 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin
1	Bakung	-	-
2	Wonotirto	-	-
3	Panggungrejo	-	-
4	Wates	-	-
5	Binangun	-	-
6	Sutojayan	1	-
7	Kademangan	-	-
8	Kanigoro	1	-
9	Talun	1	-
10	Selopuro	-	-
11	Kesamben	1	-
12	Selorejo	-	-
13	Doko	-	-
14	Wlingi	1	-
15	Gandusari	-	-
16	Garum	1	-
17	Nglegok	-	-

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin
18	Sanankulon	-	-
19	Ponggok	-	-
20	Srengat	3	-
21	Wonodadi	-	-
22	Udanawu	-	-
Jumlah		9	-

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

Tabel 2. 17 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik, Apotek di Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Bakung	-	1	4	1
2	Wonotirto	1	1	5	1
3	Panggungrejo	2	1	4	1
4	Wates	1	2	5	2
5	Binangun	2	1	4	4
6	Sutojayan	1	2	2	5
7	Kademangan	2	1	1	7
8	Kanigoro	2	1	4	8
9	Tahun	1	1	3	9
10	Selopuro	2	1	1	4
11	Kesamben	2	2	2	3
12	Selorejo	1	1	3	2
13	Doko	-	1	4	2
14	Wlingi	7	1	2	4
15	Gandusari	1	1	4	8
16	Garum	3	1	3	5
17	Nglegok	1	1	3	4
18	Sanankulon	2	1	3	4
19	Ponggok	1	1	3	6
20	Srengat	-	1	3	9
21	Wonodadi	1	1	2	5
22	Udanawu	1	1	3	2
Jumlah		34	25	68	96

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

c. Perdagangan

Kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Kabupaten Blitar pada umumnya berpola linier mengikuti ruas jalan seperti pertokoan. Fasilitas perdagangan di Kabupaten Blitar tidak hanya berupa pertokoan, tetapi juga berupa pasar seperti pasar, kios, dan warung. Berikut merupakan daftar sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Blitar dari tahun 2020-2024.

Tabel 2. 18 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2020-2024

Jenis Sarana Perdagangan	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar	80	80	80	80	80
Toko	261	268	119	192	255
Kios	139	139	139	131	132
Kios Pasar	895	895	877	756	806
Total Kios	1.034	1.034	1.016	887	938
Warung	-	-	-	-	-
Jumlah	1.375	1.382	1.215	1.159	2.211

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

Industri potensial di Kabupaten Blitar terdapat banyak unit-unit usaha industri dengan skala usaha yang bervariasi, meliputi industri besar, industri menengah, industri kecil dan home industry. Jumlah Industri yang ada di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2. 19 Jumlah Industri di Kabupaten Blitar 2024

No	Bidang Usaha	Unit Usaha	Jumlah Pekerja
1	Industri Sambel Pecel	277	535
2	Industri Gula Kelapa	5.597	11.265
3	Industri Makanan Olahan	8.622	18.826
4	Industri Tahu/Tempe	1.006	1.694
5	Industri Batik	70	190
6	Industri Tekstil/Konveksi	529	1.530
7	Industri Barang Kulit	19	32
8	Industri Pengolahan Kayu	1.955	4.109
9	Industri Kimia Farmasi	153	344
10	Industri Galian Bukan Logam	229	550
11	Industri Peralatan/Mesin	1.008	2.118
12	Industri Kerajinan	2.151	3.972
13	Industri Semen dan Bangunan	1.703	6.314
14	Industri Hutbun	377	1.578
15	Industri Lainnya	2.210	4.777
Jumlah		26.906	57.834

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

2.10.4 Kondisi Masyarakat Miskin

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial budaya, bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tenteram, bahagia dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan sosial diusahakan untuk mencegah, memberikan solusi dan memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai kumpulan individu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar tahun 2022 dan 2023 tercatat sebanyak 101,94 ribu jiwa. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 95,91 ribu jiwa angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,53% disbanding dengan tahun 2023. Garis miskin dan penduduk miskin di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut :

Tabel 2. 20 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin tahun 2017 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)
2017	285.474	112,93	9,8
2018	305.440	112,40	9,72
2019	318.534	103,75	8,94
2020	325.675	108,55	9,33
2021	335.573	112,62	9,65
2022	355.511	101,94	8,71
2023	387.733	101,94	8,69
2024	408.399	95,91	8,16

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025

2.10.5 Kesehatan Lingkungan

Keadaan lingkungan yang sehat tercipta dengan terwujudnya kesadaran individu dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Dalam Upaya Peningkatan kondisi penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar di Jawa Timur telah dilaksanakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM adalah kegiatan yang menitikberatkan pada upaya preventif dan promotif terpadu melalui upaya memicu dan mempertahankan keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat, sehingga peran aktif masyarakat dalam penyediaan sanitasi dasar melalui 3 (tiga) komponen - komponen STBM yang terdiri dari ; upaya menciptakan kebutuhan (*demand*), penyediaan layanan (*supply*) dan penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*)

Ketiga Komponen STBM tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (Lima) pilar STBM sebagai berikut:

- 1.Stop Buang Air besar sembarangan (SBS)
- 2.Cuci tangan pakai sabun (CTPS)
- 3.Pengolahan Air Minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT)
- 4.Pengolahan sampah Rumah Tangga (PS-RT)
- 5.Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)

A. Rumah Sehat

Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah.

Tabel 2. 21 Jumlah Rumah Sehat Per Kecamatan Di Kabupaten Blitar 2022

Kecamatan	Puskesmas	Kk Akses Rumah Sehat	
		Jumlah	%
Wonodadi	Wonodadi	9.325	57,7
Udanawu	Udanawu	8.231	43,3
Srengat	Srengat	17.498	102,9
Kademangan	Kademangan	8.896	34,8
Bakung	Bakung	1.115	7,3
Ponggok	Ponggok	12.015	57,8
Ponggok	Bacem	11.141	68,5
Sanankulon	Sanankulon	9.135	36,4
Wonotirto	Wonotirto	3.755	25,6
Nglegok	Nglegok	22.819	251,1
Kanigoro	Kanigoro	8.040	33,3
Garum	Garum	11.997	72,2
Sutojayan	Sutojayan	8.136	55,5
Panggungrejo	Panggungrejo	6.642	28,4
Talun	Talun	13.553	103,7
Gandusari	Gandusari	9.141	53,0
Gandusari	Slumbung	2.856	21,5
Binangun	Binangun	8.130	79,3
Wlingi	Wlingi	10.350	56,3
Doko	Doko	5.607	41,5
Kesamben	Kesamben	10.621	55,3
Wates	Wates	5.196	22,8
Selorejo	Boro	2.137	19,2
Selopuro	Selopuro	9.183	70,8

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Blitar 2022

Menurut Profil Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2022 ditahun 2022 jumlah KK akses rumah sehat yang ada di Kabupaten Blitar mencapai 52,6%.

B. Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (Jamban Sehat)

Pada tahun 2024 semua desa di Kabupaten Blitar sudah dinyatakan desa SBS. Bila ditinjau dari jumlah KK akses jamban sehat pada tahun 2024 jumlah tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Kanigoro yakni sebesar 28.969 KK. Capaian penduduk dengan akses jamban sehat pada tahun 2024 adalah 89,2% dengan rincian per kecamatan dan per desa masing-masing sebagai berikut :

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Tabel 2. 22 Jumlah KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman (Jamban Sehat) Tahun 2024

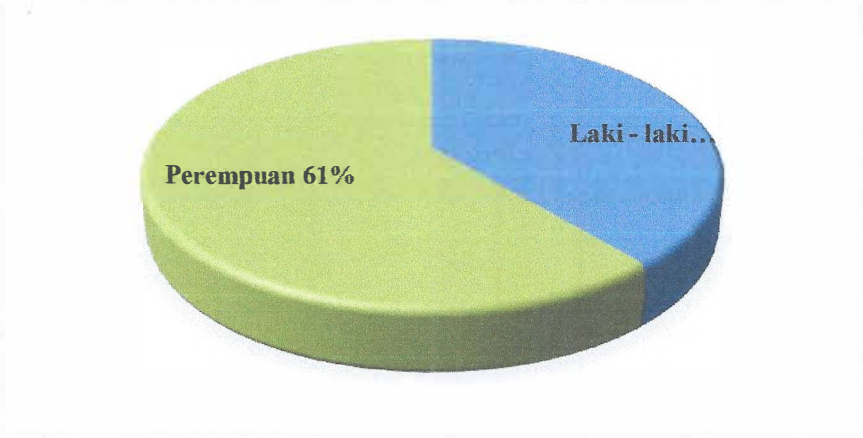
Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna				KK SBS		KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak		Presentase KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman
			Akses Sanitasi Aman	Akses Sanitasi Layak Sendiri	Akses Belum Layak	Akses Belum Layak	Jumlah	%	Jumlah	%	
Wonodadi	Wonodadi	17637	240	16808	305	284	17637	100,0	17353	98,4	1,4
Udanawu	Udanawu	15582	118	13473	321	1670	15582	100,0	13912	89,3	0,8
Srengat	Srengat	25203	297	23017	125	1764	25203	100,0	23439	93,0	1,2
Kademangan	Kademangan	26970	115	21406	1432	4017	26970	100,0	22953	85,1	0,4
Bakung	Bakung	11199	50	7341	910	2898	11199	100,0	8301	74,1	0,4
Ponggok	Ponggok	22455	150	18086	1931	2288	22455	100,0	20167	89,8	0,7
Ponggok	Bacem	16959	178	14843	759	1179	16959	100,0	15780	93,0	1,0
Sanankulon	Sanankulon	20747	257	16129	138	4223	20747	100,0	16524	79,6	1,2
Wonotirto	Wonotirto	15573	65	10849	1802	2857	15573	100,0	12716	81,7	0,4
Nglegok	Nglegok	27321	419	20454	1025	5423	27321	100,0	21898	80,2	1,5
Kanigoro	Kanigoro	28969	951	24571	1393	2054	28969	100,0	26915	92,9	3,3
Garum	Garum	24955	524	23388	583	460	24955	100,0	24495	98,2	2,1
Sutojayan	Sutojayan	19609	121	17420	65	2003	19609	100,0	17606	89,8	0,6
Panggungrejo	Panggungrejo	17278	180	14270	392	2436	17278	100,0	14842	85,9	1,0
Talun	Talun	24302	40	18620	1886	3756	24302	100,0	17815	73,3	0,2
Gandusari	Gandusari	17744	843	13755	2211	935	17744	100,0	16809	94,7	4,8
Gandusari	Slumbung	9843	304	7214	588	1737	9843	100,0	8106	82,4	3,1
Binangun	Binangun	17792	0	14137	2441	1214	17792	100,0	16578	93,2	0,0
Wlingi	Wlingi	20412	1569	17628	450	765	20412	100,0	19647	96,3	7,7
Doko	Doko	15871	714	10078	422	4657	15871	100,0	11214	70,7	4,5
Kesamben	Kesamben	20030	631	18393	54	952	20030	100,0	19078	95,2	3,2
Wates	Wates	11774	132	10166	116	1360	11774	100,0	10414	88,4	1,1
Selorejo	Boro	14907	206	13876	249	576	14907	100,0	14331	96,1	1,4
Selopuro	Selopuro	16516	815	15269	265	167	16516	100,0	16349	99,0	4,9
Jumlah (Kab/Kota)		459648	8919	381191	19863	49675	459648	100,0	409973	89,2	1,94

Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

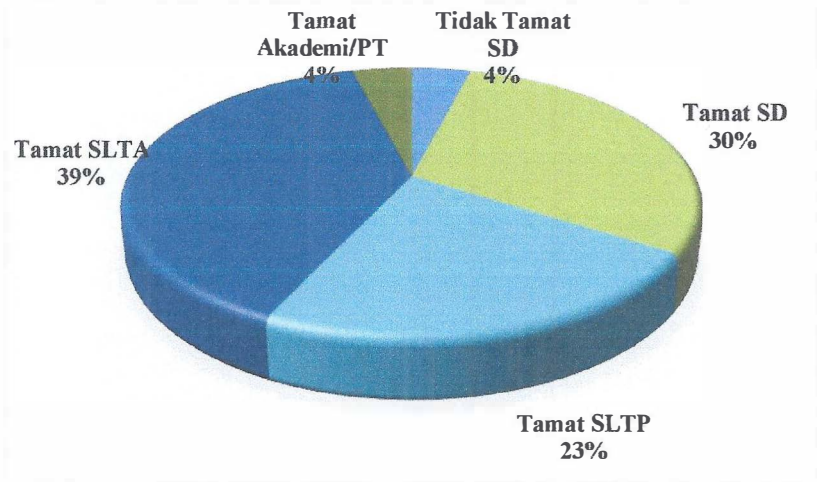
Selain melalui data dari BPS, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar, tim konsultan melakukan survey wawancara kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 100 KK. Persebaran kuesioner dilakukan secara proporsional random sampling ke 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Wawancara kuesioner yang dilakukan mencakup aspek Karakteristik Responden, Tempat Tinggal, Sumber Air Bersih, Pengelolaan Air Limbah, serta Kemauan dan Kemampuan Masyarakat.

A. Karakteristik Responden

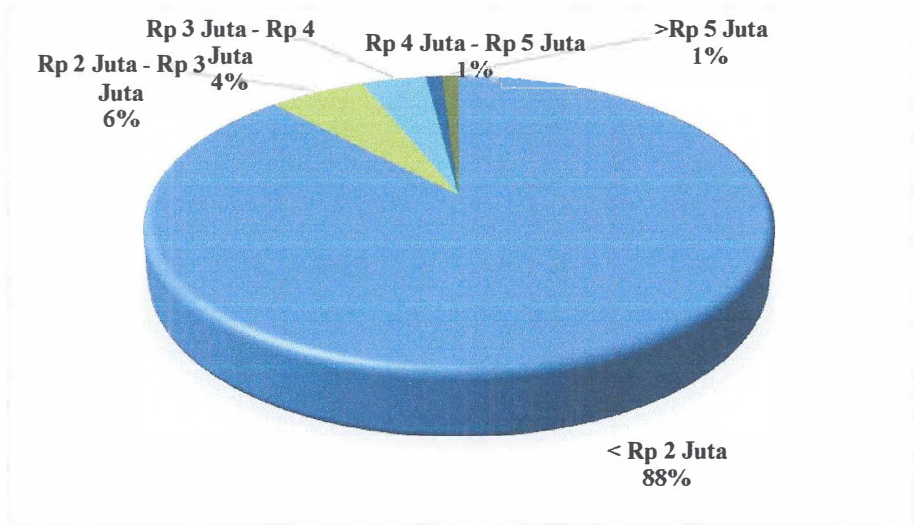
Dari 100 responden kuesioner, 61% berjenis kelamin perempuan dan 39% berjenis kelamin laki-laki, dengan tingkat pendidikan mayoritas Tamat SLTA (39%). Penghasilan responden tidak menentu dengan kisaran kurang dari Rp 2000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- per bulan.



Gambar 2. 12 Jenis Kelamin Responden
Sumber : Hasil Survey Kuesioner 2025



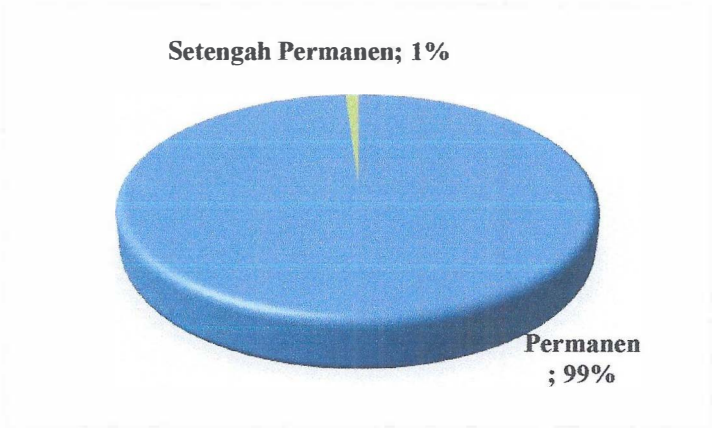
Gambar 2. 13 Pendidikan Terakhir Responden
Sumber : Hasil Survey Kuesioner 2025



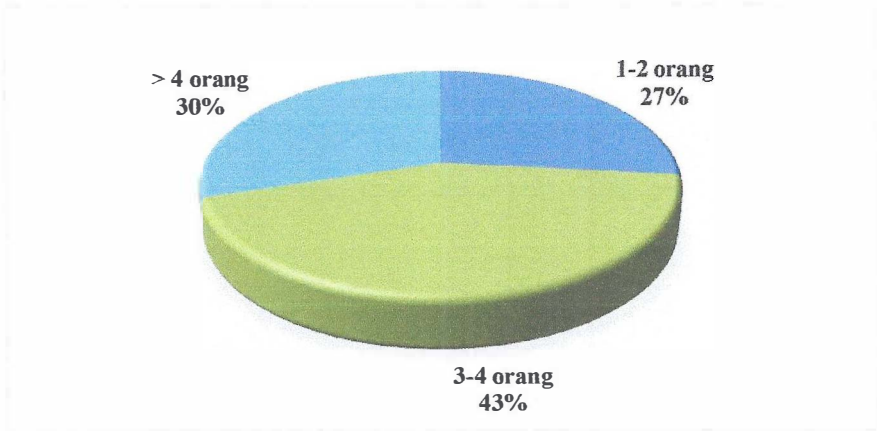
Gambar 2. 14 Penghasilan Rata-rata per Bulan
Sumber : Hasil Survey Kuesioner 2025

B. Tempat Tinggal

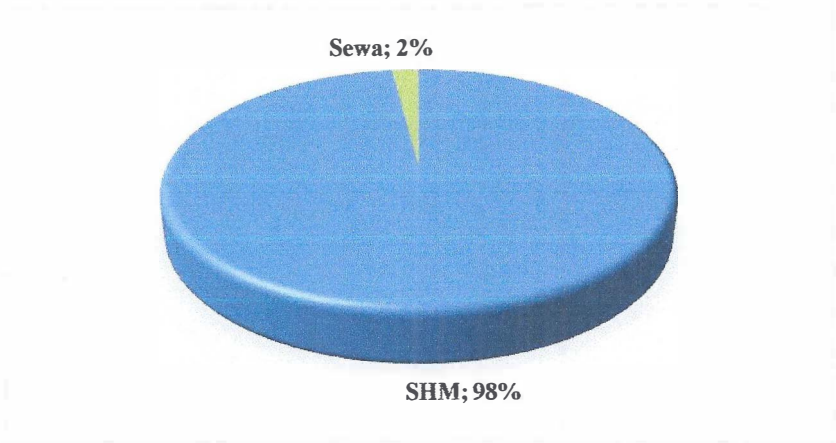
Wawancara kuesioner diperoleh hasil bahwa jenis bangunan fisik yang ditempati responden 99% permanen sedangkan 1% jenis bangunan fisik yang ditempati berupa setengah permanen. 98% status kepemilikan tanah adalah SHM/SGB dengan jumlah penghuni rumah mayoritas terdiri dari 3-4 orang (43%). Sebanyak 68% responden tidak menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha.



Gambar 2. 15 Jenis Bangunan Fisik yang Ditempati
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025



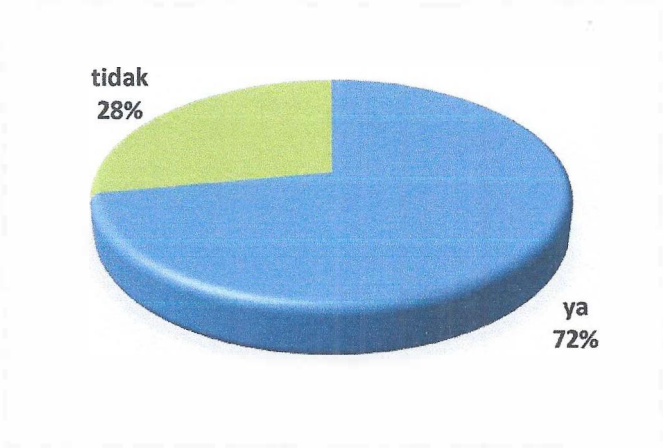
Gambar 2. 16 Jumlah Penghuni Rumah atau Tempat Tinggal
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025



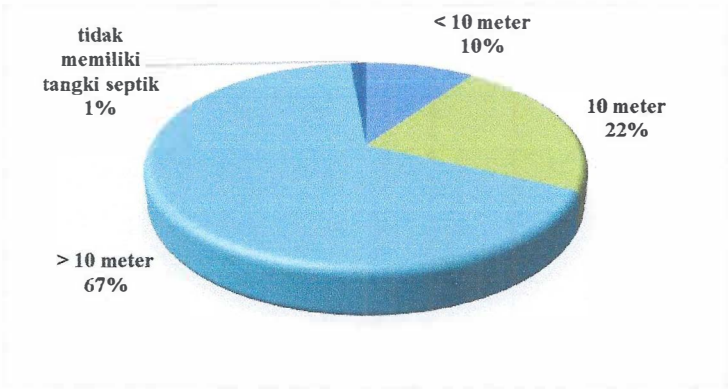
Gambar 2. 17 Status Kepemilikan Tanah
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025

C. Sumber Air Bersih

Sebesar 72% responden memanfaatkan sumur yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dan 67% memiliki jarak antara sumur ke tangki septik lebih dari 10 m. Hanya 10% responden yang jarak antara sumur dan tangki septik yang kurang dari 10 meter. Jarak yang sangat dekat tersebut berpotensi terjadi pencemaran pada air sumur yang digunakan. Jarak yang sehat antara sumur dengan tangki septik adalah lebih dari 11 meter.



Gambar 2. 18 Kepemilikan Sumur
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025



Gambar 2. 19 Jarak Sumur ke Tangki Septik
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025

D. Pengelolaan Air Limbah

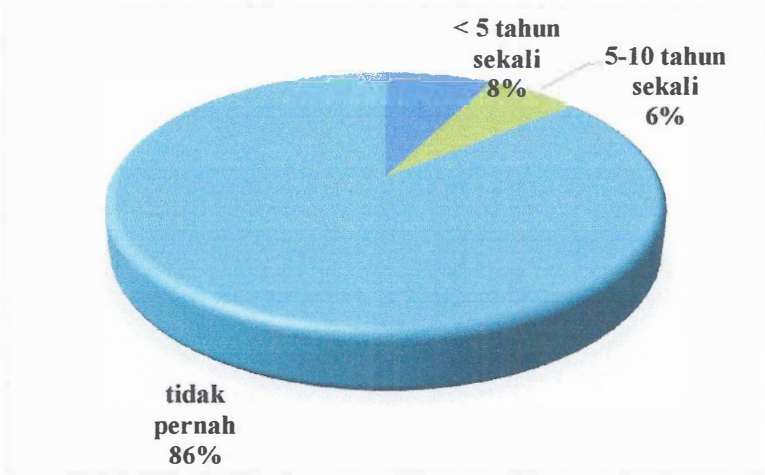
Hasil survey sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar terkait kepemilikan jamban, dari 100 responden sekitar 93% memiliki tangki septik, sedangkan 7% tidak memiliki tangki septik dan memanfaatkan kolam untuk pengelolaan. Tangki septik yang digunakan lebih dari 5 tahun yang lalu (84%). Konstruksi tangki septik yang dimiliki yaitu berupa beton berdasar (38%) dan tidak pernah dilakukan penyedotan tangki septik (86%). Hanya 14% responden yang pernah melaksanakan penyedot lumpur tinja.



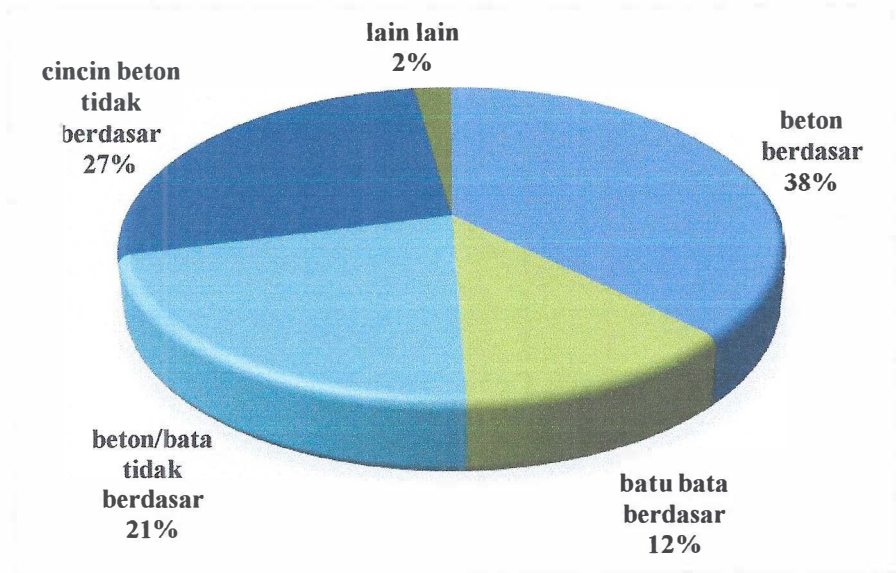
Gambar 2. 20 Presentase Kepemilikan Jamban di Kabupaten Blitar
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025



Gambar 2. 21 Lamanya Penggunaan Tangki Septik
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025

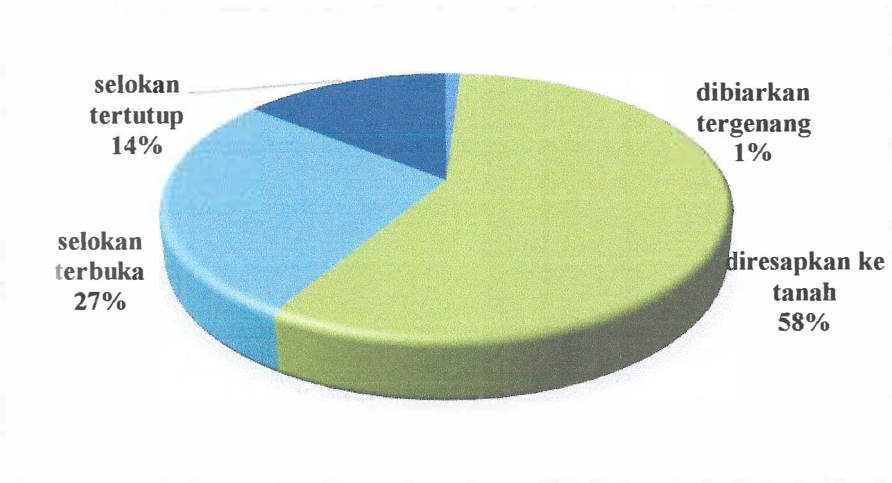


Gambar 2. 22 Terakhir Dilakukan Penyedotan Tangki Septik
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025



Gambar 2. 23 Konstruksi Tangki Septik yang Dimiliki
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025

Sedangkan pembuangan grey water-nya, 58% membuang limbah grey water-nya diresapkan ke tanah dan 27% dialirkan ke selokan terbuka.

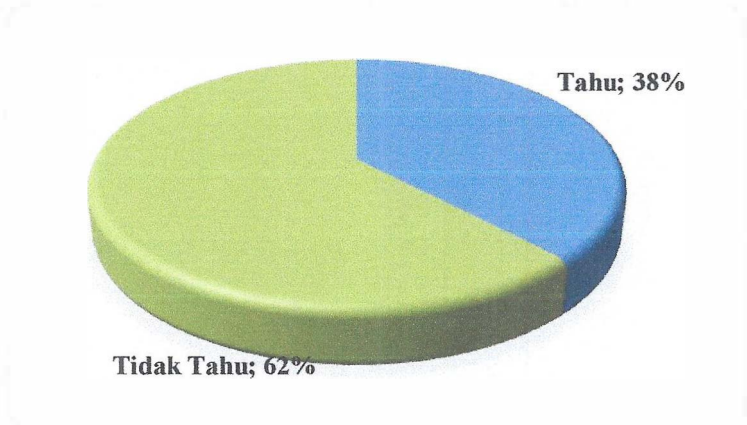


Gambar 2. 24 Pembuangan Greywater
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025

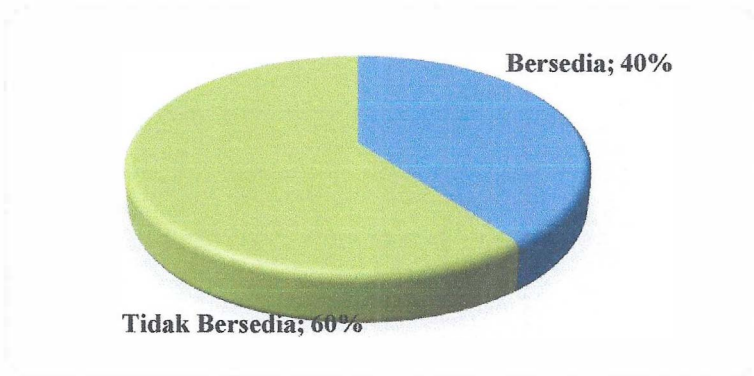
E. Kemauan dan Kemampuan

Dari hasil kuisisioner, tingkat pengetahuan masyarakat terkait sanitasi masih rendah. Sebanyak 62% masyarakat masih belum mengetahui bahwa air limbah domestik yang langsung dibuang tanpa diolah juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Tingkat antusias masyarakat terhadap perbaikan sanitasi juga masih rendah, sebanyak 63% masyarakat menyatakan tidak bersedia apabila di lingkungannya dibangun SPALD-T. Kegiatan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan juga masih perlu ditingkatkan lagi. Kondisi ini menyebabkan partisipasi atau peran

serta masyarakat untuk mengelola air limbah masih kurang. Untuk itu, diperlukan sebuah observasi tentang sejauh mana pengetahuan serta peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah maupun sanitasi di lingkungan rumah yang dalam hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan survei kebutuhan nyata aspek sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar.



Gambar 2. 25 Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Pentingnya Pengelolaan Air Limbah
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025



Gambar 2. 26 Tingkat Kesiadian Masyarakat untuk Melakukan Penyedotan Tangki Septik
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025



Gambar 2. 27 Tingkat Kesiadian Masyarakat terhadap Pembangunan IPAL Komunal
Sumber : Hasil Survey Kuesioner, 2025

2.11 DATA SUMBER AIR BERSIH

Akses air bersih baik jaringan perpipaan maupun bukan perpipaan yang tertera pada data RISPAM Kabupaten Blitar tahun 2024-2043, cakupan air bersih Kabupaten Blitar mencapai 78,37% dengan rincian pada Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2. 23 Sumber Air Bersih

Kecamatan	Total Pelayanan		
	Jiwa	%	Cakupan Air Minum
BAKUNG	1.008	3,55%	36,17%
WONOTIRTO	15.124	38,20%	53,20%
PANGGUNGREJO	29.148	66,71%	77,70%
WATES	33.356	100,00%	114,72%
BINANGUN	19.432	41,45%	53,87%
SUTOJAYAN	94.924	100,00%	100,00%
KADEMANGAN	36.876	51,86%	68,60%
KANIGORO	88.348	100,00%	100,00%
TALUN	119.252	100,00%	100,00%
SELOPURO	46.740	100,00%	100,00%
KESAMBEN	17.516	32,44%	56,47%
SELOREJO	-	0,00%	17,94%
DOKO	-	0,00%	24,62%
WLINGI	29.916	54,71%	82,08%
GANDUSARI	31.520	42,29%	65,61%
GARUM	77.672	100,00%	100,00%
NGLEGOK	82.436	100,00%	100,00%
SANANKULON	61.824	100,00%	100,00%
PONGGOK	56.092	51,00%	51,00%
SRENGAT	71.024	100,00%	100,00%
WONODADI	50.412	100,00%	100,00%
UDANAWU	49.628	100,00%	100,00%
KAB BLITAR	1.012.248	70,31%	78,37%

Sumber : RISPAM Kabupaten Blitar 2024

2.12 DATA KONDISI SPALD SAAT INI

2.12.1 Data Teknis

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari :

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Pemilihan jenis SPALD paling sedikit mempertimbangkan :

- a. Kepadatan penduduk
- b. Kedalaman muka air tanah

- c. Kemiringan tanah
- d. Permeabilitas tanah
- e. Kemampuan pembiayaan

Pada tahun 2024 semua desa di Kabupaten Blitar sudah dinyatakan desa SBS. Bila ditinjau dari jumlah KK akses jamban sehat pada tahun 2024 jumlah tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Kanigoro yakni sebesar 28.969 KK. Capaian penduduk dengan akses jamban sehat pada tahun 2024 adalah 89,2% dengan rincian per kecamatan dan per desa masing-masing pada sebagai berikut :

Tabel 2. 24 Jumlah KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman (Jamban Sehat) Tahun 2024

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna				KK SBS		KK dengan Akses Tehadap Fasilitas Sanitasi yang Layak		Presentase KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman
			Akses Sanitasi Aman	Akses Sanitasi Layak Sendiri	Akses Belum Layak	Akses Belum Layak	Jumlah	%	Jumlah	%	
Wonodadi	Wonodadi	17637	240	16808	305	284	17637	100,0	17353	98,4	1,4
Udanawu	Udanawu	15582	118	13473	321	1670	15582	100,0	13912	89,3	0,8
Srengat	Srengat	25203	297	23017	125	1764	25203	100,0	23439	93,0	1,2
Kademangan	Kademangan	26970	115	21406	1432	4017	26970	100,0	22953	85,1	0,4
Bakung	Bakung	11199	50	7341	910	2898	11199	100,0	8301	74,1	0,4
Ponggok	Ponggok, Bacem	39414	328	32929	2690	3467	39414	100,0	35947	91,4	1,7
Sanankulon	Sanankulon	20747	257	16129	138	4223	20747	100,0	16524	79,6	1,2
Wonotirto	Wonotirto	15573	65	10849	1802	2857	15573	100,0	12716	81,7	0,4
Nglegok	Nglegok	27321	419	20454	1025	5423	27321	100,0	21898	80,2	1,5
Kanigoro	Kanigoro	28969	951	24571	1393	2054	28969	100,0	26915	92,9	3,3
Garum	Garum	24955	524	23388	583	460	24955	100,0	24495	98,2	2,1
Sutojayan	Sutojayan	19609	121	17420	65	2003	19609	100,0	17606	89,8	0,6
Panggungrejo	Panggungrejo	17278	180	14270	392	2436	17278	100,0	14842	85,9	1,0
Talun	Talun	24302	40	18620	1886	3756	24302	100,0	17815	73,3	0,2

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna				KK SBS		KK dengan Akses Tehadap Fasilitas Sanitasi yang Layak		Presentase KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman
			Akses Sanitasi Aman	Akses Sanitasi Layak Sendiri	Akses Belum Layak	Akses Belum Layak	Jumlah	%	Jumlah	%	
Gandusari	Gandusari, Slumbung	27587	1147	20969	2799	2672	27587	100,0	24915	88,55	7,9
Binangun	Binangun	17792	0	14137	2441	1214	17792	100,0	16578	93,2	0,0
Wlingi	Wlingi	20412	1569	17628	450	765	20412	100,0	19647	96,3	7,7
Doko	Doko	15871	714	10078	422	4657	15871	100,0	11214	70,7	4,5
Kesamben	Kesamben	20030	631	18393	54	952	20030	100,0	19078	95,2	3,2
Wates	Wates	11774	132	10166	116	1360	11774	100,0	10414	88,4	1,1
Selorejo	Boro	14907	206	13876	249	576	14907	100,0	14331	96,1	1,4
Selopuro	Selopuro	16516	815	15269	265	167	16516	100,0	16349	99,0	4,9
Jumlah (Kab/Kota)		459648	8919	381191	19863	49675	459648	100,0	409973	89,2	1,94

Sumber : Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

2.12.1.1 SPALD-Setempat

Sistem pengelolaan air limbah sistem setempat terdiri dari sistem pembuangan, sistem penampungan dan pengumpulan/pengolahan awal, sistem pengangkutan dan sistem pengolahan akhir. Sub-Sistem pengolahan setempat di Kabupaten Blitar terdiri dari pengolahan secara individu maupun secara komunal.

1. Individu

Berdasarkan data RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045, persentase akses sanitasi layak di Kabupaten Blitar mencapai 82,10% dan sudah ODF (Open Defecation Free) atau 0% BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Berdasarkan hasil survey kuesioner kepada 100 warga Kabupaten Blitar, air limbah domestik buangan dari kamar mandi, dapur, dan tempat cuci langsung dibuang ke saluran drainase tertutup. Konstruksi bangunan pengolahan setempat *black water* (tinja) atau WC untuk skala individu yang ada di Kabupaten Blitar berupa beton atau pasangan batu bata. Sebagian besar tangki septik yang dimiliki masyarakat dibangun lebih dari 5 tahun, namun hanya sedikit warga yang pernah mengurus tangki septik tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tangki septik yang dibangun tidak kedap/tidak sesuai standar SNI dimana dalam jangka waktu 2-3 tahun dilakukan pengurasan. Untuk saat ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan terkait akses sanitasi 2024, sebanyak 381.191 KK telah terlayani akses layak dan terdapat 49.675 KK belum layak.

2. Komunal

Kabupaten Blitar memiliki 154 unit tangki septik komunal 5-10 KK yang tersebar di seluruh kecamatan. Hingga saat ini kondisi unit tangki septik tersebut masih baik, dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun ada kendala beberapa kali terjadi meluap di *watercloset* (WC) akibat salurannya tersumbat. Kondisi bangunan MCK sebagian besar masih cukup baik, namun jumlah pemanfaatnya semakin menurun dikarenakan masyarakat disekitar MCK yang dulunya tidak punya kamar mandi maupun jamban kini sudah memiliki sendiri.

A. Data Sub Sistem Pelayanan

Sub Sistem Pelayanan di Kabupaten Blitar berupa pengolahan secara individu (tangki septik individu) dan pengolahan secara komunal (berupa MCK dan tangki septik komunal). Data sarana prasarana SPALD-S di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2. 25 Sarana dan Prasarana SPALD-S di Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
1	2024	Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Desa Sumberingin Kec Sanan Kulon	SPALDS/Tangki septik individual	Sanankulon		80	23	23
2	2024	Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Desa Tambakan Kec Gandusari	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari		75	23	23
3	2024	Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kelurahan Kesamben Kec. Kesamben	SPALDS/Tangki septik individual	Kesamben		87	23	23
4	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50KK Desa Bacem Kecamatan Pongkok	SPALDS/Tangki septik individual	Pongkok	KSM Mugi Lancar	180	50	50
5	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Bakung Kecamatan Udanawu	SPALDS/Tangki septik individual	Udanawu	KSM Bakung Sejahtera	180	50	50
6	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	SPALDS/Tangki septik individual	Selorejo	KSM Berkah Makmur	180	50	50

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		minimal 50 KK Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo						
7	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Besuki Kecamatan Udanawu	SPALDS/Tangki septik individual	Udanawu	KSM Sehat Bersama	180	50	50
8	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi	SPALDS/Tangki septik individual	Wonodadi	KSM Jamban Sehat Sejahtera	180	50	50
9	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Gembongan Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM Guyup Rukun	180	50	50
10	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo	SPALDS/Tangki septik individual	Panggungrejo	KSM Sumber Mulyo	180	50	50

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
11	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM Karangbendo bersih	180	50	50
12	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kedawung Kecamatan Ngelegok	SPALDS/Tangki septik individual	Ngelegok	KSM Kedawung Sehat	180	50	50
13	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Krisik Kecamatan Gandusari	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	KSM Sido Mulyo	180	50	50
14	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi	SPALDS/Tangki septik individual	Wlingi	KSM Renggo Joyo	180	50	50
15	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	KSM Sejahtera	180	50	50

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Ngaringan Kecamatan Gandusari						
16	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto	SPALDS/Tangki septik individual	Wonotirto	KSM Sido Lego	180	50	50
17	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	KSM Sawentar manunggal	180	50	50
18	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Selopuro Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	KSM Gading Permai	180	50	50
19	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa SIDorejo Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM Tirta Wangi	216	60	60
20	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	KSM Berkarya Sejahtera	180	50	50

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)

Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		minimal 50 KK Desa Slorok Kecamatan Garum						
21	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tapakrejo Kecamatan Wlingi	SPALDS/Tangki septik individual	Wlingi	KSM Ngudi Sehat	180	50	50
22	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi	SPALDS/Tangki septik individual	Wlingi	KSM Anglur Asri	180	50	50
23	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tingal Kecamatan Garum	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	KSM Cahaya Mandiri	180	50	50
24	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan	SPALDS/Tangki septik individual	Sutojayan	KSM Karya Bakti	180	50	50
25	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	SPALDS/Tangki septik individual	Panggungrejo		80	20	20

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo						
26	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Sumberarum Kecamatan Wates	SPALDS/Tangki septik individual	Wates		48	12	12
27	2024	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto	SPALDS/Tangki septik individual	Wonotirto	TTMD	60	15	15
28	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Gadungan Kecamatan Gandusari	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	PEDULI SEHAT	200	50	50
29	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo	SPALDS/Tangki septik individual	Selorejo	JOYO MULYO	200	50	50
30	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK)	SPALDS/Tangki septik individual	Selorejo	SIDO RESIK	224	56	56

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo						
31	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Ngrendeng Kecamatan Selorejo	SPALDS/Tangki septik individual	Selorejo	MAKMUR SENTOSA	200	50	50
32	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Bumiayu Kecamatan Panggunrejo	SPALDS/Tangki septik individual	Panggunrejo	AYU SEJAHTERA	200	50	50
33	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok	SPALDS/Tangki septik individual	Pongkok	KARANGBENDO BERSIH	200	50	50
34	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Pojok Kecamatan Pongkok	SPALDS/Tangki septik individual	Pongkok	POJOK SEMANGAT	200	50	50

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
35	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan	SPALDS/Tangki septik individual	Kademangan	SUMBER MAKMUR	200	50	50
36	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Kalimanis Kecamatan Doko	SPALDS/Tangki septik individual	Doko	KALIMANIS	200	50	50
37	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Suru Kecamatan Doko	SPALDS/Tangki septik individual	Doko	GUYUB RUKUN	200	50	50
38	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Tugurejo Kecamatan Wates	SPALDS/Tangki septik individual	Wates	MAJU JAYA	340	85	85
39	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK)	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	BERKARYA SEJAHTERA	200	50	50

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Desa Slorok Kecamatan Garum						
40	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Banggle Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	MAJU JAYA	200	50	50
41	2023	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAU) Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo	SPALDS/Tangki septik individual	Panggungrejo	PANGGUNG MULYO	188	47	47
42	2024	Pembangunan Jamban Desa Sawentar Dan Banggle Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	CV. KEMBANG SEREH	32	8	8
43	2024	Pembangunan Jamban Desa Sawentar Dan Banggle Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	CV. KEMBANG SEREH	16	4	4
44	2024	Pembangunan Jamban Desa Ngoran Kecamatan Nglegok	SPALDS/Tangki septik individual	Nglegok	CV. SHAKA	40	10	10
45	2024	Pembangunan Jamban Desa Candirejo Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	CV. MULTI USAHA	48	12	12

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
46	2024	Pembangunan Jamban Desa Mandesan Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	ABBELLA SEJAHTERA ABADI	48	12	12
47	2024	Pembangunan Jamban Desa Selopuro Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	CV. SASTRA ESTETIKA	48	12	12
48	2024	Pembangunan Jamban Desa Selokajang Dan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat	SPALDS/Tangki septik individual	Srengat	CV. ERLANGGA KONSTRUKSI	16	4	4
49	2024	Pembangunan Jamban Desa Selokajang Dan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat	SPALDS/Tangki septik individual	Srengat	CV. ERLANGGA KONSTRUKSI	24	6	6
50	2024	Pembangunan Jamban Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	CV. JAWA DWIPA	48	12	12
51	2024	Pembangunan Jamban Desa Bakung Dan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu	SPALDS/Tangki septik individual	Udanawu	CV. SUMBERINGIN PRIMA	24	6	6
52	2024	Pembangunan Jamban Desa Bakung Dan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu	SPALDS/Tangki septik individual	Udanawu	CV. SUMBERINGIN PRIMA	16	4	4

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
53	2024	Pembangunan Jamban Kelurahan Beru Dan Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi	SPALDS/Tangki septik individual	Wlingi	CV. ARUNIKA JAYA KUSUMA	24	6	6
54	2024	Pembangunan Jamban Kelurahan Beru Dan Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi	SPALDS/Tangki septik individual	Wlingi	CV. ARUNIKA JAYA KUSUMA	24	6	6
55	2024	Pembangunan Jamban Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi	SPALDS/Tangki septik individual	Wlingi	CV. KARYA SUBUR	40	10	10
56	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Popoh Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	CV. Alfata	44	11	11
57	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Ploso Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	CV. Alfata	4	1	1
58	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	CV. Adhi Rekso Jaya	16	4	4

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Domestik (SPALD) Setempat Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro						
59	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	CV. Adhi Rekso Jaya	32	8	8
60	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	CV. Shaka	36	9	9
61	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	CV. Khalifa	36	9	9
62	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Salam Kecamatan Wonodadi	SPALDS/Tangki septik individual	Wonodadi	CV. Karya Pratama	52	13	13

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
63	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo	SPALDS/Tangki septik individual	Panggungrejo	CV. Surya Gemilang	52	13	13
64	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	CV. Sastra Estetika	52	13	13
65	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Slorok Kecamatan Garum	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	CV. Cahya Asia Gina	52	13	13
66	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Krisik Kecamatan Gandusari	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	CV. Adhi Rekza Jaya	28	7	7
67	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	CV. Adhi Rekza Jaya	16	4	4

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Domestik (SPALD) Setempat Desa Gondang Kecamatan Gandusari						
68	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Jiwut Kecamatan Nglegok	SPALDS/Tangki septik individual	Nglegok	CV. Queen Insan Mulya	16	4	4
69	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Kedawung Kecamatan Nglegok	SPALDS/Tangki septik individual	Nglegok	CV. Queen Insan Mulya	32	8	8
70	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	CV. Eno Multi Structure	52	13	13
71	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	CV. Eno Multi Structure	52	13	13

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
72	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kelurahan Talun Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	CV. Queen Insan Mulya	28	7	7
73	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Jeblog Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	CV. Queen Insan Mulya	24	6	6
74	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Gadungan Kecamatan Gandusari	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	CV. Punta Dewa Konstruktion	52	13	13
75	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	CV. Ragil Mandiri	52	13	13
76	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPALDS/Tangki septik individual	Kesamben	CV. Surya Gemilang	40	10	10

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Setempat Desa Bumirejo Kecamatan Kesamben						
77	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben	SPALDS/Tangki septik individual	Kesamben	CV. Surya Gemilang	12	3	3
78	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan	SPALDS/Tangki septik individual	Sutojayan	CV. Queen Insan Mulya	20	5	5
79	2023	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan	SPALDS/Tangki septik individual	Sutojayan	CV. Queen Insan Mulya	20	5	5
80	2023	Program Pemabangunan Sanimas SPALDS TA 2023 Desa Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon	SPALDS/Tangki septik individual	Sanankulon	Sumberjo Sehat	99	35	22

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
81	2023	Program Pemabangunan Sanimas SPALDS TA 2023 Desa Sumber Kecamatan Sanan Kulon	SPALDS/Tangki septik individual	Sanankulon	Sumber Legowo	103	35	22
82	2023	Program Pemabangunan Sanimas SPALDS TA 2023 Desa Tingal Kecamatan Garum	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	Tingal Bersinar	89	37	22
83	2023	Program Pemabangunan Sanimas SPALDS TA 2023 Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	Sehat Lestari	89	37	22
84	2023	Program Pemabangunan Sanimas SPALDS TA 2023 Desa Popoh Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	SIDO MAKMUR	83	35	22
85	2023	Program Pemabangunan Sanimas SPALDS TA 2023 Desa Tulungrejo Kecamatan Wates	SPALDS/Tangki septik individual	Wates	RUKUN SEJAHTERA	90	35	22
86	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	oleh masing masing pemanfaat		62	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
87	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		6	
88	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		14	
89	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		8	
90	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		8	
91	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		13	
92	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		9	
93	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		9	
94	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		11	
95	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		11	
96	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Bakung	oleh masing- masing pemanfaat		13	
97	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Binangun	oleh masing- masing pemanfaat		12	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
98	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Kanigoro	oleh masing-masing pemanfaat		10	
99	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Kanigoro	oleh masing-masing pemanfaat		23	
100	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Talun	oleh masing-masing pemanfaat		11	
101	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Talun	oleh masing-masing pemanfaat		11	
102	2022	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP SEHAT LESTARI		89	
103	2022	Pembangunan tangki septik komunal (5-10KK) (DAK) Desa Semen Kecamatan Gandusari	SPALDS/Tangki septik komunal	Gandusari	KSM SEHAT LESTARI	289	89	73
104	2022	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK) Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi	SPALDS/Tangki septik individual	Wlingi	KSM SIDO RUKUN	166	56	
105	2022	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK (DAK)	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM KARANGBENDO BERSERI	206	62	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Desa Karangbendo Kecamatan Pongok						
106	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Bagelenan Kecamatan Srengat	SPALDS/Tangki septik individual	Srengat	KSM Bagelenan Sejahtera	36	13	
107	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan Desa Gledug Kecamatan Sanankulon (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Sanankulon	KSM Maju Lancar	40	12	
108	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	KSM Tawangbrak	33	9	
109	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok	SPALDS/Tangki septik individual	Nglegok	KSM Rukun Sejahtera	41	16	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
110	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Ngrejo Kecamatan Bakung	SPALDS/Tangki septik individual	Bakung	KSM Maju Bersinar	34	13	
111	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Kademangan	KSM Puntodewa	92	30	
112	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	KSM Bersinar	160	59	
113	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon	SPALDS/Tangki septik individual	Sanankulon	KSM Dadi Mulyo	34	11	
114	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM Pojok Semangat	44	12	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Desa Pojok Kecamatan Ponggok						
115	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Ponggok Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM Rukun Sentosa	32	13	
116	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Ploso Kecamatan Selopuro	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	KSM Mulyo Lestari	32	11	
117	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Bacem Kecamatan Ponggok	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM Mugi Lancar	34	10	
118	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Sragi Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	KSM Manfaat	26	11	

**Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar**

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
119	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Wonorejo Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	KSM Wono Rame	25	11	
120	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Pasirharjo Kecamatan Talun	SPALDS/Tangki septik individual	Talun	KSM Pasir Maju	26	10	
121	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Sidodadi Kecamatan Garum	SPALDS/Tangki septik individual	Garum	KSM Sido Bangun	41	12	
122	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Doko Kecamatan Doko	SPALDS/Tangki septik individual	Doko	KSM Sigro Tumindak	21	11	
123	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Selopuro	KSM Selopuro Makmur	33	11	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
		Desa Selopuro Kecamatan Selopuro						
124	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat	SPALDS/Tangki septik individual	Srengat	KSM Margo Utomo	35	10	
125	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun	SPALDS/Tangki septik individual	Binangun	KSM Semar Mesem	41	12	
126	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Wonodadi	KSM Maju Sejahtera	47	10	
127	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan Desa Langon Kecamatan Ponggok (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM Puspa Asri	31	11	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
128	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	KSM Mitra Karya	38	10	
129	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Papungan Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	KSM Mudjair Papungan	29	11	
130	2022	Pembangunan jamban dan tangki septik skala individual perdesaan (DAU) Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro	SPALDS/Tangki septik individual	Kanigoro	KSM Berkah Abadi	70	23	
131	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP Sehat Lestari		11	
132	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP Sehat Lestari		7	
133	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP Sehat Lestari		10	
134	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP Sehat Lestari		7	

**Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar**

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
135	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Gandusari	KPP Sehat Lestari		8	
136	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		8	
137	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		5	
138	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		6	
139	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		5	
140	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		5	
141	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		4	
142	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		6	

**Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar**

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
143	2021	SANIMAS Pembangunan IPAL	SPALDS	Ponggok	KPP KARANGBENDO SEHAT		5	
144	2021	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Ponggok	KSM KARANGBENDO SEHAT	156	39	
145	2021	Pembangunan Tangki Septik Komunal Desa Semen Kecamatan Gandusari (DAU)	SPALDS/Tangki septik individual	Gandusari	KSM SEHAT LESTARI	225	44	44
146	2020	Pembangunan MCK Plus PP Nurul Ulum Desa Kedungbunder Kecamatan Sutojayan	MCK Plus	Sutojayan	Nurul Ulum	400		
147	2020	Pembangunan MCK Plus PP Al Kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi	MCK Plus	Wonodadi	Al Kamal	400		
148	2019	Pembangunan MCK Plus PP Nurul Iman Kelurahan Garum Kecamatan Garum	MCK Plus	Garum	Nurul Iman	334		

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Pemanfaat Jiwa	Pemanfaat KK	SR Terpasang
149	2016	Pembangunan MCK Plus PP APIS Desa Gondang Kecamatan Gandusari	MCK Plus	Gandusari	PP Apis	400	100	
150	2016	Pembangunan MCK Plus PP Roudlotul Muta'allimin Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro	MCK Plus	Kanigoro	Roudlotul Muta'allimin	326		
151	2009	Pembangunan MCK + PP APIS Desa Gondang Kecamatan Gandusari	MCK +	Gandusari	Apis	350		
152	2008	Pembangunan MCK + PP Nasyrul Ulum Putri Desa Modangan Kecamatan Nglegok	MCK +	Nglegok	Nasyrul Ulum	150		
153	2008	Pembangunan MCK + PP Karang Aji Desa Krejen Kecamatan Srengat	MCK +	Srengat	Karang Aji	150		
154	2008	Pembangunan MCK + PP Mambaul Hikam Desa Slemanan Kecamatan Udanawu	MCK +	Udanawu	Mambaul Hikam	200		

(Sumber : Analisis Komsultan, 2025)

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

B. Data Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (Sub-Sistem Pengangkutan)

Sub-sistem pengangkutan air limbah domestik di Kabupaten Blitar dengan sistem setempat dengan menggunakan truk penyedot tinja dari pihak swasta dengan sistem pelayanan “by call”, Sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar belum memiliki armada sedot tinja. Ada 7 penyedia jasa sedot tinja swasta di Kabupaten Blitar 3 diantaranya memiliki surat kesepakatan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Daftar nama dari 7 penyedia jasa sedot tinja swasta di Kabupaten Blitar terdapat pada Tabel.

Tabel 2. 26 Daftar Nama Perusahaan Sedot Tinja Swasta di Kabupaten Blitar

No	Nama Perusahaan / Nama Pemilik	Area yang Dilayani
1	Sumber Baru / Handoko	Seluruh area Kota Blitar dan Kabupaten Blitar
2	Mahakarya	Seluruh area Kota Blitar dan Kabupaten Blitar
3	Arif Putra	Seluruh area Kota Blitar dan Kabupaten Blitar
4	Maju Jaya / Suga	Seluruh area Kota Blitar dan Kabupaten Blitar
5	Central Jasa / Nur Aini	Seluruh area Kota Blitar dan Kabupaten Blitar
6	Jaelani	Seluruh area Kota Blitar dan Kabupaten Blitar
7	Sumber Rejeki / Haranto	Seluruh area Kota Blitar dan Kabupaten Blitar

Hasil wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Tidak setiap hari ada penyedotan, dalam 1 bulan penyedia melakukan 25-30 kali penyedotan;
- Paling banyak pelanggan di daerah Kabupaten Blitar;
- Karena Kabupaten Blitar belum memiliki IPLT, maka lumpur tinja yang disedot kemudian dibawa ke IPLT Kota Blitar namun terkadang di keringkan di lahan kosong dan kemudian dibuat pupuk;





Gambar 2. 28 Salah Satu Armada Sedot Tinja Swasta di Kabupaten Blitar
(Sumber : Hasil Survey, 2025)

C. Data Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja)

Selain IPAL Komunal, sebagai komponen pengolahan terpusat terdapat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil (truk tinja). Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik, belum layak dibuang di media lingkungan. Lumpur tinja yang terakumulasi di cubluk dan tangki septik yang secara reguler dikuras atau dikosongkan kemudian diangkut ke IPLT dengan menggunakan truk tinja. IPLT merupakan salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan. Kabupaten Blitar belum mempunyai IPLT. Kabupaten Blitar telah bekerjasama dengan Kota Blitar dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik memanfaatkan IPLT Kota Blitar yang telah dilakukan sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor: B/600.02/22.1/409.12.1/2024 dan 600/06/410.103.3/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Kabupaten Blitar telah berencana untuk membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Berdasarkan hasil studi kelayakan tahun 2024, telah disepakati akan membangun IPLT di Kelurahan Jingglong Kecamatan Sutojayan dengan kapasitas 10 m³/hari dan akan meningkat sesuai kebutuhan. Tidak hanya pada satu lokasi saja, kedepannya Kabupaten Blitar juga berencana untuk membangun IPLT di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Talun.

2.12.1.2 SPALD-Terpusat

SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Komponen SPALD-T adalah sebagai berikut :

- a. Sub-sistem Pelayanan
- b. Sub-sitem Pengumpulan
- c. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
2. Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
3. Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat terdiri dari sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kabupaten Blitar dengan menggunakan IPAL Komunal / IPAL Skala Permukiman. Air limbah domestik dari sumbernya dialirkan melalui perpipaan. Dalam pengaliran air limbah domestik tersebut biasanya menggunakan sistem gravitasi dan kemudian diolah di bangunan IPAL.

Kabupaten Blitar memiliki 144 IPAL komunal dan sebagian MCK+ yang tersebar di beberapa desa/kelurahan. Berdasarkan hasil survey semua berfungsi dengan baik. Beberapa IPAL komunal dan MCK+ dikelola oleh KSM berdasarkan SK kepala dinas. Kondisi eksisting bangunan SPALD-T berdasarkan survey yang telah dilakukan diperoleh permasalahan yang sebagian besar dialami yakni terjadi penyumbatan pada manhole akibat dari masuknya sampah. Ada beberapa KSM yang melakukan penarikan iuran sebesar Rp.3000 – Rp.5000 per KK, namun sebagian bersar tidak melakukan penarikan iuran. Hampir seluruh KSM mengharapkan bantuan penyedotan lumpur tinja pada pemerintah. Kondisi eksisting SPALD-T di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2. 13 dan Tabel 2.14 berikut.



Gambar 2. 29 Kondisi Salah Satu IPAL di Kabupaten Blitar
(sumber : Dokumentasi Survey, 2025)

Tabel 2. 27 Jumlah Sebaran SPALD-T Kabupaten Blitar

Kecamatan	2006	2007	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Bakung																		
Wonotirto																		
Panggungrejo																		
Wates																		
Binangun																		
Sutojayan													1					1
Kademangan																		
Kanigoro					2	6	3		4	1		1	1	1				19
Talun				1														1
Selopuro											1		6	3	1		1	12
Kesamben			1						1	1	2	3	1		1			10
Selorejo																		
Doko												1	1					2
Wlingi	1	1			4	5	10	4	2	4	1	5	4	3	2	2	1	49
Gandusari									2	2	2	2	3	1		4	1	17
Garum									2	3		2			1	1		9
Nglegok				1		1									1	1	1	5

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Kecamatan	2006	2007	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Sanankulon													1					1
Pongok																	1	1
Srengat			1	1					2							1	1	6
Wonodadi							1	1				3	2				1	8
Udanawu								1	1								1	3
Kabupaten Blitar	1	1	2	3	6	12	14	6	14	11	6	17	20	8	6	9	8	144

Sumber : Analisis Konsultan, 2025

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Tabel 2. 28 Kondisi Eksisting SPALD-T di Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfung sian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
1	2024	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8° 6'16.250" LS dan 112° 20'19.884" BT	KSM Ngudi Makmur	168	54	56	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
2	2023	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°1'31.862" LS dan 112°23'2.15 6" BT	NGEMB UL ASRI	228	57	57	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
3	2023	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°2'41.434" LS dan 112°20'34.6 38" BT	NJULEG ASRI	212	53	53	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
4	2023	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°2'4.066" LS dan 112°18'56.5 02" BT	NGARIN GAN BERSERI	208	52	50	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
5	2023	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°0'52.094" LS dan 112°19'57.7 20" BT	DEWA SOSO	200	50	54	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
6	2023	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°1'43.983" LS dan 112°16'58.3 46" BT	RUKUN BERSAM A	220	55	52	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
7	2022	SPALDT/ IPAL Komunal	Kesamben	8°7'0.585" LS dan 112°22'42.9 82" BT	KSM PERSAD A	175	50	50	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
8	2022	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'51.495" LS dan 112°19'53.1 52" BT	KSM BRANJA NGAN	137	54	52	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
9	2022	SPALDT/ IPAL Komunal	Selopuro	8°7'41.717" LS dan 112°19'11.3 70" BT	KSM MAJU LESTARI	187	57	50	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
10	2022	SPALDT/ IPAL Komunal	Nglegok	8°3'11.316" LS dan 112°10'56.5 28" BT	KSM SIDO RUKUN	182	53	54	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
11	2022	SPALDT/ IPAL Komunal	Garum	8°2'27.294" LS dan 112°14'19.4 76" BT	KSM SIDO MAJU	175	30	55	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
12	2022	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°6'25.615" LS dan 112°18'45.8 04" BT	KSM Sido Mulyo	117	66	32	DAU	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
13	2021	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°8'5.057" LS dan 112°14'9.88 4" BT	KSM TEGUH RAHAYU	234	49	49	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
14	2021	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°3'59.441" LS dan 112°20'27.2 16" BT	KSM NGUDI LANCAR	167	53	47	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
15	2021	IPAL Komunal	Selopuro	8°6'55.059" LS dan 112°19'20.7 25" BT	Wargo Rukun		52		Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Sistem	Kecamatan	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaan	Keberfungsian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
16	2021	IPAL Komunal	Gandusari	8°5'50.430" LS dan 112°19'55.4 60" BT	Klemunan Asri		54		DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
17	2020	SPALDT/ IPAL	Gandusari	8°2'48.976" LS dan 112°19'27.4 59" BT	Seman	256	64	64	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
18	2020	SPALDT/ IPAL	Kesamben	8°6'0.912" LS dan 112°23'45.5 13" BT	Bina Usaha	400	100	54	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
19	2020	SPALDT/ IPAL	Sanankulon	8°8'53.397" LS dan 112°21'49.4 25" BT	PP Mambaus Sholihin	615	60	60	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
20	2020	SPALDT/ IPAL	Selopuro	8°6'52.783" LS dan 112°19'15.6 24" BT	Guyub Rukun	312	78	78	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
21	2020	SPALDT/ IPAL	Wlingi	8°4'1.679"L S dan 112°19'12.6 79" BT	Harapan	256	64	64	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
22	2020	SPALDT/ IPAL	Wlingi	8°1'19.713" LS dan 112°22'49.4 13" BT	Balerejo Bersinar	212	53	53	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
23	2020	IPAL Komunal	Wlingi	8°3'47.662" LS dan 112°20'5.24 8" BT	Lestari	372	93		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
24	2020	IPAL Komunal + MCK+	Selopuro	8°7'53.441" LS dan 112°18'27.8 40" BT	PP Assalam	415			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
25	2020	IPAL Komunal + MCK+	Selopuro	8°7'53.441" LS dan 112°18'27.8 40" BT	PP Assalam	415			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
26	2020	IPAL Komunal + MCK+	Selopuro	8°7'53.441" LS dan 112°18'27.8 40" BT	PP Assalam	415			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
27	2020	IPAL	Gandusari	8°0'26.741" LS dan 112°21'8.71 7" BT	Sehat Lestari		57		DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
28	2020	IPAL Komunal + MCK+	Wonodadi	8°5'4.272" LS dan 112°1'17.97 6" BT	PP Al Kamal	400			DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
29	2020	IPAL Komunal + MCK+	Sutojayan	8°10'4.025" LS dan 112°12'26.2 80" BT	PP Nurul Salam	600			DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
30	2020	IPAL Komunal	Gandusari	8°2'42.752" LS dan 112°18'14.1 80" BT	Berseri		66		DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
31	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Doko	8°4'46.058" LS dan 112°20'30.0 08" BT	Plumbang an Bersinar	208	52	52	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
32	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°2'36.034" LS dan 112°18'22.6 61" BT	Rukun Makmur	260	65	65	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
33	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°2'59.682" LS dan 112°19'24.3 03" BT	Boas Berseri	264	66	66	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
34	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Garum	8°2'35.748" LS dan 112°13'59.4 15" BT	Guyub Rukun	400	100		DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
35	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°8'17.290" LS dan 112°14'10.5 36" BT	Anugrah	204	51	51	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
36	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°5'10.283" LS dan 112°20'20.2 62" BT	Berkah Lestari	208	52	52	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
37	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°6'36.936" LS dan 112°18'47.1 54" BT	Sido Mukti	272	68	65	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
38	2019	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°5'56.547" LS dan 112°20'8.45 8" BT	Klemunan Sehat	224	56	50	DAU	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
39	2019	IPAL Komunal	Kesamben		Kesamben bersih	112	28		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
40	2019	IPAL Komunal	Kesamben	8°8'35.396" LS dan 112°19'58.5 25" BT	Mitra Karya	228	57		APBD	Berfungsi	Belun pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
41	2019	IPAL Komunal + MCK+	Wonodadi	8°2'4.156"L S dan 111°59'45.1 87" BT	PP Putri Darul Huda	248			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
42	2019	IPAL Komunal + MCK+	Wonodadi	8°3'3.087" LS dan 111°59'47.0 53" BT	PP Putra Darul Huda			300	APBD	Berfungsi	Belun pernah	ABR	Tidak Ada	
43	2019	IPAL Komunal + MCK+	Garum	8°4'22.207" LS dan 112°13'7.83 0" BT	PP Nurul Iman	334			DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
44	2018	SPALDT/ IPAL	Gandusari	8°2'49.586" LS dan 112°18'26.3 58" BT	Rukun Sejahtera	208	52	50	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
45	2018	SPALDT/ IPAL	Kesamben	8°8'28.912" LS dan 112°21'30.4 74" BT	Tuwuhrej o Sehat	288	72	72	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
46	2018	SPALDT/ IPAL	Kesamben	8°8'26.752" LS dan 112°19'59.0 48" BT	Mandiri	216	54	54	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
47	2018	SPALDT/ IPAL	Wlingi	8°4'42.275" LS dan 112°19'57.8 24" BT	Karya Mandiri	200	50	50	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
48	2018	IPAL Komunal	Gandusari	8°0'20.386" LS dan 112°21'9.68 3" BT	Sehat Lestari		55		DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
49	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°2'54.173" LS dan 112°18'45.2 87" BT	Rukun Santoso	252	63	60	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
50	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°0'3.233" LS dan 8°21'19.122 " BT	Sehat Lestari	532	133	83	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Sistem	Kecamatan	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaan	Keberfungsian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
51	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Garum	8°2'32.271" LS dan 112°13'35.3 67" BT	Rukun Jaya	184	46	46	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
52	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°8'30.368" LS dan 112°14'11.5 26" BT	Al Ikhlas	192	48	48	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
53	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Kesamben	8°9'11.739" LS dan 112°21'47.8 23" BT	Kesamben Bersih	112	28	28	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
54	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi		Makmur	344	86	86	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
55	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi			220	55	55	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
56	2017	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°5'15.204" LS dan 112°19'30.3 12" BT	Sejahtera	200	50	50	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
57	2017	IPAL Komunal	Wlingi		Sejahtera	200	50		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
58	2017	IPAL Komunal	Garum		Rukun Santoso	200	50		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
59	2016	SPALDT/ IPAL Komunal	Gandusari	8°0'3.671" LS dan 112°21'18.1 13" BT	Sehat Lestari	200	50	50	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
60	2016	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°7'49.847" LS dan 112°10'36.9 10" BT	Podo Rukun	200	50	50	DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
61	2016	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°8'28.919" LS dan 112°10'14.9 97" BT	PP Roudlotul Muta'alim in	326			DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
62	2016	SPALDT/ IPAL Komunal	Kesamben	8°8'35.476" LS dan 112°21'28.0 56" BT	Kesamben Bersih	216	72		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	MCK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
63	2016	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi		Ronggola we	224	56	56	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
64	2016	SPALDT/ IPAL Komunal dan MCK Plus	Wlingi	8°4'41.317" LS dan 112°19'25.5 15" BT	Gotong Royong	288	72	28	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
65	2016	IPAL Komunal	Garum			220	55		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
66	2016	IPAL Komunal	Garum			336	84		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
67	2016	IPAL Komunal + MCK+	Gandusari		PP Apip	600			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
68	2016	IPAL Komunal + MCK+	Srengat	8°6'10.092" LS dan 112°5'5.914 " BT	PP Putri Darul Rozak			500	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
69	2016	IPAL Komunal + MCK+	Udanawu	8°0'9.828" LS dan 112°2'3.480 " BT	PP Ma/	302			DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurasan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
70	2015	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°5'10.216" LS dan 112°20'17.0 82" BT	Karangan Schat	248	62	47	APBN	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
71	2015	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°5'24.103" LS dan 112°19'26.4 30" BT	Barokah	244	61	61	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
72	2015	IPAL Komunal + MCK+	Wonodadi	8°5'12.166" LS dan 112°1'20.49 4" BT	PP Putri Mahyajatu l Qurro'			500	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
73	2015	IPAL Komunal + MCK+	Udanawu	8°0'12.132" LS dan 112°2'20.47 2" BT	Mamba'ul Hikam	254			DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
74	2015	IPAL Komunal	Wlingi	8°4'19.539" LS dan 112°19'51.9 87" BT	Kemangi		40		DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
75	2015	IPAL Komunal	Wlingi	8°5'24.103" LS dan 112°19'26.4 30" BT	Barokah		61		APBN	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
76	2014	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°8'36.607" LS dan 112°12'56.0 87" BT	Asri Lestari	220	55	52	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
77	2014	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°9'9.173" LS dan 112°12'58.9 39" BT	Brantas Jaya	240	60	57	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
78	2014	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'46.947" LS dan 112°19'38.4 87" BT	Bromo Bersih	280	70	24	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
79	2014	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'52.944" LS dan 112°19'34.5 32" BT	Arjuna Sehat	72	18	0	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Sistem	Kecamatan	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaan	Keberfungsian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
80	2014	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'31.844" LS dan 112°19'55.2 83" BT	Watugede	232	58	41	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
81	2014	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'15.339" LS dan 112°20'6.53 3" BT	Lancar	236	59	40	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
82	2014	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'55.176" LS dan 112°19'40.4 82" BT	Guyub Rukun	340	85	54	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
83	2014	IPAL Komunal + MCK+	Wonodadi	8°5'4.272" LS dan 112°1'17.97 6" BT	PP Al Kamal	254			DAK	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
84	2013	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°7'0.332" LS dan 112°12'17.7 61" BT	Sejuk	228	57	57	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	MCK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
85	2013	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°7'28.348" LS dan 112°11'54.0 64" BT	Gading Mas	136	34	25	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
86	2013	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'53.152" LS dan 112°19'25.5 26" BT	Gotong Royong	288	72	50	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
87	2013	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°5'11.809" LS dan 112°19'31.2 29" BT	Guyub Rukun	220	55	31	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
88	2013	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'14.932" LS dan 112°20'6.51 7" BT	Schat	292	73	33	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
89	2013	IPAL Komunal + MCK+	Nglegok		PP Al Mawadah	500	125		APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
90	2012	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°7'55.942" LS dan 112°13'51.0 38" BT	Sanitasi	252	63	59	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

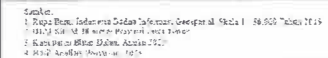
No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	KK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
91	2012	SPALDT/ IPAL Komunal	Kanigoro	8°7'26.400" LS dan 112°11'59.0 71" BT	Sejahtera	312	78	15	Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
92	2012	SPALDT/ IPAL Komunal	Wlingi	8°4'42.024" LS dan 112°19'46.4 46" BT	Cendrawa sih	312	78	28	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
93	2010	IPAL Komunal	Talun		PP Al Falah	334			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
94	2010	IPAL Komunal + MCK+	Srengat	8°6'8.122" LS dan 112°5'8.789 " BT	PP Putra Darul Rozak	500			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
95	2010	IPAL Komunal	Nglegok		PP Nasyrul Ulum	153			APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
96	2009	IPAL Komunal dan MCK	Kesamben	8°8'53.397" LS dan 112°21'49.4 25" BT	Propiller Mas	212	53	53	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembanguna n	Sistem	Kecamat an	Koordinat	Nama KSM	Jiwa	MCK	SR	Sumber Pendanaa n	Keberfungs ian	Pengurusan Lumpur	Sistem yang digunakan	Pengecekan effluen	Dokumentasi
97	2009	IPAL Komunal	Srengat	8°4'39.656" LS dan 112°3'3.464 " BT	PP Karangaji Kerjen	500			Tidak diketahui	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
98	2007	IPAL Komunal	Wlingi	8°4'35.211" LS dan 112°19'48.2 39" BT	Sejati	200	50	50	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	
99	2006	IPAL Komunal dan MCK	Wlingi	8°5'3.817" LS dan 112°19'17.7 23" BT	Sejahtera Abadi	300	75	75	APBD	Berfungsi	Belum pernah	ABR	Tidak Ada	

Sumber : Hasil Survey, 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR,
DINAS PERKURAHAN, NUMERAN
PENATAAN RUANG
Jalan S. Sudardi Nomor 85, Telepon (0342) 808897
Email : dpurkablitara@gmail.com Laman : dpurkablitaraib.go.id



(Sumber : Dokumentasi Survey 2025)

Tabel 2. 29 Sarana dan Prasarana SPALD-T Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Jiwa	KK	SR
1	2024	Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) (IPAL dan MCK) Yayasan PP. Mambaul Ulum Sempu	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Udanawu	KMP Yayasan PP. Mambaul Ulum Sempu	177	59	5
2	2024	Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) (IPAL dan MCK) PP. Mambaul Ulum Bangsri	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Nglegok	KMP PP. Mambaul Ulum Bangsri	62	20	5
3	2024	Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) (IPAL dan MCK) Yayasan PP Darurroja	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Srengat	KMP Yayasan PP Darurroja	267	89	5
4	2024	Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) (IPAL dan MCK) Yayasan Pondok Pesantren Al Uzlatul Ihsan Arum	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Ponggok	KMP Yayasan Pondok Pesantren Al Uzlatul Ihsan Arum	103	35	5
5	2024	Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) (IPAL dan MCK) Pondok Pesantren Masthuriyatul Ulum	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Gandusari	KMP Pondok Pesantren Masthuriyatul Ulum	67	22	5
6	2024	Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) (IPAL dan MCK) PP. Yanbu'Ul Qur'An Al Karim	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Selopuro	KMP PP. Yanbu'Ul Qur'An Al Karim	250	85	5

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Jiwa	KK	SR
7	2024	Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) (IPAL dan MCK) Madin Darussalam	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Wonodadi	KMP Madin Darussalam	140	50	50
8	2023	Pembangunan MCK	SPALDT/IPAL Komunal	Gandusari	CV Alfata	12	3	3
9	2023	SANIMAS Pembangunan IPAL Komunal dan MCK plus PP Al Mawaddah Desa Jiwut Kecamatan Nglegok	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Nglegok	PP Al Mawaddah	500	125	
10	2023	SANIMAS Pembangunan IPAL Komunal dan MCK plus PP Mihrob Maryam Desa Pojok Kecamatan Garum	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Garum	PP Mihrob Maryam	500	125	
11	2023	SANIMAS Pembangunan IPAL Komunal dan MCK plus PP Roudotul Huffads Desa Selokajang Kecamatan Srengat	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Srengat	PP Roudotul Huffads	500	125	
12	2021	Pembangunan IPAL Desa Balerejo Kecamatan Wlingi (DAK)	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	KSM NGUDI MAKMUR	149	44	44
13	2021	Pembangunan IPAL Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi (DAU)	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	KSM GUYUB RUKUN	122	35	35

**Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar**

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Jiwa	KK	SR
14	2021	Pembangunan IPAL Desa Ploso Kecamatan Selopuro (DAU)	SPALDT/IPAL Komunal	Selopuro	KSM TIRTA LESTARI	146	30	30
15	2021	Pembangunan IPAL Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro (DAU)	SPALDT/IPAL Komunal	Selopuro	KSM WARGO RUKUN	168	52	52
16	2020	Pembangunan IPAL Komunal Desa Suru Kecamatan Doko	SPALDT/IPAL	Doko	Genjong Asri	216	54	54
17	2020	Pembangunan IPAL Komunal Desa Selopuro Kecamatan Selopuro	SPALDT/IPAL	Selopuro	Jambon Berbudi	224	56	56
18	2020	Pembangunan IPAL Komunal Desa Ploso Kecamatan Selopuro	SPALDT/IPAL	Selopuro	Sanitasi Bangun Lestari	232	58	58
19	2020	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL	Wlingi	Klemunan Sehat	212	53	53
20	2020	Pembangunan IPAL Komunal Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro	SPALDT/IPAL	Selopuro	Sehat Lestari	228	57	52
21	2020	Pembangunan IPAL Komunal Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi	SPALDT/IPAL	Wonodadi	Serseri	264	66	66
22	2019	Pembangunan IPAL Komunal Desa Siraman Kecamatan Kesamben	SPALDT/IPAL Komunal	Kesamben	Mitra Berkarya	228	57	57

**Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar**

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Jiwa	KK	SR
23	2019	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Sejahtera	216	54	54
24	2019	Pembangunan IPAL Komunal Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Bedengan Lestari	216	54	54
25	2019	Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus PP Darul Huda Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Wonodadi	PP Darul Huda	248	62	60
26	2018	Pembangunan IPAL Komunal Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro	SPALDT/IPAL Komunal	Selopuro	Sehat Lestari	220	55	53
27	2017	Pembangunan IPAL Komunal Desa Sidomulyo Kecamatan Garum	SPALDT/IPAL Komunal	Garum		159	53	53
28	2016	Pembangunan IPAL Komunal Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro	SPALDT/IPAL Komunal	Kanigoro		200	50	45
29	2016	Penambahan Jaringan IPAL Komunal Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro	SPALDT/IPAL Komunal	Kanigoro	Berkah	48	12	12
30	2016	Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus Desa Maron Kecamatan Srengat	SPALDT/IPAL Komunal dan MCK Plus	Srengat	KSMP Al Hikmah	216	54	54
31	2014	Pembangunan IPAL Komunal Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro	SPALDT/IPAL Komunal	Kanigoro	Berkah	300	75	75

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Jiwa	KK	SR
32	2014	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Sido Makmur	236	59	54
33	2014	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Sido Mukti	240	60	57
34	2014	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Lestari Makmur	296	74	54
35	2014	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Ronggolawe	392	98	98
36	2014	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Kartini	240	60	32
37	2013	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro	SPALDT/IPAL Komunal	Kanigoro	Lestari	204	51	32
38	2013	Pembangunan IPAL Komunal Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro	SPALDT/IPAL Komunal	Kanigoro	Cemerlang	128	32	25
39	2013	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro	SPALDT/IPAL Komunal	Kanigoro	Sehat Berseri	280	70	65

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Tahun Pembangunan	Nama Pekerjaan	Sistem	Kecamatan	Nama KSM	Jiwa	KK	SR
40	2013	Pembangunan IPAL Komunal Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro	SPALDT/IPAL Komunal	Kanigoro	Berseri	280	70	43
41	2013	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Tirta Bersih	280	70	34
42	2013	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Cepoko Lestari	180	45	21
43	2012	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Tentrem	324	81	65
44	2012	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Kenongo Asri	284	71	61
45	2012	Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi	SPALDT/IPAL Komunal	Wlingi	Sido Rukun	288	72	68

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2025

2.12.2 Data Non-Teknis

2.12.2.1Kondisi Pengelolaan Keuangan SPALD

Belanja sanitasi kabupaten merupakan gambaran dari besarnya dana APBD yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi di suatu kabupaten. Belanja sanitasi dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sanitasi kabupaten yang meliputi air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan. Tabel 2.30 merupakan rincian belanja sanitasi khusus air limbah doemstik di Kabupaten Blitar.

Tabel 2. 30 Pehitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Blitar untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	4.000.000.000	4.800.000.000	5.760.000.000	6.912.000.000	8.294.000.000	29.766.400.000
	Air Limbah Domestik						
	Biaya operasional / pemeliharaan	500.000.000	600.000.000	720.000.000	864.000.000	1.036.800.000	3.720.800.000

(sumber : Hasil Analisa Pokja Santasi Kabupaten Blitar, 2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkiraan biaya operasional / pemeliharaan untuk air limbah domestik mengalami kenaikan sebesar 20%.

2.12.2.2 Kondisi Kelembagaan Pengelolaan SPALD

Kegiatan pengelolaan dan pengendalian air limbah domestik di Kabupaten Blitar berada dibawah tanggung jawab dari :

- Sekretaris Daerah
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Matriks tugas pokok dan fungsi dinas terkait pengelolaan limbah domestik Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2. 31 Matriks Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terkait Pengelolaan Limbah Domestik Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
1.	Sekretaris Daerah	Peraturan Bupati Blitar No 24 Tahun 2022	Bidang Hukum Sekretariat Daerah		a. menyiapkan perumusan kebijakan daerah; b. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah; c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi	a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; d. oenyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan infromasi hukum; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar	Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016	Prasarana Wilayah	Sub Bidang Prasarana Wilayah III	Membantu Kepala Bidang melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah yang meliputi urusan lingkungan hidup, kehutanan, dan ESDM	a. Menginventarisasi permasalahan, penyediaan dan Analisa data pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, dan ESDM; b. Menyusun rencana program pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM; c. Menyusun bahan koordinasi, intregrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, dan ESDm berbasis IT; d. Menyusun bahan dikumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM; e. Memverifikasi dokumen Rencana Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM; f. Menyusun bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						pelaporan terhadap perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, dan ESDM; g. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	Peraturan Bupati Blitar No 38 Tahun 2022	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kepala bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman	Membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang pemnyehatan lingkungan permukiman	a. penyelenggaraan perencanaan teknis dan pembanginan penyehatan lingkungan permukiman; b. perencanaan penyediaan prasarana dan utilitas umum perumahan; c. penyediaan prasarana, saranam dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian; d. pengoordinasian dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana,dan utilitas umum perumahan; e. verifikasi dan penyerahan prasarana dan utilitas umum permukiman dari pengembangan kerja sama

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						penyediaan/pengeolaan psu permukiman; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Blitar No 99 Tahun 2022	Sumber Daya Air		Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan bidang sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan teknis, pengembangan sumber daya air, sistem irigasi serta pengendalian daya rusak air pada bendung, situ, embung, irigasi, tambak, air tanah dan air baku serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah (SPAL) domestik yang menjadi urusan pemerintah daerah.	a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan bidang sumber daya air; b. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik; c. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik; d. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik;

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)

Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						e. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air da serta pengelolaan dan pengembangan pembuangan air limbah domestik; f. Pemantauan dan sistem evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola, rencana kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik; g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; h. Pelaksanaan sistem i. Pengendalian intern pemerintah; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Blitar No. 98 tahun 2022	Kesehatan Masyarakat		Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat.	a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)

Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						b. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat; c. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan operasional program di bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional; d. Menyelenggarakan bimbingan dan supervisi pelaksanaan program Kesehatan Keluarga dan Gizi; e. Menyelenggarakan bimbingan bimbingan dan supervisi program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; f. Menyelenggarakan bimbingan bimbingan dan supervisi program Kesehatan Lingkungan,Kesehatan Kerja dan Olah Raga; g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						evaluasi terhadap pelaksanaan program Kesehatan Keluarga dan Gizi; h. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat; i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; j. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program Kesehatan Keluarga dan Gizi; k. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat; l. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program Kesehatan

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; m. Melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi; n. Melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja di bidang Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat; o. Melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; p. Fasilitasi penerbitan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga; q. Fasilitasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)

Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM); r. Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan; s. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga; t. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat kota; u. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat kota; dan v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2022	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan		Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengendalian terhadap	a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air; b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
			Lingkungan Hidup		usaha/kegiatan potensial mencemari atau merusak lingkungan.	d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; e. Pemantauan baku mutu lingkungan; f. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar sumber pencemar institusi dan non institusi; h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi; i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi; j. Penentuan baku mutu sumber pencemar; k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; l. Penyusunan pelaksanaan kebijakan pembinaan pembinaan terhadap dan

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						sumber pencemar institusi dan non institusi; m. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; n. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun di wilayah Daerah; o. Memfasilitasi masyarakat; dan penyelesaian pengaduan p. Pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Blitar No 108 Tahun 2022	Pembangunan Desa		Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bidang pembangunan desa.	a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan batas desa; b. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan batas desa; c. pelaksanaan koordinasi teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan batas desa;

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, aset, dan batas desa; e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peraturan Bupati Blitar No 34 Tahun 2022	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Merumuskan dan melaksanakan kebijakn, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.	a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah; c. pengoordinasian penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; d. pengoordinasian pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan kinerja sama kehumasan; e. pengoordinasian pelaynan pengaduan masyarakat dan keterbukaan publik; f. pengoordinasian penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;

an Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						g. pengoordinasian penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik; i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9.	Kepala Dinas Sosial	Peraturan Bupati Blitar No 101 Tahun 2022	Bidang Pemberdayaan Sosial		Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan social, yang meliputi kegiatan fasilitasi pengungsian, bantuan dan perlindungan sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka pemberdayaan sosial	a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan social kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi social;

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial; e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Bupati Blitar No 114 Tahun 2022	Bidang Pengembangan Usaha Mikro		Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberia bimbingan teknis bidang pengembangan usaha mikro dalam pengembangan produksi, pengolahan, sumber daya manusia, desain dan teknologi	a. perumusan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan dinas; b. penyusunan indicator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelakasanaan tugas; c. perumusan program dan kegiatan bidang melalui sebagai pedoman pelaksanaan tugas; d. penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja bidang secara

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlakuk sebagai pedoman pelaksanaan tugas; e. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan bidang sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan; f. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan; g. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang berpedoman pada pentunjuk dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah; h. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan dating; i. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangam bidang secara berkala



Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						untuk perbaikan kinerja yang akan dating; j. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; k. pembagian dan penyelesaian tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; l. pelaksanaan penelitian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.
11.	Kepala Dinas Pendidikan	Peraturan Bupati Blitar No 97 Tahun 2022	- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			- Pengarah penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak



Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
			dan Pendidikan Non Formal - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama -			Usia Dini dan Pendidikan Non Formal - Memberi petunjuk penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Blitar No 46 Tahun 2022	Penegakan Peraturan Perundang-undnagan Daerah	Seksi Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan	Membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam lingkup dokumentasi hukum dan Penyuluhan	a. Inventarisasi dan pendokumentasian produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masuk dalam lingkup tugas Satpol PP; b. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja penyuluhan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. Pelaksanaan penyuluhan mengenai peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya kepala

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No.	Dinas/Badan	Dasar Hukum	Bidang	Seksi/Sub Bidang	Tugas Pokok	Fungsi
						aparatur sipil negara dan warga masyarakat sesuai lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Satpol PP.

Sumber :

1. Peraturan Bupati Blitar No. 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
2. Peraturan Bupati Blitar No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Bupati Blitar No. 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar;
4. Peraturan Bupati Blitar No. 99 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Blitar No. 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
6. Peraturan Bupati Blitar No. 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Bupati Blitar No. 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar;
8. Peraturan Bupati Blitar No. 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Bupati Blitar No. 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Bupati Blitar No, 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Bupati Blitar No, 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
12. Peraturan Bupati Blitar No, 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;

2.12.2.3Data Pengaturan dalam Pengelolaan SPALD

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki bebrapa regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sanitasi, seperti :

- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.10 tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045
- Draft RPJMD Kabupaten Blitar rahun 2021-2026
- Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Tapak Perumahan

Materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait dengan air limbah adalah seperti pada Tabel 2.32

Tabel 2. 32 Peraturan Daerah terkait Pengelolaan SPALD

No	Peraturan	Materi Muatan
1	Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Tapak Perumahan	Pasal 6 ayat (2) mewajibkan penyediaan IPAL Komunal untuk : - Rumah yang tidak memungkinkan dibangun resapan limbah sendiri: dan/atau - Perumahan dengan jumlah kavling lebih dari 50 unit dan tidak dilewati jaringan limbah rumah tangga
2	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031	Pasal 57 : - Rencana system pengelolaan air limbah domestik terdapat di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Blitar - Pengembangan sarana prasarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota - Pengembangan system sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan on site system (septic tank) dan mandi cuci kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman kumuh.
3	Peraturan Daerah No 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Belum mengatur retribusi daerah yang berkaitan dengan penyedotan tinja maupun pengolahan di IPLT. Tidak adanya pengaturan retribusi ini disebabkan Kabupaten Blitar belum memiliki IPLT. Namun jika sudah memiliki IPLT dan sarana prasarana lainnya maka retribusi tersebut perlu diatur sebagai dasar pemungutan retribusi.

Terkait dengan pemungutan retribusi, Kabupaten Blitar telah memiliki Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 menjadi peraturan pelaksana dari Perda No.8 Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan UU HKPD

BAB III

ANALISIS KONDISI PENYELENGGARAAN SPALD

3.1 HARMONISASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPALD KEMENTRIAN/LEMBAGA

Terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, antara lain RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDG's 2030, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang antar kebijakan dan strategi tersebut saling berkaitan. Program yang akan direncanakan pada bab rencana program harus selaras dengan kebijakan dan strategi tersebut.

3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Blitar

Visi Kabupaten Blitar yaitu “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 terdapat pada poin pertama yaitu pemerataan konektivitas infrastruktur yang berkelanjutan & peningkatan kualitas lingkungan hidup. Fokus pembangunan pada poin ketiga yakni peningkatan cakupan akses sanitasi layak dan aman. Berdasarkan draft RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029, target akses layanan air limbah domestik di tahun 2028 yaitu akses sanitasi layak sebesar 98,6% dan akses sanitasi aman 3,06%.

3.1.2 Sasaran RPJPN 2025-2045

Pada RPJPN 2025-2045 yang berkaitan dengan sanitasi yakni berada pada arah pembangunan 5.3 Lingkungan Hidup Berkualitas. Misi pembangunan terkait sanitasi ada pada misi ke 5 yang berbunyi “Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi”, dengan indikator utama terkait sanitasi yakni rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebesar 12,5% pada tahun 2025; dan sasaran akses sanitasi aman tahun 2045 sebesar 70%.

Arah kebijakan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan layanan pengelolaan sanitasi yakni:

2. Penyediaan layanan pengelolaan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan area public yang sesuai dengan karakteristik daerah
3. Didukung penguatan tata kelola (peran operator, regulator, dan pengawasan)
4. Pemantauan effluen
5. Pemicuan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

Berikut merupakan target pembangunan infrastruktur cipta karya, pada tahun 2045 target rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebesar 70%.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

RPJMN 2025-2029				RPJPN 2025-2045					
	Indikator Pembangunan	Baseline 2025 (%)	Target 2029 (%)	Indikator Pembangunan	Baseline 2025 (%)	Target 2029 (%)	Target 2034 (%)	Target 2040 (%)	Target 2045 (%)
Pengembangan Kawasan Permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	65	73	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	65	73	86	93	100
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	28.2	40.2	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	28.2	40.2	75	90	100
Air Minum	Akses rumah tangga terlayani air minum aman	33	42.56	Akses rumah tangga terlayani air minum perpipaan	33	42.56	55	65	70
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12.5	30	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12.5	30	55	65	70
Sanitasi Air Limbah Domestik	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12.5	30	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12.5	30	55	65	70
Sanitasi Persampahan	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (terdaur ulang)	24 (16)	38 (20)	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (terdaur ulang)	24 (16)	38 (20)	60 (20)	75 (30)	90 (35)
	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (terdaur ulang)	24 (16)	38 (20)	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (terdaur ulang)	24 (16)	38 (20)	60 (20)	75 (30)	90 (35)

Gambar 3. 1 Target Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

3.1.3 Sasaran RPJPN 2025-2045 (Indonesia Emas)

Sasaran RPJPD 2025-2045

Selaras dengan visi RPJPN 2025-2045, RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045 yakni menjadikan Blitar kabupaten agroindustri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan untuk jangka pendek (2025-2029) dan jangka menengah (2030-2034) yaitu percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Target rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Blitar pada tahun 2045 yaitu sebesar 78% dengan baseline tahun 2025 sebesar 1,82%.

3.1.4 Sasaran RPJMN 2025 – 2029

Dengan tujuan meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman, maka di dalam RPJMN 2025-2029 ditetapkan persentase sebagai berikut :

- a. Rumah tangga dengan akses air minum aman, target 2025 sebesar 33% dan target 2029 sebesar 43%
- b. Rumah tanggadengan akses sanitasi aman, target 2025 sebesar 12,5% dan target 2029 sebesar 30%
- c. Rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABs) di tempat terbuka, target 2025 sebesar 2,5% dan target 2029 sebesar 0%.

Dari target yang ditetapkan tersebut terlihat bahwa pada tahun 2029 nanti maka diharapkan masyarakat indonesia memiliki akses aman 30% dan tidak ada BABS lagi.

3.1.5 Sasaran RPJMD 2025-2029

Visi RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 yakni Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 meliputi :

1. Pemerataan konektivitas infrastruktur yang berkelanjutan & peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan pangan & pengembangan hilirisasi pertanian
3. Pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM dan industri, serta pengembangan pariwisata dan ekraf untuk pembangunan ekonomi
4. Pembangunan SDM inklusif dan perlindungan sosial yang adaptif
5. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik

Pada prioritas pembangunan yang pertama, didalamnya terdapat fokus pembangunan pada poin 3 yaitu peningkatan cakupan akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Blitar.

3.1.6 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Batas Waktu Pencapaian adalah jangka waktu untuk pencapaian target jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

Standar Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

- Standar mutu pelayanan berdasarkan kuantitas yaitu setiap rumah memiliki satu akses pengolahan limbah domestik.
- Standar mutu pelayanan berdasarkan kualitas pelayanan terdiri dari:
 - Kepadatan Penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/ha: pelayanan akses dasar
 - Kepadatan Penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan: pelayanan akses aman.

Standar Pelayanan Minimum yang telah dicapai oleh Kabupaten Blitar dapat dilihat melalui akses layak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan akses sanitasi layak tahun 2024, Kabupaten Blitar telah mencapai angka 87,25%.

Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 – Tabel 3.3.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Tabel 3. 1 Kegiatan Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Dasar (Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun < 25 jiwa/ha)

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-sistem Pengolahan Setempat	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Rumah yang memiliki akses cubluk	Jumlah rumah yang memiliki akses ke cubluk atau tangki septik	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI
	Pembinaan penyediaan prasarana cubluk				

(Sumber : Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No. 29 tahun 2018)

Tabel 3. 2 Kegiatan Pelayanan SPALD-S dengan Kualitas Pelayanan Akses Dasar (Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun ≥ 25 jiwa/ha)

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
1.Sub-sistem pengolahan setempat	Penyediaan tangki septik	Rumah yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah yang memiliki akses ke tangki septik	Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan tangki septik dilaksanakan sesuai dengan SNI 2898:2017
2.Sub-sistem pengangkutan	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	Jumlah sarana pengangkutan	Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan	Penyediaan sarana pengangkutan dilaksanakan sesuai dengan NSPK
	Penyedia jasa penyedotan lumpur tinja		Jumlah rumah yang tangki septiknya disedot	Tersedianya jam penyedotan bagi setiap rumah	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja minimal 3 tahun sekali
3.Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Penyediaan prasaran IFLT	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IFLT	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IFLT	Tersedianya IFLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota	a. Penyediaan prasarana IFLT sesuai dengan NSPK b. Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IFLT dengan effluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No. 29 tahun 2018

Tabel 3. 3 Kegiatan Pelayanan SPALD-T dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman

Komponen SPALD-T	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
1. Sub-sistem pelayanan	1. Penyediaan baru pelayanan SPALD-T, melalui pembangunan IPALD, sub-sistem pengumpulan, dan sambungan rumah;	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Tersedianya sambunagn rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	PenyediaanSambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
2. Sub-sistem pengumpulan	2. Perluasan layanan SPALD-T eksisting melalui pembangunan sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah; dan				Penyediaan Jaringan Pengumpul Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK
3. Sub-sistem pengolahan terpusat	3. Penyediaan prasarana sambungan rumah				a. Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK b. Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga effluennya memenuhi baku mutu air limbah domestik. c. Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan)

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No. 29 tahun 2018

3.1.7 Sasaran SDG’s 2030

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang air limbah berdasarkan SDG’s 2030 tercantum dalam Goal 6, yaitu:

- 1.2 : Akses universal sanitasi layak dan Stop BABS Terbuka
- 1.3 : Pengurangan air limbah yang tidak diolah

Pada tahun 2030 sesuai Indikasi Target TPB, target capaian akses sanitasi air limbah yaitu 100% penduduk mendapatkan akses layak di tahun 2030. Akses layak tersebut 53,7%-nya merupakan akses aman.

3.1.8 Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama 5 tahun sesuai isu strategi, tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan akses layanan air limbah domestik berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Strategi 1 dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan tangki septik, tangki septik layak, SPALDS skala komunal, SPALDT skala permukiman dan total keamanan system pengolahan air limbah. Strategi ini terkait dengan :

- Tujuan :**
- 1. Meningkatkan tingkat keamanan sistem pengolahan air limbah
 - 2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan pengelola air limbah
 - 3. Meningkatkan jumlah akses layak SPALDT Skala Permukiman
 - 4. Meningkatkan keterlibatan Swasta dalam pengelolaan air limbah domestik
 - 5. Terwujudnya kelembagaan dan perencanaan pembangunan air limbah

- Sasaran :**
- 1. Meningkatnya angka kemananan total sistem air limbah yang semula 1,38% menjadi 19,6% pada tahun 2024
 - 2. Meningkatnya jumlah tangki septik layak dari 88,59% menjadi 95% pada tahun 2024
 - 3. Meningkatnya jumlah akses layak SPALDT skala Permukiman yang semula 0,7% menjadi 10% pada akhir tahun 2024
 - 4. Terbangunnya IPAL Komunal sebanyak 150 unit s/d 2024
 - 5. Tersedianya kelembagaan pengelolaan air limbah pada akhir tahun 2024
 - 6. Tersedianya Regulasi Pengelolaan Air Limbah domestik pada tahun 2024

Strategi 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan air limbah

Strategi 2 ini dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar terlibat aktif dalam pengelolaan air limbah yang baik seperti tidak BABS, membangun tangki septik yang aman, menguras tangki septik secara rutin. Strategi ini terkait dengan :

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

- Tujuan :**
1. Meningkatkan tingkat keamanan sistem pengolahan air limbah
 2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan pengelola air limbah
 3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan air limbah

- Sasaran :**
1. Meningkatnya angka kemananan total sistem air limbah yang semula 1,38% menjadi 19,6% pada tahun 2024
 2. Meningkatnya jumlah tangki septik layak dari 88,59% menjadi 95% pada tahun 2024
 3. Berkurangnya tingkat BABS dari 2,76% menjadi 0% di akhir 2024

Strategi 3 : Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan air limbah

Strategi 3 ini dalam rangka meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan air limbah yang selama ini belum berjalan dengan baik. Banyak peluang yang bisa dimasuki swasta seperti pembangunan IPAL permukiman, IPAL kawasan, penyedotan tinja dan sebagainya. Strategi ini terkair dengan :

- Tujuan :**
1. Meningkatkan tingkat keamanan sistem pengolahan air limbah
 2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan pengelola air limbah
 3. Meningkatkan jumlah akses layak SPALDT Skala Permukiman
 4. Meningkatkan keterlibatan Swasta dalam pengelolaan air limbah domestik

- Sasaran :**
1. Meningkatnya angka kemananan total sistem air limbah yang semula 1,38% menjadi 19,6% pada tahun 2024
 2. Meningkatnya jumlah tangki septik layak dari 88,59% menjadi 95% pada tahun 2024
 3. Meningkatnya jumlah akses layak SPALDT skala Permukiman yang semula 0,7% menjadi 10% pada akhir tahun 2024
 4. Terbangunnya IPAL Komunal sebanyak 150 unit s/d 2024

Strategi 4 : Meningkatkan pendanaan operasional dan pemeliharaan air limbah

Strategi 4 ini dalam rangka meningkatkan pendanaan biaya Operasional dan Pemeliharaan (OP) air limbah yang selama ini masih belum ada. Biaya OP ini bisa dialokasikan untuk OP IPAL komunal, tangki septik komunal dan IPLT. Strategi ini terkair dengan :

- Tujuan :**
1. Meningkatkan tingkat keamanan sistem pengolahan air limbah
 2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan pengelola air limbah
 3. Meningkatkan jumlah akses layak SPALDT Skala Permukiman

- Sasaran :**
1. Meningkatnya angka kemananan total sistem air limbah yang semula 1,38% menjadi 19,6% pada tahun 2024
 2. Meningkatnya jumlah tangki septik layak dari 88,59% menjadi 95% pada tahun 2024
 3. Meningkatnya jumlah akses layak SPALDT skala Permukiman yang semula 0,7% menjadi 10% pada akhir tahun 2024
 4. Terbangunnya IPAL Komunal sebanyak 150 unit s/d 2024

Strategi 5 : Memaksimalkan penyerapan anggaran APBN untuk menambah jumlah infrastruktur air limbah domestik

Strategi 5 ini dalam rangka menambah jumlah infrastruktur air limbah domestik dengan memanfaatkan pendanaan dari APBN seperti pembangunan SPALDT permukiman, dan IPLT. Strategi ini terkair dengan :

- Tujuan :**
- 1. Meningkatkan tingkat keamanan sistem pengolahan air limbah
 - 2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan pengelola air limbah
 - 3. Meningkatkan jumlah akses layak SPALDT Skala Permukiman

- Sasaran :**
- 1. Meningkatnya angka kemananan total sistem air limbah yang semula 1,38% menjadi 19,6% pada tahun 2024
 - 2. Terbangunnya IPLT pada Tahun 2024
 - 3. Meningkatnya jumlah tangki septik layak dari 88,59% menjadi 95% pada tahun 2024
 - 4. Meningkatnya jumlah akses layak SPALDT skala Permukiman yang semula 0,7% menjadi 10% pada akhir tahun 2024
 - 5. Terbangunnya IPAL Komunal sebanyak 150 unit s/d 2024

Strategi 6 : Meningkatkan jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah

Strategi 6 ini dalam rangka meningkatkan jumlah sarana dan prasarana air limbah baik skala setempat maupun terpusat. Strategi ini terkair dengan :

- Tujuan :**
- 1. Meningkatkan tingkat keamanan sistem pengolahan air limbah
 - 2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan pengelola air limbah
 - 3. Meningkatkan jumlah akses layak SPALDT Skala Permukiman

- Sasaran :**
- 1. Meningkatnya angka kemananan total sistem air limbah yang semula 1,38% menjadi 19,6% pada tahun 2024
 - 2. Terbangunnya IPLT pada Tahun 2024
 - 3. Meningkatnya jumlah tangki septik layak dari 88,59% menjadi 95% pada tahun 2024
 - 4. Meningkatnya jumlah akses layak SPALDT skala Permukiman yang semula 0,7% menjadi 10% pada akhir tahun 2024
 - 5. Terbangunnya IPAL Komunal sebanyak 150 unit s/d 2024

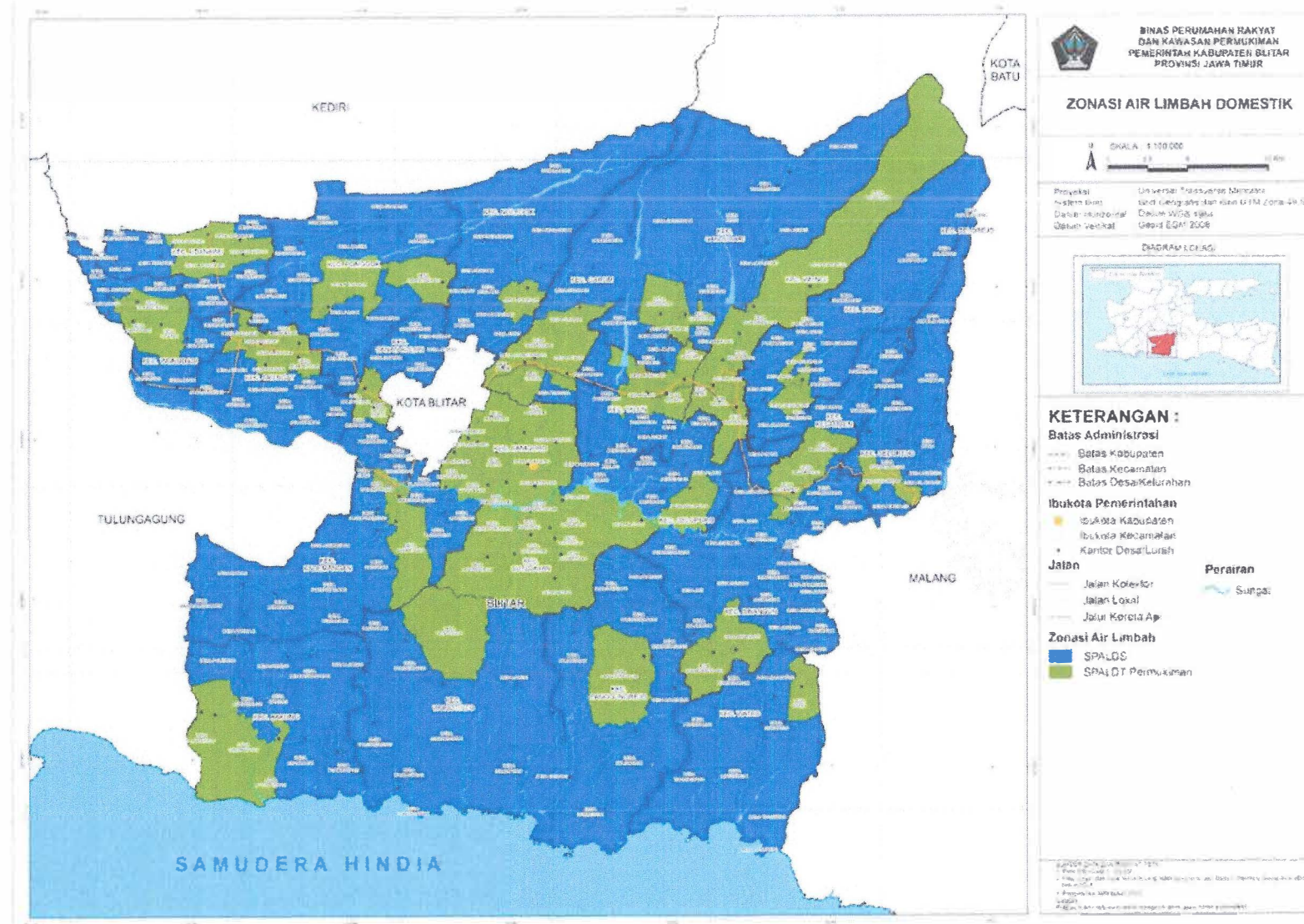
3.2 Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031, diperoleh hasil telaahan pada masing-masing sistem pengelolaan lingkungan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.4. Rencana sistem pengelolaan lingkungan dari masing-masing sistem memiliki indikasi program

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

pemanfaatan ruang pada periode perencanaan yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan OPD sehingga memunculkan arahan lokasi pengembangan.

Pada RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 juga dijelaskan secara detail rencana pengelolaan air limbah. Peta rencana pengelolaan air limbah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3. 2 Peta Zonasi Air limbah Domestik Kabupaten Blitar
(Sumber : RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031)

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Tabel 3. 4 Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1.	Rencana sistem pengelolaan limbah kota	Perwujudan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. pengelolaan limbah non domestik terdapat di perkotaan Kanigoro, Perkotaan Srengat dan Perkotaan Wlingi. b. pengembangan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota; c. pengembangan sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan on site sistem (septic tank) dan mandi cuci kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Blitar; d. pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga dan kawasan peternakan berskala besar;		- Adanya peningkatan jumlah sarana-prasarana pengolaan air limbah; - Diperlukan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi. - Adanya pengawasan terhadap sentra industri wajib mengelola air limbahnya;	a. Sentra industri dan usaha mikro di Kabupaten Blitar; b. Wilayah permukiman untuk pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpusat.

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
		e. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui kajian lingkungan hidup strategis; f. pengendalian setiap kegiatan industri wajib memiliki instalasi pengolahan limbah; g. penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri;dan h. pengembangan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada setiap kegiatan industri.			

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
2.	Rencana sistem persampahan	Perwujudan system persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan; b. pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar; c. pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah tiap kecamatan yang berada pada Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Kademangan; d. pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) di seluruh kecamatan; e. penerapan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle (mendaur ulang) dan replace (mengganti);		- Diperlukan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persampahan. - kesiapan dalam menyiapkan lahan tambahan TPS dan/atau TPA akibat pengembangan wilayah; - Pelatihan SDM agar mumpuni dalam pelaksanaan 3R.	a. Lokasi TPA di Kelurahan Pojok; b. Lokasi TPS di masing-masing kecamatan dan di tiap kegiatan perdagangan jasa;

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
		f. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan; g. peningkatan fungsi tempat pemrosesan akhir (TPA) dari sistem open dumping ke sanitary landfill; h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; i. pengembangan tempat penampungan sampah sementara atau penyediaan kontainer pada setiap wilayah kecamatan sebagai tempat penampungan sampah pasar dan rumah tangga sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah; j. penyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikan-nya secara proporsional di setiap wilayah; dan k. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu satuan operasional kebersihan lingkungan (SOKLI) termasuk didalamnya membangun			

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
		instalasi pengelolaan sampah terpadu (IPST) yang tipologinya disesuaikan dengan karakter kawasan, pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman perkotaan di pusat-pusat pelayanan.			

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
3.	Rencana sistem pusat perkotaan	Pembagian pusat perkotaan di Kabupaten Blitar menjadi 4 (empat) meliputi : a. Pusat kegiatan Lokal (PKL), meliputi : Perkotaan Kanigoro a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), meliputi : Perkotaan Wlingi, Perkotaan Srengat, dan Perkotaan Sutojayan b. Pusat Pelayanan Kawsan (PPK), meliputi : Perkotaan Nglegok, Perkotaan Kademangan, Perkotaan Talun, Perkotaan Selopuro, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Wonodadi, Perkotaan Ponggok, Perkotaan Selorejo, Perkotaan Udanawu, Perkotaan Gandusari, Perkotaan Garum, dan Perkotaan Sanankulon c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi : -Perdesaan Plandirejo, Kecamatan Bakung; -Perdesaan Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto; -Perdesaan Serang, Kecamatan Panggungrejo; -Perdesaan Ringinrejo, Kecamatan Wates;			3 Kecamatan, sesuai pada arahan struktur ruang.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
		-Perdesaan Salamrejo, Kecamatan Binangun; dan -Perdesaan Doko, Kecamatan Doko			
4.	Sistem permukiman/ perumahan		a. Pengembangan kawasan perumahan skala besar diarahkan di Desa Maliran Kecamatan Ponggok dan kawasan-kawasan yang berada di sekitar perbatasan Kota Blitar seperti di Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Talun;	- Dengan adanya peruntukan kawasan perumahan maka akan berpengaruh terhadap pengembangan wilayah; - Akan terjadi peningkatan jumlah penduduk; - Pengembangan wilayah dan peningkatan jumlah	3 Kecamatan, sesuai dengan arahan pada struktur ruang

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Rencana Pola Ruang	Rencana Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			b. Pengembangan perumahan secara individu diupayakan menyatu dengan perumahan penduduk yang sudah ada efesiensi lahan; c. Didalam kawasan permukiman perkotaan, kabupaten harus menyediakan peruntukan lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah seluas areal berdasarkan kebutuhan dan permukiman dengan lingkungan berimbang; d. Penyediaan perumahan dilakukan penyediaan kapling siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lasiba); dan e. Wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Blitar meliputi perkotaan di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar.	penduduk berbanding lurus dengan peningkatan sarana-prasarana; - Kawasan perumahan memiliki peraturan zonasi (baik untuk kepadatan tinggi, sedang, maupun rendah), sehingga harus dipatuhi.	

(Sumber : Hasil Analisis, 2025)

Dari rencana pola ruang yang ada sudah terdapat rencana sistem pengelolaan limbah kabupaten, yaitu penyediaan pengelolaan air limbah untuk limbah rumah tangga secara komunal dan terpadu; dan pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dengan rencana dilakukan pembangunan pada tiga tempat secara bertahap. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan 2024, IPLT pertama akan dibangun di Kelurahan Jingglong Kecamatan Sutojayan. Pembangunan selanjutnya akan dilakukan di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Talun.

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (OPD) adalah:

- i. Adanya peningkatan jumlah sarana-prasarana pengelolaan air limbah;
- ii. Diperlukan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.

Sedangkan arahan lokasi pengembangan pelayanan OPD adalah :

- iii. Wilayah permukiman untuk pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpusat.

Pada saat ini sedang dilakukan rencana pembangunan IPLT yang pertama, lokasi yang diusulkan adalah di Kelurahan Jingglong Kecamatan Sutojayan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan Pembangunan IPLT tahun 2024 Kabupaten Blitar.

3.3 Analisis Gambaran Kondisi SPALD

3.3.1 Kondisi dan Perkembangan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan SPALD

Berdasarkan SSK Kabupaten Blitar tahun 2023-2027 masyarakat sudah 0% Buang Air Besar Sembarangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya WC yang tidak memiliki tangka septik (lupur tinja langsung ke badan air) atau yang biasa disebut BABS tersamar, terutama di daerah yang dekat dengan sungai.

Pada SPALD-Setempat individu, dari hasil wawancara kuesioner diketahui bahwa 93% masyarakat telah memiliki tangki septik sebagai tempat pengolahan awal lumpur tinja. Namun hanya 14% masyarakat saja yang pernah melakukan penyedotan lumpur tinja dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tangki septik yang dimiliki warga belum kedap/tidak sesuai SNI. Masyarakat melakukan penyedotan lumpur tinja melalui sistem “on call” yaitu warga akan memanggil jasa penyedotan tinja swasta apabila tangki septik sudah penuh. Dari hasil wawancara, 62% responden mengaku tidak tahu tentang pentingnya pengelolaan air limbah.

Sedangkan pada SPALD-Setempat Individu dan SPALD-Terpusat, masyarakat telah dilibatkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana sanitasi yang telah dibangun oleh pemerintah daerah. Masyarakat pengelola membentuk sebuah organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar.

3.3.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat terkait Penyelenggaraan SPALD

Beberapa jenis kasus penyakit akan disajikan berdasarkan Tabel 3.5 Data mengenai Jumlah Kasus 10 Penyakit di Kabupaten Blitar.

Tabel 3. 5 Jumlah Kasus 10 Penyakit terbanyak menurut Kecamatan tahun 2019

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Talun	1	HIPERTENSI	1146
		2	ISPA	1113
		3	NIDDM	763
		4	PULPA	731
		5	GASTRITIS DUODENITIS	581
		6	FEBRIS	450
		7	INFLUENZA	399
		8	MYALGIA	396
		9	PJK	380
		10	ARTHRITIS	369
2	kademangan	1	Acute upper respiratory infection, unspecified	1993
		2	General examination and investigation of persons without complaint and reported diagnosis	1650
		3	Laboratory examination	1279
		4	Myalgia	1158
		5	Essential (primary) hypertension	1084
		6	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	902
		7	Fever, unspecified	885
		8	Gastritis, unspecified	762
		9	Supervision of other normal pregnancy	588
		10	Supervision of normal first pregnancy	520
3	doko	1	Essential (primary) hypertension	1375
		2	Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	1293
		3	Gastritis and duodenitis	918
		4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	913
		5	Hypertensive heart disease	744
		6	Fever of other and unknown origin	732
		7	Epidemic myalgia	530
		8	Acute nasopharyngitis [common cold]	343
		9	Cough	334
		10	Allergic contact dermatitis	328
4	kesamben	1	ISPA	6119
		2	myalgia	2181
		3	cedera	1462

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
		4	niidm	1263
		5	iddm	844
		6	niddm tanpa komplikasi	837
		7	schizofrenia	769
		8	HIPERTENSI	601
		9	penyakit jantung	577
		10	dispepsia	542
5	boro	1	penyakit kulit alergi	365
		2	common cold	421
		3	myalgia	426
		4	nyeri kepala	614
		5	ISPA	635
		6	influenza	665
		7	niddm	680
		8	gastritis dan duodenitis	767
		9	rematik arthritis lain	1413
		10	hipertensi	4309
6	bacem	1	ISPA	1659
		2	pemeriksaan kehamilan	1001
		3	cek up kesehatan	882
		4	gangguan jiwa	626
		5	ht	583
		6	rematik arthritis lain	533
		7	gigi	428
		8	dm	424
		9	gigi	414
		10	panas	371
7	gandusari	1	headache	15747
		2	myalgia	5393
		3	gastritis	3892
		4	hipertensi	2455
		5	niddm	1353
		6	cough	1163
		7	follow up	406
		8	ibu hamil normal	312
		9	gastritis	198

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
		10	common cold	116
8	selopuro	1	hipertensi	2675
		2	ISPA	1393
		3	niddm	1384
		4	gigi	1118
		5	ARTHRITIS	1094
		6	ispa	1053
		7	gastritis	977
		8	common cold	706
		9	myalgia	651
		10	myalgia, multiple	573
9	suruhwadang	1	pemeriksaan umum	351
		2	ISPA	443
		3	rheumatoid arthritis	363
		4	hipertensi	307
		5	gastritis	223
		6	diabetes	184
		7	dermatitis alergi	128
		8	fever	109
		9	headache	96
		10	other innerear disease	76
10	wates	1	Darah tinggi primer	5574
		2	Badan capek dan pegal-pegal	2044
		3	ISPA	1653
		4	Nyeri kepala	1348
		5	DM (NDDM)	1291
		6	Gastritis dan Deodenitis	603
		7	Rematik Aritis	450
		8	Schisofrenik	428
		9	Gangguan faal alat pencernaam	268
		10	Demam	213
11	slumbung	1	ISPA	971
		2	hipertensi	741
		3	cedera	559
		4	gastritis	421
		5	faringitis	365

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
		6	niddm	349
		7	gigi	302
		8	dispepsia	302
		9	myalgia	302
		10	common cold	257
12	wonotirto	1	ISPA	1407
		2	gastritis	804
		3	hipertensi	615
		4	arthritis	324
		5	niddm	320
		6	gigi	261
		7	cephalgia	244
		8	apikal gigi kronis	225
		9	influenza	212
		10	diare	201
13	bakung	1	Essential (primary) hypertension	1.195
		2	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	944
		3	Acute nasopharyngitis [common cold]	841
		4	Other acute gastritis	525
		5	Myalgia	424
		6	Schizophrenia	250
		7	Resporatory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed	115
		8	Asthma	114
		9	Hypertensive heart disease	108
		10	Stroke, Not specified as harmorrhage or infarction	60
14	udanawu	1	common cold	991
		2	hipertensi	466
		3	dispepsia	276
		4	gigi	195
		5	abses gigi	153
		6	arthritis	148
		7	pulpa	142
		8	fever	125
		9	lbp	102
		10	injury	96

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
15	sanankulon	1	ISPA	2338
		2	hipertensi	2070
		3	niddm	1079
		4	gastritis	978
		5	fever	704
		6	Allergic contact dermatitis	600
		7	pulpitis	562
		8	headache	559
		9	myalgia	438
		10	hipercholesterol	414
16	wonodadi	1	hipertensi	1810
		2	ISPA	1610
		3	pemeriksaan umum	1554
		4	niddm	1125
		5	myalgia	1030
		6	schizofrenia	998
		7	common cold	819
		8	gigi	738
		9	pemeriksaan kehamilan	704
		10	ISPA	693
17	panggungrejo	1	myalgia	2489
		2	ISPA	2399
		3	HT	2268
		4	gastritis	1321
		5	dm	1204
		6	dispepsia	933
		7	Demam	764
		8	influenza	521
		9	malaise	485
		10	diare	345
18	ponggok	1	ISPA	1767
		2	gastritis	892
		3	hipertensi	771
		4	cough	488
		5	niddm	400
		6	myalgia	397

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
		7	hipercholesterol	388
		8	myalgia	373
		9	myalgia	370
		10	common cold	356
19	wlingi	1	ISPA	1271
		2	hipertensi	815
		3	commoncol	675
		4	gout	643
		5	gigi	589
		6	niddm	583
		7	gastritis	583
		8	myalgia	422
		9	schizofrenia	362
		10	heart failure	342
20	Srengat	1	ISPA	1907
		2	hipertensi	1874
		3	myalgia	1183
		4	DM	1183
		5	pulpitis	700
		6	gastritis	627
		7	reumatik	490
		8	Stroke, Not specified as harmorrhage or infarction	700
		9	dermatitis atopik	442
		10	erupsi gigi	325
21	nglegok	1	hipertensi	1413
		2	DM	624
		3	ISPA	2563
		4	schizofrenia	387
		5	gastritis	758
		6	superfision niormal pregnancy	585
		7	necrosis of pulp	585
		8	HIV	182
		9	gatriitis	300
		10	niddm	152
22	garum	1	ISPA	3322
		2	hipertensi	2354

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
		3	myalgia	1225
		4	DM	1023
		5	gastritis	872
		6	rheumatic	818
		7	febris	549
		8	pulpitis	377
		9	diare	306
		10	demam typoid	260
23	kanigoro	1	hipertensi	2501
		2	rematik artitis	1633
		3	DM	1161
		4	common cold	1137
		5	ISPA	1066
		6	gastritis	812
		7	schizofrenia	772
		8	penyakit kulit alergi	612
		9	Badan capek dan pegal-pegal	363
		10	demam	261
24	sutojayan	1	myalgia	4792
		2	hipertensi	3657
		3	common cold	2925
		4	Badan capek dan pegal-pegal	2358
		5	niddm	1952
		6	Nyeri kepala	1520
		7	gastritis	1217
		8	schizofrenia	1067
		9	demam	978
		10	ISPA	836
25	binangun	1	malaise	688
		2	ISPA	498
		3	gastritis	426
		4	hipertensi	423
		5	myalgia	416
		6	common cold	349
		7	disorder of lipoprotein	333
		8	disorder of purin	323

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No	Puskesmas	No	Jenis Penyakit	Jumlah
		9	fever	278
		10	headache	268

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

3.3.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPALD

Capaian akses pelayanan air limbah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 yaitu 100% terlayani air limbah dengan rincian 10,4% belum terlayani akses layak, 91,13% merupakan akses layak dan sudah termasuk akses aman. Pada tahun tersebut praktek BABS pada Kabupaten Blitar sudah 0%.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPALD Tahun 2024

No	Sistem	Cakupan Layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,67%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	22,86%
	Akses Layak Bersama	1,10%
C	Akses Belum Layak*	1,93%
	BABS Tertutup	
D	BABS di tempat Terbuka	0%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,71%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	58,33%
	Akses Layak Bersama	3,90%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa – Cubluk)	1,02%
C	Akses Belum Layak*	6,72%
	BABS Tertutup	
D	BABS di tempat Terbuka	0%

3.3.4 Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPALD

3.3.4.1 Aspek Teknis

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Blitar menurut aspek teknis, menggunakan jenis pengolahan setempat baik individu maupun komunal yaitu berupa tangki septik, MCK+, dan MCK yang dilengkapi dengan IPAL. Serta menggunakan jenis pengolahan terpusat skala permukiman berupa IPAL komunal.

SPALD-Setempat

SPALD-S Kabupaten Blitar terdiri dari beberapa sub-sistem, antara lain sebagai berikut :

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat

1. Skala Individu

Berdasarkan data RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045, persentase akses sanitasi layak di Kabupaten Blitar tahun 2023 mencapai 82,10% dan sudah ODF (*Open Defecation Free*) atau 0% BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Berdasarkan hasil survey kuesioner kepada 100 warga Kabupaten Blitar, air limbah domestik buangan dari kamar mandi, dapur, dan tempat cuci langsung dibuang ke saluran drainase tertutup. Konstruksi bangunan pengolahan setempat black water (tinja) atau WC untuk skala individu yang ada di Kabupaten Blitar berupa beton atau pasangan batu bata serta tangki septik fabrikasi. Sebagian besar tangki septik yang dimiliki masyarakat dibangun lebih dari 5 tahun, namun hanya sedikit warga yang pernah mengurus tangki septik tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tangki septik yang dibangun tidak kedap/tidak sesuai standar SNI dimana dalam jangka waktu 2-3 tahun dilakukan pengurasan. Untuk saat ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan terkait akses sanitasi 2024, sebanyak 381.191 KK telah terlayani akses layak dan terdapat 49.675 KK belum layak.

2. Skala Komunal

Kabupaten Blitar memiliki 144 unit tangki septik komunal 5-10 KK yang tersebar di seluruh kecamatan. Hingga saat ini kondisi unit tangki septik tersebut masih baik, dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun ada kendala beberapa kali terjadi meluap di *watercloset* (WC) akibat salurannya tersumbat. Kondisi bangunan MCK sebagian besar masih cukup baik, namun jumlah pemanfaatnya semakin menurun dikarenakan masyarakat disekitar MCK yang dulunya tidak punya kamar mandi maupun jamban kini sudah memiliki sendiri.

b. Sub-sistem Pengangkutan

Armada pengangkutan SPALD-S berupa truk penyedot tinja. Pemerintah Kabupaten Blitar belum memiliki truk penyedot tinja. Namun di Kabupaten Blitar terdapat jasa penyedotan tinja swasta yang beroperasi melayani wilayah Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyedia jasa penyedotan tinja swasta diperoleh permasalahan sebagai berikut :

- Tidak setiap hari ada penyedotan, dalam 1 bulan peneydia melakukan 25-30 kali penyedotan;
- Paling banyak pelanggan di daerah Kabupaten;
- Karena Kabupaten Blitar belum memiliki IPLT, maka lumpur tinja yang disedot kemudian dibawa ke IPLT Kota Blitar namun terkadang di keringkan di lahan kosong dan kemudian dibuat pupuk;

c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Kabupaten Blitar belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Untuk kegiatan pengolahan lumpur tinja pihak Kabupaten Blitar telah memiliki MoU dengan Kota Blitar, sehingga kegiatan pengolahan lumpur tinja sementara di arahkan ke IPLT Kota Blitar.

SPALD-Terpusat

Kabupaten Blitar telah memiliki IPAL Komunal yang tersebar di 22 Kecamatan. SPALD-T terdiri dari beberapa sub-sistem, antar lain :

- a. Sub-sistem Pelayanan
- b. Sub-sistem Pengumpulan
- c. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
2. Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
3. Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat terdiri dari sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kabupaten Blitar dengan menggunakan IPAL Komunal / IPAL Skala Permukiman. Air limbah domestik dari sumbernya dialirkan melalui perpipaan. Dalam pengaliran air limbah domestik tersebut biasanya menggunakan sistem gravitasi dan kemudian diolah di bangunan IPAL.

Kabupaten Blitar memiliki 144 IPAL komunal dan sebagian MCK+ yang tersebar di beberapa desa/kelurahan. Berdasarkan hasil survey semua berfungsi dengan baik. Beberapa IPAL komunal dan MCK+ dikelola oleh KSM berdasarkan SK kepala dinas. Kondisi eksisting bangunan SPALD-T berdasarkan survey yang telah dilakukan diperoleh permasalahan yang sebagian besar dialami yakni terjadi penyumbatan pada manhole akibat dari masuknya sampah. Ada beberapa KSM yang melakukan penarikan iuran sebesar Rp.3000 – Rp.5000 per KK, namun sebagian besar tidak melakukan penarikan iuran. Hampir seluruh KSM mengharapkan bantuan penyedotan lumpur tinja pada pemerintah.

3.3.4.2 Aspek Pengaturan

Perangkat peraturan perundangan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman secara Nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut menyatakan bahwa

penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. Aspek pengaturan yang sudah ditetapkan nantinya diharapkan dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah baik yang dari aktifitas rumah tangga maupun industri rumah tangga yang berada di tengah-tengah permukiman.

Pemerintah Kabupaten Blitar hingga saat ini belum memiliki regulasi spesifik terkait pengelolaan air limbah domestik. Hal ini menyebabkan air limbah domestik belum dikelola sesuai standar teknis dan pelayanan minimal untuk pengelolaan limbah domestik. Sanksi bagi setiap badan usaha atau perseorangan yang melakukan pencemaran lingkungan ataupun belum memiliki pengolahan air limbah domestik sampai saat ini juga belum ada, sehingga masih banyak badan air yang mengalami penurunan kualitas karena air limbah baik *black water* maupun *grey water*. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah. Sehingga kedepannya masyarakat dan pemerintah daerah memerlukan pengaturan dan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik yang komprehensif mulai dari pengelolaan dari hulu ke hilir, tugas dan tanggung jawab serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Jumlah permukiman/perumahan baru semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Blitar. Pengelolaan air limbah di perumahan-perumahan baru yang kurang memadai akan turut menambah tingkat pencemaran lingkungan. Sehingga diperlukan pengaturan yang mengatur agar perumahan-perumahan baru diwajibkan untuk mengelola air limbah domestiknya masing-masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar memiliki surat kesepakatan kerja terkait retribusi jasa penyedotan limbah kakus dan non kakus dengan pihak swasta. Surat kesepakatan kerja tersebut dibuat atas tindaklanjut MoU dengan IPLT Kota Blitar terkait jasa pengangkutan lumpur tinja Kabupaten Blitar ke IPLT Kota Blitar. Nantinya ketika IPLT Kabupaten Blitar sudah terbangun, dapat dilakukan kajian kelayakan apakah surat kesepakatan kerja tersebut masih relevan untuk diterapkan saat ini atau tidak.

Pencemaran air permukaan air limbah domestik sampai saat ini sudah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan kualitas air sungai dan sumber air bersih yang sudah diperiksa. Hal ini juga merupakan permasalahan aspek pengaturan untuk pengelolaan air limbah dari permukiman dan perlu segera direalisasikan.

3.3.4.3 Aspek Kelembagaan

Lembaga atau instansi yang menangani air limbah dalam hal perencanaan dan pembangunan sarana pengelolaan limbah di Kabupaten Blitar yaitu :

- Sekretaris Daerah
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Masing-masing dinas memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang membawahi. Untuk fungsi regulator dalam perumusan dan pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan, BAPPEDALITBANG memiliki peran dalam hal tersebut. Sedangkan fungsi operator dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan. Dan fungsi pengawasan/monitoring kualitas lingkungan dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengelola air limbah sudah menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksi. Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam aspek kelembagaan adalah jumlah personil dan SDM yang ada masih sangat terbatas, sehingga perlu ada peningkatan dalam keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan air limbah.

Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah agar berjalan dengan lancar, kelembagaan pengelola perlu himbauan/keharusan telah siap saat prasarana dan sarana telah terbangun. Khususnya terhadap prasarana dan sarana yang investasinya dibantu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah wajib berkontribusi menyiapkan perangkat penyelenggaranya agar yang terbangun dapat beroperasi dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini umumnya menjadi bagian dari kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendapatkan bantuan.

Pelaksanaan tugas pokok yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan khususnya penanganan air limbah domestik terbagi dalam beberapa program. Dalam rangka menyeragamkan program secara berkesinambungan, masing-masing dinas sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program sanitasi khususnya air limbah, belum ada sebuah organisasi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang membidangi hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Saat ini Lembaga pengelola menjalankan pengelolaan air limbah terfokus pada

penyelenggaraan pembangunan saja, belum menjalankan fungsi pemeliharaan dengan baik. Pengelola air limbah di bawah Seksi Sumber Daya Air (SDA), sehingga juga berfokus pada bidang lain, staff yang ada biasanya juga membantu pekerjaan di seksi lain dalam satu bidang Sumber Daya Air. Jumlah personil atau SDM yang ada masih sangat terbatas dan belum banyak yang pernah mengikuti pelatihan untuk pengelolaan air limbah domestik. Selain itu Pemerintah Kabupaten Blitar juga belum memiliki SOP dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah yang sudah terbangun.

3.3.4.4 Aspek Keuangan

Upaya pengelolaan air limbah membutuhkan pembiayaan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan sampai pengoperasian. Sejauh ini sumber dana yang dipakai untuk mendanai upaya tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar dan DAK.

Dalam pengelolaan limbah domestik Kabupaten Blitar dukungan pendanaan dalam pengelolaan air limbah, ditunjukkan dengan masih kecilnya usulan pembangunan di sektor air limbah. Menurut SSK Kabupaten Blitar tahun 2023-2027 belanja sanitasi untuk air limbah domestik rata-rata pertumbuhan dari tahun 2017-2021 yaitu -6,08% dengan kondisi pendanaan yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Selain itu tidak ada anggaran khusus dari Pemda Kabupaten Blitar untuk pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang sudah terbangun, dan anggaran pembinaan terhadap KSM.

3.3.4.5 Aspek Peran Serta Masyarakat/Swasta

Berdasarkan SSK tahun 2022, Kabupaten Blitar telah memiliki 91 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 248 desa/kelurahan. KSM tersebut merupakan organisasi pengelola sarana-prasarana air limbah di Kabupaten Blitar antara lain Tangki Septik Komunal, MCK Plus, MCK+ IPAL Komunal, dan IPAL yang dibangun mulai tahun 2004 hingga tahun 2024 dan merata tersebar di 22 kecamatan. Dari sisi kualitas, perlu dilakukan pengarahan atau pelatihan agar masyarakat dapat secara mandiri mengelola air limbah dengan prosedur yang sesuai. Peran serta swasta dalam bentuk kerjasama pemerintah daerah dan swasta juga perlu menunggu berjalannya pengelolaan air limbah domestik makin menunjukkan bidang air limbah domestik sebagai bidang yang layak (*feasible*) untuk investasi.

Kabupaten Blitar mengajak pihak swasta dalam melakukan pengolahan air limbah. Salah satu contoh terdapat 7 unit penyedia penyedotan lumpur tinja oleh pihak swasta. Dari 7 unit tersebut terdapat 3 unit penyedia termasuk pengusaha sedot tinja mandiri dari Pak Ikhsan Sunarto yang memiliki surat kesepakatan Kerjasama dengan pihak Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Namun, peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman masih

kurang dan terbatas, karena tidak ada pembinaan dan pemantuan dari pemerintah daerah. KSM sudah ada, tetapi belum ada pembinaan yang intensif dari pemerintah. Hal ini juga disebabkan oleh tidak adanya anggaran dalam pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang sudah terbangun. Selain itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kegiatan pengelolaan lumpur tinja.

3.3.5 Potensi Aspek Teknik

Berdasarkan hasil survey kuesioner diperoleh informasi bahwa tingkat kesediaan/kemauan masyarakat untuk melakukan penyedotan masih terbilang rendah yaitu 40%. Hal ini dapat ditingkatkan melalui edukasi oleh Dinas Kesehatan terkait pentingnya melakukan pengelolaan air limbah domestik. Kabupaten Blitar memiliki 154 sarana SPALDS yang sudah dibangun pemerintah dan 144 sarana SPALDT yang tersebar di beberapa desa/kelurahan. Berdasarkan hasil survey semua berfungsi dengan baik. Beberapa IPAL komunal dan MCK+ dikelola oleh KSM berdasarkan SK kepala dinas. Permasalahan yang sebagian besar dialami yakni terjadi penyumbatan pada manhole akibat dari masuknya sampah.

3.3.6 Potensi Aspek Keuangan

Potensi pada aspek keuangan/pendanaan yaitu dengan adanya pembangunan IPLT Kabupaten Blitar, nantinya akan membuka peluang untuk memperoleh dana hibah air limbah baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang ingin berinvestasi. Menurut SSK Kabupaten Blitar tahun 2023-2027 belanja sanitasi untuk air limbah domestik rata-rata pertumbuhan dari tahun 2017-2021 yaitu -6,08% dengan kondisi pendanaan yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Untuk tahun 2023-2027 asumsi pertumbuhan biaya operasional/pemeliharaan untuk air limbah sebesar 20%. Bantuan dari swasta melalui kegiatan CSR yang dapat digunakan untuk pengadaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik.

3.3.7 Potensi Aspek Kelembagaan

Potensi pada aspek kelembagaan yaitu sudah terbentuknya fungsi Lembaga dalam pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, sudah ada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) namun perlu didukung lembaga pengelolaan dan pemeliharaan dari pemerintah.

3.3.8 Potensi Aspek Peran Serta Masyarakat

Bangunan IPAL Komunal yang telah terbangun dikelola oleh masyarakat yang ikut menyumbang sehingga timbul rasa memiliki / rasa peduli. Terdapat kelompok pengelola oleh masyarakat dalam bentuk KSM dan KPP selain itu, adanya peran serta dari 7 (tujuh) pengusaha jamban swasta di Kabupaten Blitar. Salah satunya adalah Pak Ikhsan Sunarto selaku pengusaha jamban mandiri yang masih aktif melakukan kegiatan penyedotan.

3.3.9 Potensi Aspek Peraturan

Pemerintah daerah Kabupaten Blitar telah menjalin Kerjasama dengan Pemda IPLT Kota Blitar terkait pembuangan lumpur tinja. Selain itu pemda Kabupaten Blitar telah ber MoU dengan beberapa penyedia jasa sedot tinja yang didalamnya terdapat tarif retribusi penyedotan. Namun jika nanti saat IPLT sudah terbangun dan berfungsi, perlu dilakukan pengkajian ulang.

BAB IV

PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1 PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Blitar ditinjau dari beberapa aspek antara lain aspek teknis, peran serta masyarakat, pendanaan/keuangan, pengaturan, dan kelembagaan pengelola. Isu tersebut dikembangkan secara spesifik menurut kondisi daerah dari target awal SDGs (poin ke 6) dimana ketersediaan air minum dan sanitasi direncanakan untuk pelayanan secara menyeluruh. Secara detail isu-isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aspek Teknis

- Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah domestik melalui sistem setempat (*SPALD-S*) dan melalui sistem terpusat (*SPALD-T*) belum tercapai, baik akses layak maupun aman. Perlu ditambah pengolahan *grey water* untuk masyarakat.
- Belum memiliki IPLT
- Belum memiliki armada penyedotan tinja.
- Tingkat kepemilikan *Septic Tank* yang sesuai standar masih rendah, terbukti tingkat penyedotan tinja yang masih rendah.

2. Aspek Pengaturan

- Belum adanya perangkat peraturan perundangan utamanya Perda Air Limbah yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman.
- Program pembuatan peraturan perundangan masih belum termasuk program utama Pemerintah Daerah karena pencemaran akibat air limbah belum dirasakan.
- Belum tersosialisasinya Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air limbah.

3. Aspek Kelembagaan

- Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah domestik melalui sistem setempat (*SPALD-S*) dan melalui sistem terpusat (*SPALD-T*) belum tercapai, baik akses layak maupun aman.
- Belum memiliki IPLT
- Belum memiliki armada penyedotan tinja.
- Tingkat kepemilikan *Septic Tank* yang sesuai standar masih rendah, terbukti tingkat penyedotan tinja yang masih rendah.

4. Aspek Keuangan

- a. Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat.
- b. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah;
- c. Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman.
- d. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta.
- e. Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
- f. Tidak ada anggaran khusus pemeliharaan sarana prasarana air limbah yang sudah terbangun.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
- b. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat; dan
- c. Potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha terkait sistem pengelolaan air limbah permukiman belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik data sekunder maupun data primer, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Blitar antara lain sebagai berikut :

Teknis :

1. Jumlah masyarakat yang akses sanitasinya belum layak masih mencapai 10% atau sekitar 49.675 KK, sedangkan jumlah akses aman masih mencapai 1,94%.
2. Sebagian besar masyarakat (67%) memiliki sumur yang berjarak < 10 m dari tangki septik. Padahal mayoritas masyarakat memanfaatkan air sumur sebagai sumber air bersih dan tidak menutup kemungkinan air yang digunakan terjadi pencemaran dan terdapat kadar *e-coli*.
3. Pengelolaan grey water oleh masyarakat masih ada yang langsung diresapkan ke tanah yaitu sebesar 58%.
4. Mayoritas masyarakat sudah memiliki tangki septik namun 48% -nya tidak sesuai standar SNI, dan 86% tangki septik yang sudah terbangun tidak pernah dilakukan penyedotan lumpur tinja.
5. Jumlah IPAL Komunal sekitar 124 unit yang merupakan IPAL sanimas dan LPK namun kualitas efluen IPAL Komunal belum diperiksa secara rutin.
6. Sebaran IPAL dan SPALD-S belum merata, di bagian selatan masih belum dilayani IPAL.

7. Pemda belum memiliki armada truk tinja meskipun sudah ada 7 jasa truk tinja swasta yang mana 3 jasa sudah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan pemda Kabupaten Blitar.
8. Kabupaten Blitar masih belum memiliki IPLT.
9. Rata-rata penyedotan oleh truk tinja swasta sekitar 25-30 kali dalam 1 bulan (tidak setiap hari). Sedangkan lumpur tinja masih banyak dibuang ke kebun sebagai pupuk dan belum banyak yang membuang ke IPLT meskipun pemda Kabupaten Blitar telah memiliki kerjasama dengan IPLT Kota Blitar.
10. Perkembangan perkotaan dalam wilayah perdesaan serta permukiman baru di Kabupaten Blitar bertumbuh pesat.

Kelembagaan :

1. Sebagian KPP belum ada akta notaris sehingga menjadi salah satu penghambat CSR untuk memberikan bantuan.
2. Kelembagaan pengelola khusus operator (UPTD) belum ada.

Pembiayaan :

1. Pemerintah Kabupaten Blitar belum bisa memberikan stimulan karena rekening belanja belum ada dan aset prasarana SPALD sudah diserahkan ke masyarakat.
2. IPAL Komunal banyak yang penuh tetapi tidak ada kemampuan untuk melakukan pengurasan.

Pengaturan :

1. Belum ada peraturan utama tentang pengelolaan air limbah domestik, sehingga masih banyak pelanggaran.
2. Masih ada jasa swasta (4 dari 7 jasa swasta) yang masih belum bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Peran Serta Masyarakat :

1. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah masih rendah yaitu 62%.
2. Warga yang tidak bersedia menyedot tangki septik sebesar 60%, warga hanya akan melakukan penyedotan lumpur tinja apabila terdapat masalah saja, misalnya terjadi penyumbatan atau tangki septik penuh.

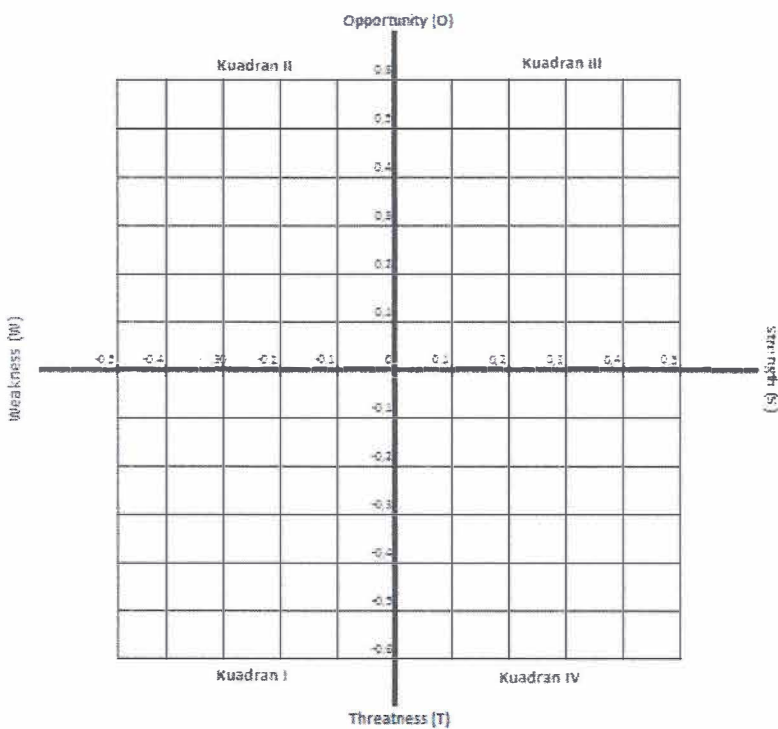
4.2 ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPALD DENGAN METODE SWOT

Arah pengembangan sistem pengelolaan air limbah dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran yang terdiri dari:

- Mengoptimalkan sistem setempat (SPALD-S) yang sudah berjalan (kuadran I)

- Mengembangkan selektif sistem terpusat (SPALD-T) (kuadran II)
- Mengembangkan agresif sistem terpusat (SPALD-T) (kuadran III)
- Mengembangkan prasarana dan sarana SPALD dengan teknologi maju (kuadran IV)

Salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan arah pengembangan yaitu dengan metode SWOT yang mencakup Analisis Kekuatan/*Strengths*, Kelemahan/*Weakness*, Peluang/*Opportunities*, dan Ancaman/*Threats*. Setelah dilakukan analisis SWOT selanjutnya pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat dipetakan pada salah satu dari 4 kuadran yang sudah ada. Posisi hasil analisis SWOT untuk pengembangan sistem pengelolaan air limbah pada kuadran yang ada dapat dijelaskan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Kuadran Pemilihan dan Penetapan Arah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Sumber: Analisis Konsultan, 2025)

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) merupakan alat bantu perencanaan strategis dalam menetapkan arah pengembangan sistem pengelolaan air limbah di masa yang akan datang. Analisis SWOT untuk peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah pada zona prioritas dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- Aspek Teknis
- Aspek Keuangan
- Aspek Kelembagaan
- Aspek Peran Serta Masyarakat
- Aspek Pengaturan

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Berdasarkan identifikasi permasalahan (kelemahan dan ancaman) serta analisis potensi (peluang dan kekuatan) yang terdapat pada kondisi eksisting wilayah perencanaan, selanjutnya dilakukan analisis SWOT yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Analisis *Strenght, Weakness, Opportunity*, dan *Threatness* (SWOT)

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threatness</i>)
- Kabupaten Blitar telah memiliki 144 SPALD-T, serta 154 titik (3.715 unit) tangki septik bantuan baik individual maupun komunal. Sebagian besar (>90%) sarana-prasarana air limbah yang terbangun masih berfungsi dengan baik dengan masih tersedianya idle capacity - Akses sanitasi layak cukup tinggi yaitu 87,9% (tahun 2023) dan BABS mencapai 0% - Tersedianya lahan untuk pembangunan IPLT - IPAL Komunal dikelola oleh masyarakat sehingga timbul rasa memiliki (peduli) - Pemda Kabupaten Blitar telah menjalin Kerjasama dengan Pemda IPLT Kota Blitar terkait pembuangan lumpur tinja. Menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah terhadap sanitasi - Adanya peraturan yang mewajibkan perumahan baru untuk memiliki IPAL Komunal - Sudah adanya KSM, namun perlu didukung Lembaga pengelolaan dan pemeliharaan dari pemerintah	- Akses aman baru mencapai 1,94%, karena sebagian besar tangki septik masyarakat belum sesuai SNI dan tidak melakukan penyedotan berkala - Belum memiliki IPLT - Armada penyedotan tinja hanya dari swasta, pemda belum memiliki - Kurangnya pembinaan atau pelatihan dari pemerintah terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sarana-prasarana air limbah (IPAL/MCK+) - Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah masih rendah yaitu 38% - Belum ada Perda utama yaitu Perda Air Limbah yang diperlukan dalam system pengelolaan air limbah permukiman - Belum adanya monitoring/controlling terhadap MoU dan peraturan peraturan yang ada terkait air limbah domestik - Belum ada Perda Pajak dan Retribusi Daerah mengatur retribusi terkait ALD - Jumlah SDM dalam melaksanakan pengeloaan air limbah permukiman masih terbatas/kurang - Belum ada lembaga khusus yang menangani tentang air limbah domestik (sebagai operator)	- Jasa penyedotan tinja swasta di Kabupaten Blitar sebanyak 7 truk, dan yang sudah ber-MoU dengan pemda yaitu 3 jasa swasta - Adanya perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki IPAL domestik - Kolaborasi antar perguruan tinggi, sector swasta, dan komunitas memungkinkan untuk adanya dukungan dan inovasi dalam kegiatan CSR air limbah - Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan PHBS untuk seluruh stakeholder pelaksana pengelolaan air limbah domestik - Adanya kebijakan pendukung berupa RPJPD, RPJMD, dan RTRW yang mendukung peningkatan dan pembangunan SPALD - Potensi retribusi daerah jika ketentuan retribusi daerah sudah masuk dalam Perda dan IPLT sudah terbangun - Kolaborasi pembangunan infrastruktur air limbah terpusat dan setempat menggunakan pendanaan APBD dan APBN	- Pertumbuhan penduduk yang relative cepat dapat mempengaruhi kapasitas system air limbah yang direncanakan - Perkotaan dalam perdesaan serta permukiman baru banyak tumbuh (perumnas). Aplikasi IPAL Komunal di lingkungan padat dengan kondisi geoteknik berpasir - Resistensi sosial budaya, penolakan masyarakat terhadap pembangunan IPAL atau IPLT karena stigma, ketidaktahuan, atau kekhawatiran dampak lingkungan - Pergantian kepada daerah atau arah kebijakan bisa menggeser fokus dari sanitasi ke sektor lain - Legalitas KPP sebagai organisasi pengelola sarpras masih terbatas sehingga bantuan belum diberikan misalkan jika ada CSR - Belum ada sektor swasta yang melakukan investasi di bidang air limbah

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threatness</i>)
	• Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman • Sebagai KPP belum ada akta notaris sehingga untuk akses missal CSR bantuan belum bisa masuk • Masih minimnya pendanaan dalam mendukung capaian target pelayanan air limbah domestik • Tidak adanya anggaran khusus pemeliharaan sarana-prasarana air limbah yang sudah terbangun dan anggaran pembinaan terhadap KSM • Pemerintah belum bisa memberikan stimulant karena rekening belanja belum ada dan asset prasarana SPALD sudah diserahkan ke masyarakat	• Mendorong peran sektor swasta dalam melakukan pendanaan dan pengelolaan air limbah domestik • Peran swasta dalam pemenuhan sanitasi layak dan aman untuk SPALDS sudah ada pengusaha jamban mandiri. Untuk SPALDT ada perusahaan yang membuat IPAL domestik untuk lingkungan usaha. Pembiayaan sanitasi -> teknologi yang murah -> rencana bisnis sanitasi • Bisnis plan pada pembangunan jamban mandiri dengan sedot WC yang meibatkan customer demand activator dan pengusaha sanitasi	

(Sumber: Hasil Analisis, 2025)

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

Berdasarkan parameter-parameter dalam analisis SWOT tersebut di atas kemudian dilakukan pembobotan untuk penentuan arah pengembangan pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Blitar. Pembobotan dilakukan berdasarkan besarnya pengaruh tiap-tiap parameter pada analisa SWOT dalam pengelolaan limbah rumah tangga di Kabupaten Blitar yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Matriks Pembobotan Analisis SWOT Berdasarkan Hasil Analisis

No	Parameter	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh
INTERNAL				
Kekuatan (Strength)				
Teknis				
1	Kabupaten Blitar telah memiliki 144 SPALD-T, serta 154 tiuk (3.715 unit) Tangki septik bantuan baik individual maupun komunal. Sebagian besar (>90%) sarana-prasarana air limbah yang terbangun masih berfungsi dengan baik	14,3%	3	0.429
2	Akses sanitasi layak cukup tinggi yaitu 87,9% (tahun 2023) dan BABS mencapai 0%.	14,3%	3	0.429
3	Tersedianya lahan untuk pembangunan IPLT	14,3%	3	0.429
Peran Serta Masyarakat				
1	IPAL Komunal dikelola oleh masyarakat sehingga timbul rasa memiliki (peduli).	14,3%	2	0.286
Peraturan				
1	Pemda Kabupaten Blitar telah menjalin kerjasama dengan Pemda IPLT Kota Blitar terkait pembuangan lumpur tinja. Menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah terhadap sanitasi.	14,3%	2	0.286
2	Adanya peraturan yang mewajibkan perumahan baru untuk memiliki IPAL Komunal.	14,3%	2	0.286
Kelembagaan				

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Parameter	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh
1	Sudah adanya KSM, namun perlu didukung lembaga pengelola dan pemeliharaan dari pemerintah	14,3%	2	0.286
Jumlah		100%	-	2,4
Kelemahan (Weakness)				
Teknis				
1	Akses aman baru mencapai 1,94%, karena sebagian besar tangki septik masyarakat belum sesuai SNI dan tidak melakukan penyedotan berkala	0,67%	3	0.20
2	Belum memiliki IPLT	0,67%	4	0.27
3	Armada penyedotan tinja hanya dari swasta, pemda belum memiliki.	0,67%	2	0.13
Peran Serta Masyarakat				
1	Kurangnya pembinaan atau pelatihan dari pemerintah terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sarana-prasarana air limbah (IPAL/MCK+)	0,67%	2	0.13
2	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah masih rendah yaitu 38%.	0,67%	3	0.20
Peraturan				
1	Belum ada Perda utama yaitu Perda Air Limbah yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman, dan.	0,67%	4	0.27
2	Belum adanya monitoring/controlling terhadap MoU dan peraturan yang ada terkait air limbah domestik.	0,67%	3	0.20
3	Belum ada Perda Pajak & Retribusi Daerah mengatur retribusi terkait ALD	0,67%	2	0.13
Kelembagaan				
1	Jumlah SDM dalam melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih terbatas/kurang.	0,67%	2	0.13
2	Belum ada lembaga khusus yg menangani tentang air limbah domestic (sebagai operator)	0,67%	3	0.20

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Parameter	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh
3	Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman.	0,67%	2	0.13
4	Sebagai KPP belum ada akta notaris sehingga untuk akses misal CSR bantuan belum bisa masuk	0,67%	2	0.13
Keuangan				
1	Masih minimnya pendanaan dalam mendukung capaian target pelayanan air limbah domestic.	0,67%	4	0.27
2	Tidak ada anggaran khusus pemeliharaan sarana-prasarana air limbah yang sudah terbangun dan anggaran pembinaan terhadap KSM.	0,67%	3	0.20
3	pemerintah belum bisa memberikan stimulan karena rekening belanja belum ada dan aset prasarana SPALD sudah diserahkan ke masyarakat	0,67%	2	0.13
Jumlah		100%	-	2.73
SELISIH KEKUATAN DAN KELEMAHAN				-0,.23
EKSTERNAL				
Peluang (Opportunities)				
Teknis				
1	Jasa penyedotan tinja swasta di Kabupaten Blitar sebanyak 7 truk, dan yang sudah ber-MoU dengan pemda yaitu 3 jasa swasta.	10%	3	0,30
2	Adanya perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki IPAL Domestik	10%	3	0,30
Peran Serta Masyarakat				
1	Kolaborasi antar perguruan tinggi, sector swasta, dan komunitas memungkinkan untuk adanya dukungan dan inovasi dalam kegiatan CSR air limbah	10%	2	0,20

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Parameter	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh
2	Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan PHBS untuk seluruh stakeholder pelaksana pengelolaan air limbah domestik	10%	2	0,20
Peraturan				
1	Adanya kebijakan pendukung berupa RPJPD, RPJMD, dan RTRW yang mendukung peningkatan dan pembangunan SPALD	10%	3	0,30
2	Potensi retribusi daerah jika ketentuan retribusi daerah sudah masuk dalam Perda dan IPLT sudah terbangun	10%	3	0,30
Keuangan				
1	Kolaborasi pembangunan infrastruktur air limbah terpusat dan setempat menggunakan pendanaan APBD dan APBN	10%	3	0,30
2	Mendorong peran sektor swasta dalam melakukan pendanaan dan pengelolaan air limbah domestik	10%	2	0,20
3	Peran swasta dalam pemenuhan sanitasi layak dan aman untuk SPALDS sudah ada pengusaha jamban mandiri. Untuk SPALDT ada perusahaan yang membuat IPAL domestik untuk lingkungan usaha. Pembiayaan sanitasi -> teknologi yang murah -> rencana bisnis sanitasi	10%	2	0,20
4	Bisnis plan pada pembangunan jamban mandiri dengan sedot WC yang meibatkan customer demand activator dan pengusaha sanitasi	10%	3	0,30
Jumlah		100%		2,60
Threats (Ancaman)				
Teknis				
1	Pertumbuhan penduduk yang relative cepat dapat mempengaruhi kapasitas system air limbah yang direncanakan	17%	3	0,50
2	Perkotaan dalam perdesaan serta permukiman baru banyak tumbuh (perumnas). Aplikasi IPAL Komunal di lingkungan padat	17%	3	0,50
Peran Serta Masyarakat				

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

No	Parameter	Bobot	Tingkat Pengaruh	Perkalian Bobot dan Tingkat Pengaruh
1	Resistensi sosial budaya, penolakan masyarakat terhadap pembangunan IPAL atau IPLT karena stigma, ketidaktahuan, atau kekhawatiran dampak lingkungan	17%	3	0,50
Peraturan				
1	Pergantian kepada daerah atau arah kebijakan bisa menggeser fokus dari sanitasi ke sektor lain	17%	2	0,33
Kelembagaan				
1	Legalitas KPP sebagai organisasi pengelola sarpras masih terbatas sehingga bantuan belum diberikan misalkan jika ada CSR	17%	3	0,50
Keuangan				
1	Belum ada sektor swasta yang melakukan investasi di bidang air limbah	17%	2	0,33
Jumlah		100%	-	2.67
SELISIH PELUANG DAN ANCAMAN				-0.07

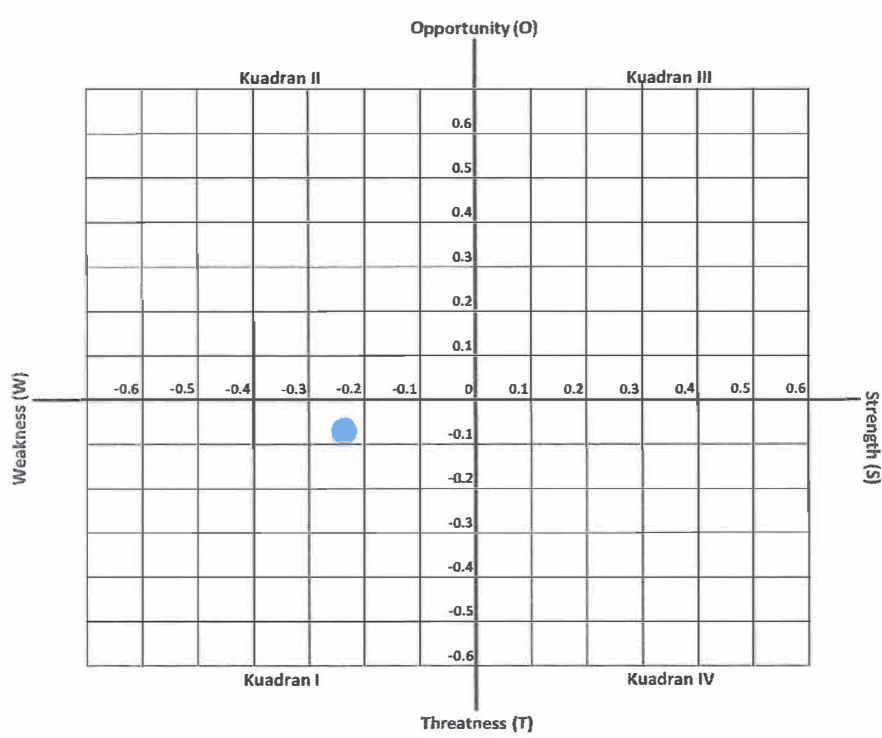
Keterangan :

- 1. Tidak berpengaruh dalam pengelolaan air limbah
- 2. Tingkat pengaruh rendah dalam pengelolaan air limbah
- 3. Tingkat pengaruh sedang dalam pengelolaan air limbah
- 4. Tingkat pengaruh tinggi dalam pengelolaan air limbah

(Sumber: Hasil Analisis Konsultan, 2025)

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa Kanupaten Blitar berada pada **kuadran I**, dengan beberapa kelemahan (*weakness*) yang lebih dominan daripada kekuatan (*strength*), namun memiliki potensi peluang (*opportunity*) yang cukup untuk dikembangkan dalam mengatasi beberapa ancaman (*threatness*) yang terkait dengan pengelolaan air limbah.

Arah pengembangan di kuadran I adalah Mengoptimalkan system setempat (SPALD-S) yang sudah berjalan. Posisi Kabupaten Blitar dalam analisis SWOT pemilihan dan penetapan arah pengembangan sistem pengelolaan air limbah dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Posisi Kabupaten Blitar pada Kuadran Pemilihan dan Penetapan Arah Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Sumber : Analisis Konsultan, 2025

4.3 PENENTUAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPALD

4.3.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana SPALD

Pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan air limbah yang dapat diterapkan di Kabupaten Blitar terdiri dari :

- Optimalisasi SPALD-S untuk wilayah dengan kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/ha melalui :
 - Pembangunan tangki septik baik individu maupun komunal (2-10 KK)
 - Menyediakan sarana penyedotan lumpur tinja
 - Pembangunan IPLT
 - Pengadaan truk tinja
 - Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
 - Pembangunan IPAL Komunal
- Pengembangan SPALD-S dan SPALD-T untuk wilayah dengan kepadatan lebih dari 150 jiwa/ha melalui :
 - Optimalisasi pemanfaatan SPALD-T skala permukiman yang sudah terbangun

- Pembangunan SPALD-T skala permukiman baru wilayah perkotaan pedesaan dan desa dengan kondisi kemiringan serta geologi yang porus

Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (SPALD-S) melalui sistem komunal atau SPALD-Terpusat skala permukiman diprioritaskan di permukiman kumuh. Mengoptimalkan program stimulasi kepemilikan jamban keluarga untuk keluarga miskin/MBR.

4.3.2 Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Kelembagaan dan SDM

Dalam rangka pemanfaatan yang maksimal dalam pengelolaan infrastruktur air limbah domestik diperlukan berbagai upaya yang memungkinkan terwujudnya pelayanan yang efektif dan maksimal. Strategi yang dapat dilakukan yakni : menyiapkan pembentukan UPTD dan pemisahan fungsi regulator dan operator. Pengelolaan dikatakan efektif setidaknya harus memenuhi syarat:

- Prasarana dan sarana dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas yang direncanakan.
- Jumlah penerima manfaat sebanding dengan prasarana dan sarana yang tersedia dan dioperasikan.
- Prasarana dan sarana yang mudah diakses oleh setiap orang.
- Masyarakat ikut menjaga, merawat dan membayar.
- Adanya sistem pengawasan terhadap kualitas pelayanan.

Alternatif model kelembagaan yang dapat dilakukan

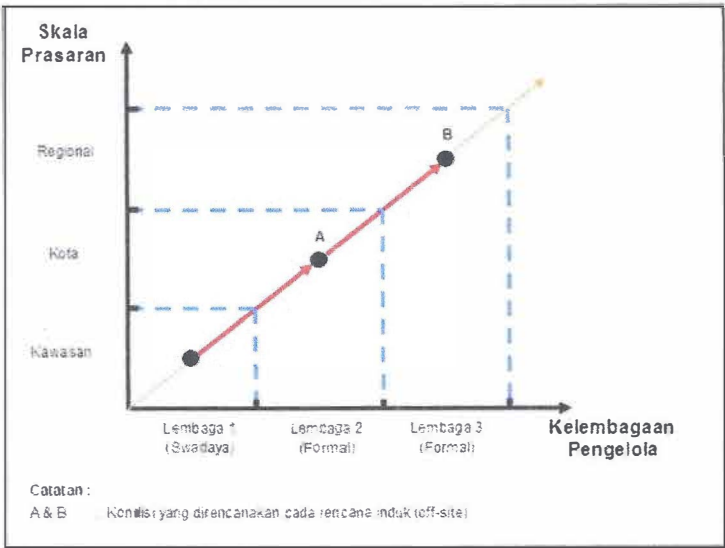
1. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
2. Badan Layanan Umum Daerah
3. Perusahaan Umum Daerah
4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Konsep pengelolaan infrastruktur bidang sanitasi yang berkelanjutan dan penggunaan yang efektif membutuhkan adanya pembagian peran yang jelas antara peran regulator dan peran operator. Peran regulator adalah peran pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya pelayanan yang efektif sedangkan peran operator yaitu peran institusi yang menjalankan fungsi pengoperasian dan pelayanan sehari-hari. Peran regulator memberikan dukungan sumber daya yang dibutuhkan oleh operator yang memungkinkan pengelolaan pelayanan dapat dilaksanakan dengan lancar. Peran operator adalah menjalankan tugas yang diberikan dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan sarana. Sehingga dapat ditegaskan operator menjalankan sistem manajemen internal.

Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat (swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala pengelolaan. Strategi peningkatan

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

kapasitas kelembagaan dan pilihan bentuk kelembagaan. Operator harus mempertimbangkan cara pembiayaan dan sumber dana untuk mengoperasikan prasarana tersebut agar dapat berkelanjutan. Rencana peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, harus didukung oleh Perda dan sosialisasi yang memadai.



Gambar 4.3 Keterkaitan Skala prasarana dengan Basis Kelembagaan Pengelola
Sumber : Analisis Konsultan, 2025

Regulator memiliki fungsi utama penentu/pengambil keputusan/kebijakan dan penyediaan dukungan melalui :

- Perencanaan dan kerangka strategi
- Penyediaan sarana
- Regulasi dan peraturan
- Supervisi

Operator memiliki fungsi utama menjalankan fungsi manajemen pelayanan melalui :

- Manajemen sumberdaya manusia dan kinerja
- Manajemen Aset Operasi
- Manajemen Pelayanan

4.3.3 Kebijakan dan Strategi Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD

Penyelenggaraan SPALD sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pendanaan. Keterbatasan anggaran pemerintah, belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta kurangnya skema pembiayaan yang inovatif menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur dan operasional SPALD secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan strategi pembiayaan yang komprehensif, integratif, dan adaptif terhadap kondisi lokal. Pendekatan

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan SPALD yang berkelanjutan.

Melalui kebijakan yang tepat dan strategi pembiayaan yang efektif, pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Optimalisasi Anggaran Pemerintah, melalui :
 - Meningkatkan alokasi APBD dan APBN untuk sector air limbah domestik
 - Memprioritaskan pembangunan SPALD di Kawasan padat penduduk dan zona prioritas pelayanan
2. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Keuangan, melalui :
 - Mengembangkan system monitoring dan evaluasi pembiayaan
 - Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembiayaan SPALD
3. Peningkatan Efisiensi dan Keberlanjutan Operasional, melalui :
 - Menetapkan jadwal tarif layanan berdasarkan kemampuan masyarakat untuk biaya operasional
4. Penguatan Kolaborasi, melalui :
 - Menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dan Lembaga keuangan untuk pembiayaan infrastruktur dan layanan SPALD.

4.3.4 Kebijakan dan Strategi Peran Serta Masyarakat Penyelenggaraan SPALD

Kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan air limbah yang baik perlu didorong lebih kuat melalui sosialisasi ataupun kampanye hidup sehat dan mendorong masyarakat memanfaatkan keberadaan sistem air limbah yang sudah terbangun. Adanya peran serta masyarakat dalam sistem pengolahan air limbah merupakan faktor yang cukup penting dalam kebersihan pembangunan sanitasi.

Strategi pengembangan edukasi dan peran serta masyarakat perlu diarahkan dalam pengembangan pemberdayaan dan peran masyarakat, serta pengembangan kampanye publik. Efektifitas sistem pengelolaan air limbah sangat terkait dengan perilaku masyarakat dalam bersikap dan bertindak terhadap air limbah yang dihasilkan. Di bidang air limbah, perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan untuk mendukung sistem pengelolaan air limbah yang efektif berkaitan dengan perilaku sebagai berikut:

- Bersedia tidak membuang air limbah secara sembarang pada lingkungan.
- Bersedia menyediakan tangki septik sesuai standard pada masing-masing bangunan.
- Bersedia mengelola tangki septik secara benar dengan melakukan pengurasan lumpur tangki septik secara rutin (setiap 3 tahun sekali).

- Bersedia membayar retribusi air limbah khususnya bagi penduduk yang daerahnya telah dilayani oleh jaringan perpipaan air limbah.

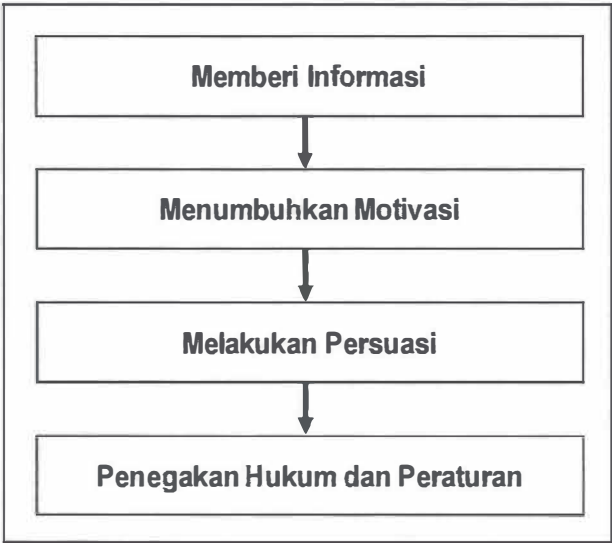
Selain itu partisipasi swasta melalui *Corporate Social Responsibility* perlu dioptimalkan melalui :

- Fasilitasi terciptanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan limbah rumah tangga
- Kerjasama dengan pihak swasta (perusahaan) dan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan limbah rumah tangga

Upaya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mendukung sistem pengolahan sampah, memerlukan suatu perencanaan rekayasa sosial (*Social Engineering*). Perangkat rekayasa sosial di bidang air limbah secara umum terdiri atas:

- Pelaksanaan kampanye publik (*Public Campaign*).
- Pelaksanaan penegakkan hukum dan peraturan (*Rule and Regulation*).

Proses pelaksanaan rekayasa sosial secara umum terdiri dari salah satu atau kombinasi dari rangkaian kegiatan seperti pada gambar berikut.



Gambar 4.4 Proses Rekayasa Sosial

Perencanaan dan pelaksanaan rekayasa sosial tersebut, pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi (merubah perilaku) masyarakat agar : tertarik, tergerak, terajak untuk bertindak kearah yang ditunjukan sesuai dengan sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kesadaran (*Awareness*)
- Meningkatnya minat (*Interest*)
- Tumbuhnya kebutuhan (*Demand*)
- Adanya partisipasi dan tindakan (*Action*)

Adanya media komunikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi sehingga dapat mengembangkan peran serta/partisipasi masyarakat.

4.3.5 Kebijakan dan Strategi Pengaturan dalam Penyelenggaraan SPALD

Peraturan merupakan instrumen dalam penetapan arah dan kontrol terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Penegakan peraturan yang kuat akan mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan kondisi pelayanan air limbah domestik yang baik di masa mendatang. Hal yang diperhatikan dalam pembentukan peraturan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Blitar meliputi :

- Menyusun peraturan-peraturan pendukung pengelolaan air limbah dan retribusi
- Melibatkan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik
- Mewajibkan dan memberikan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembangan untuk menyediakansarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah
- Mewajibkan dan memberikan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik
- Mewajibkan dan meberikan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha
- Mewajibkan penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga dan kantor pemilik *septic tank*.
- Memberikan tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga dan perkantoran.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN
PROGRAM**

5.1 RENCANA PROGRAM UMUM

Program adalah kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan sesuai dengan strategi Program pada umumnya termasuk juga program SPALD tidak hanya sebatas implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada, antara lain aspek keuangan (tersedianya biaya Operasi dan Pemeliharaan—O & M yang memadai), dan meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi menuju ke arah yang lebih baik dan sehat.

Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Blitar diarahkan untuk optimalisasi sistem setempat (SPALD-S) dengan mengembangkan sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan meningkatkan cakupan pelayanan. Program SPALD-T juga perlu dikembangkan, karena pertimbangan kepadatan penduduk, permeabilitas tanah, dan kualitas air tanah dan air permukaan yang sudah tercemar oleh bakteri coli, yang merupakan indikator air tanah dan air permukaan tercemar limbah domestik (tinja).

5.1.1 Rencana Pengembangan Daerah

Hasil analisa dalam menentukan strategi pengembangan dengan menggunakan analisa SWOT arah pengembangan grand strategi masuk ke kuadran I yaitu Mengembangkan kombinasi sistem setempat (SPALD-S) dan sistem terpusat (SPALD-T) yang sesuai dengan kondisi daerah perencanaan. Arah pengembangan strategi antara lain yakni:

- a. Pembangunan SPALD-T di beberapa lokasi
- b. Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja :
 - 1. Pengadaan armada
 - 2. Pembangunan IPLT

Berdasarkan permasalahan pengolahan air limbah yang ditemukan pada Kabupaten Blitar, berikut merupakan uraian strategi dan indikasi program yang dapat dilakukan.

Tabel 5. 1 Strategi dan Indikasi Program

No.	Permasalahan	Strategi	Indikasi Program
A.	Teknis		
1	Jumlah masyarakat yang akses sanitasinya belum layak masih mencapai 10% atau sekitar 49.675 KK, sedangkan jumlah akses aman masih mencapai 1,94%.	- Mentransformasi Akses Sanitasi Belum Layak menjadi Akses Sanitasi Layak - Meningkatkan akses aman	- Bantuan jamban untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat - Edukasi/Pemicuan untuk masyarakat non-MBR - Pembangunan IPLT
2	Sebagian besar masyarakat (67%) memiliki sumur yang berjarak < 10 m dari tangki septik. Padahal mayoritas masyarakat memanfaatkan air sumur sebagai sumber air bersih dan tidak menutup kemungkinan air yang digunakan terjadi pencemaran dan terdapat kadar <i>e-coli</i> .	- Meningkatkan aplikasi tangki septik SNI - Pemantauan kualitas air secara berkala dan menyebar se-Kabupaten Blitar	- Stimulasi/Pemicuan pembangunan jamban layak dan penggantian tangki septik menjadi SNI - Pelatihan dan bantuan alat&teknis untuk pengusaha sanitasi (demand activator) - Monitoring kualitas air tanah dan permukaan
3	Pengelolaan grey water oleh masyarakat masih ada yang langsung diresapkan ke tanah yaitu sebesar 58%.	- Pemicuan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan grey water	- Sosialisasi pengelolaan dan stimulasi bantuan pengolahan greywater
4	Mayoritas masyarakat sudah memiliki tangki septik namun 48% -nya tidak sesuai standar SNI, dan 86% tangki septik yang sudah terbangun tidak pernah dilakukan penyedotan lumpur tinja.	- Memastikan kondisi septic tank sudah SNI - Meningkatkan aplikasi tangki septik SNI - Menerapkan penyedotan lumpur tinja secara berkala	- Stimulasi/Pemicuan pembangunan jamban layak dan penggantian tangki septik menjadi SNI - Pelatihan dan bantuan alat&teknis untuk pengusaha sanitasi (penyedia tangki SNI) - Mengaplikasikan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
5	Jumlah IPAL Komunal sekitar 124 unit yang merupakan IPAL animas dan LPK namun kualitas efluen IPAL Komunal belum diperiksa secara rutin.	- Pemantauan efluen IPAL secara berkala	- Monitoring kualitas efluen IPAL Komunal

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Permasalahan	Strategi	Indikasi Program
6	Sebaran IPAL dan SPALD-S belum merata, di bagian selatan masih belum dilayani IPAL.	-Pemerataan pembangunan IPAL Komunal	- Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat (IPAL diusulkan untuk area perkotaan/padat, area pasar, area kumuh, area wisata, dan area dengan porositas tanah yang tinggi)
7	Pemda belum memiliki armada truk tinja meskipun sudah ada 7 jasa truk tinja swasta yang mana 3 jasa sudah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan pemda Kabupaten Blitar.	- Pengadaan armada penyedotan lumpur tinja - Meningkatkan jumlah jasa swasta yang ber-MoU dengan pemda	- Pengadaan truk tinja oleh pemda
8	Kabupaten Blitar masih belum memiliki IPLT.	- Membangun IPLT dengan cakupan layanan berkembang secara bertahap	- Pembangunan IPLT (jangka mendesak) - Pengembangan/Peningkatan kapasitas IPLT (jangka menengah-panjang)
9	Rata-rata penyedotan oleh truk tinja swasta sekitar 25-30 kali dalam 1 bulan (tidak setiap hari). Sedangkan lumpur tinja masih banyak dibuang ke kebun sebagai pupuk dan belum banyak yang membuang ke IPLT meskipun pemda Kabupaten Blitar telah memiliki kerjasama dengan IPLT Kota Blitar.	- Diperlukan peraturan sebagai penegak hukum, disertai dengan monitoring - Pembinaan jasa sedot tinja swasta	- Sosialisasi, fasilitasi, dan monitoring penyedotan lumpur tinja oleh jasa sedot swasta - pembentukan perda air limbah domestik
10	Perkembangan perkotaan dalam wilayah perdesaan serta permukiman baru di Kabupaten Blitar bertumbuh pesat.	- Peningkatan akses sanitasi layak dan aman untuk wilayah perkotaan pedesaan	- Bantuan jamban untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat - Edukasi/Pemicuan untuk masyarakat non-MBR
B.	Kelembagaan		
1	Sebagian KPP belum ada akta notaris sehingga menjadi salah satu penghambat CSR untuk memberikan bantuan.	- Meningkatkan kapasitas KPP/KSM	- Pembinaan dan pelatihan untuk KPP/KSM - Fasilitasi pengembangan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan swasta

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

No.	Permasalahan	Strategi	Indikasi Program
2	Kelembagaan pengelola khusus operator (UPTD) belum ada.	- Pembentukan UPTD	- Penyusunan naskah akademik pembentukan UPTD Air Limbah Domestik - Rekrutmen SDM - Pelatihan teknis pengelolaan UPTD
C.	Pembiayaan		
1	Pemerintah Kabupaten Blitar belum bisa memberikan stimulan karena rekening belanja belum ada dan aset prasarana SPALD sudah diserahkan ke masyarakat.	- Melakukan bantuan teknis berupa pelatihan atau stimulan	- Pembinaan dan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal bagi KSM/KPP
2	IPAL Komunal banyak yang penuh tetapi tidak ada kemampuan untuk melakukan pengurasan.	- Melakukan bantuan teknis berupa stimulan	- Stimulan bantuan penyedotan untuk IPAL Komunal serta SPALDS untuk MBR
D.	Pengaturan		
1	Belum ada peraturan utama tentang pengelolaan air limbah domestik, sehingga masih banyak pelanggaran.	- Menyusun perda Pengelolaan Air Limbah Domestik beserta peraturan pendukungnya	- Penyusunan raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik - Penyusunan raperbup yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi air limbah domestik (opsional)
2	Masih ada jasa swasta (4 dari 7 jasa swasta) yang masih belum bekerja sama dengan pemerintah daerah.	- Meningkatkan jumlah jasa swasta yang ber-MoU dengan pemda	- Sosialisasi, fasilitasi, dan monitoring penyedotan lumpur tinja oleh jasa sedot swasta
E.	Peran Serta Masyarakat		
1	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah masih rendah yaitu 62%.	- Edukasi untuk masyarakat	- Sosialisasi tentang pengelolaan SPALD dan Tangki Septik yang sesuai standar - Sosialisasi PHBS di sekolah - Koordinasi, pengembangan, pembinaan, pemecuan media informasi dan promosi sadar hidup sehat berbasis masyarakat dan STBM
2	Warga yang tidak bersedia menyedot tangki septik sebesar 60%, warga hanya akan melakukan penyedotan lumpur tinja apabila terdapat masalah saja, misalnya terjadi penyumbatan atau tangki septik penuh.	- Menerapkan penyedotan lumpur tinja secara berkala	- Mengaplikasikan program Layanan lumpur tinja Terjadwal (LLTT)

Rencana program umum dalam SPALD di Kabupaten Blitar sesuai hasil analisa berdasarkan kepadatan penduduk, kemiringan lahan dan batas administrasi sebagai berikut:

5.1.1.1 Rencana Pelayanan dengan Sistem Setempat (SPALD-S)

Pelayanan dengan sistem setempat direncanakan pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan tingkat pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah masih rendah. Wilayah perencanaan yang terlayani sistem setempat adalah wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk antara < 25 jiwa/Ha sampai akhir tahun perencanaan tahun 2040. Pelayanan setempat direncanakan hampir di setiap desa/kelurahan di 22 kecamatan, namun dengan cakupan pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan kondisi eksisting masing-masing desa/kelurahan.

Kondisi eksisting pelayanan setempat (SPALD-S) di beberapa desa/kelurahan sudah mencapai 100% yang memiliki jamban berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar atau sudah ODF.

5.1.1.2 Rencana Pelayanan dengan Sistem Terpusat (SPALD-T)

Sistem pelayanan dengan terpusat diterapkan untuk wilayah perencanaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kondisi kualitas air tanah masih baik sehingga perlu perlindungan. Rencana daerah permukiman yang akan dilayani yaitu desa/kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk diatas 25 jiwa/Ha (kepadatan terbangun) dan kawasan komersial serta kawasan khusus yang akan dilayani dengan sistem terpusat. Desa/kelurahan tersebut tidak sepenuhnya dilayani secara terpusat, tetapi sebagian juga akan dilayani secara setempat.

5.1.2 Penentuan Zona Perencanaan

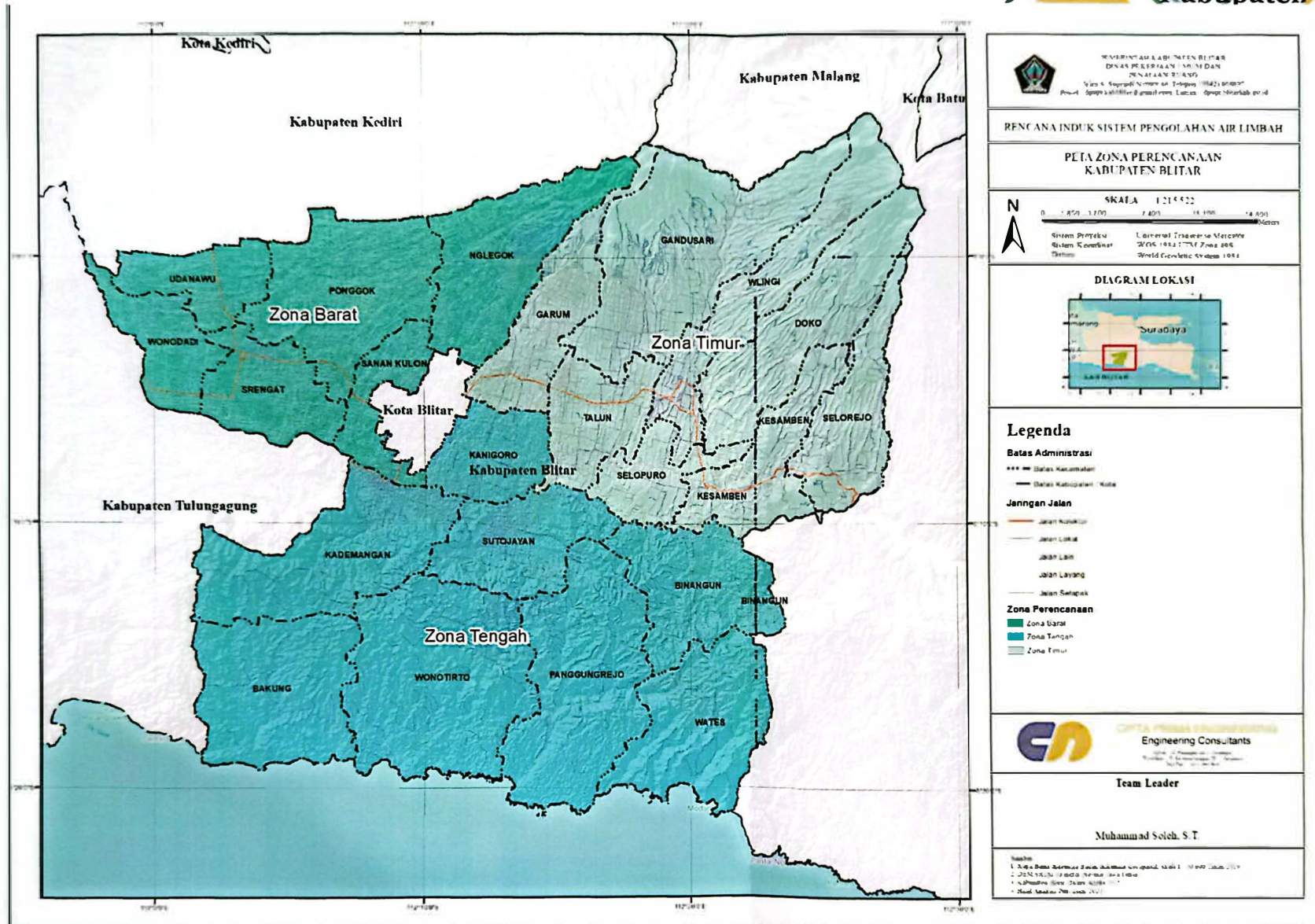
Daerah perencanaan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) pada daerah terbangun dibagi atas zona-zona perencanaan dalam satuan sistem perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah. Pembagian zona perencanaan pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada daerah terbangun ditetapkan berdasarkan :

- Keseragaman tingkat kepadatan penduduk;
- Pertimbangan batas administrasi.

Direncanakan zona perencanaan dibagi menjadi 2 zona sebagai berikut:

- Zona Perencanaan 1, meliputi kecamatan yang berada Zona Barat seperti Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanan Kulon, Kecamatan Nglegok.
- Zona Perencanaan 2, meliputi kecamatan yang berada di Zona Tengah seperti Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Bakung, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun.
- Zona Perencanaan 3, meliputi kecamatan yang berada di Zona Timur seperti Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Doko, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Selorejo.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



Gambar 5.1 Peta Zona Perencanaan

5.1.3 Penentuan Zona Prioritas

Zona Prioritas adalah zona perencanaan yang mendapat penilaian utama diprioritaskan dibangun terlebih dahulu dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Penetapan zona prioritas dilakukan berdasarkan pada metode perankingan yang tertera pada Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat. Serta melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi Kabupaten Blitar dan juga mempertimbangkan kondisi wilayah perencanaan yang antara lain meliputi:

- Tingkat permasalahan pencemaran air limbah terhadap air tanah dan badan air penerima
- Tingkat kemudahan pelaksanaan
- Tingkat kelayakan ekonomi
- Tingkat kelayakan keuangan
- Kelayakan lingkungan
- Kelayakan pengembangan

5.1.3.1 Perangkingan Kepadatan Penduduk

Metode perangkingan dilakukan berdasarkan perhitungan angka kepadatan penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan luas area terbangun dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Nilai 1 diberikan apabila angka kepadatan penduduk diperoleh rendah, yaitu berada pada kepadatan <100 jiwa/km²
- b. Nilai 2 diberikan apabila angka kepadatan penduduk diperoleh sedang, yaitu berada pada range $\geq 50 - 100$ jiwa/km²
- c. Nilai 3 diberikan apabila angka kepadatan penduduk padat, yaitu berada pada range <50 jiwa/km²

Detail dari nilai perangkingan dan klasifikasi angka kepadatan penduduk pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten Blitar tertera pada Lampiran.

5.1.3.2 Perangkingan Angka Sebaran Permukiman Kumuh

Metode perangkingan dilakukan berdasarkan perhitungan angka sebaran permukiman kumuh dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Nilai 1 diberikan apabila sebaran permukiman kumuh Rendah yaitu hampir tidak ada.
- b. Nilai 2 diberikan apabila sebaran permukiman kumuh Sedang yaitu sekitar >25 ha.
- c. Nilai 3 diberikan apabila sebaran permukiman kumuh Tinggi yaitu sekitar 1-25 ha.

Detail dari nilai perangkingan dan klasifikasi sebaran permukiman kumuh pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten Blitar tertera pada Lampiran.

5.1.3.3 Perangkingan Kepemilikan Akses Sanitasi

Metode perangkingan dilakukan berdasarkan perhitungan angka kepemilikan akses sanitasi Kabupaten Blitar dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Nilai 1 diberikan apabila akses sanitasi di kecamatan tersebut baik yaitu akses layak <10%.
- b. Nilai 2 diberikan apabila akses sanitasi di kecamatan tersebut sedang yaitu akses layak 10% - 20%
- c. Nilai 3 diberikan apabila akses sanitasi di kecamatan tersebut buruk yaitu akses layak 65,01% - 80%
- d. Nilai 4 diberikan apabila akses sanitasi di kecamatan tersebut sangat buruk yaitu akses layak >20%

Detail dari nilai perangkingan dan klasifikasi kondisi sanitasi pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten Blitar tertera pada Lampiran.

5.1.3.4 Overlay Zona Prioritas

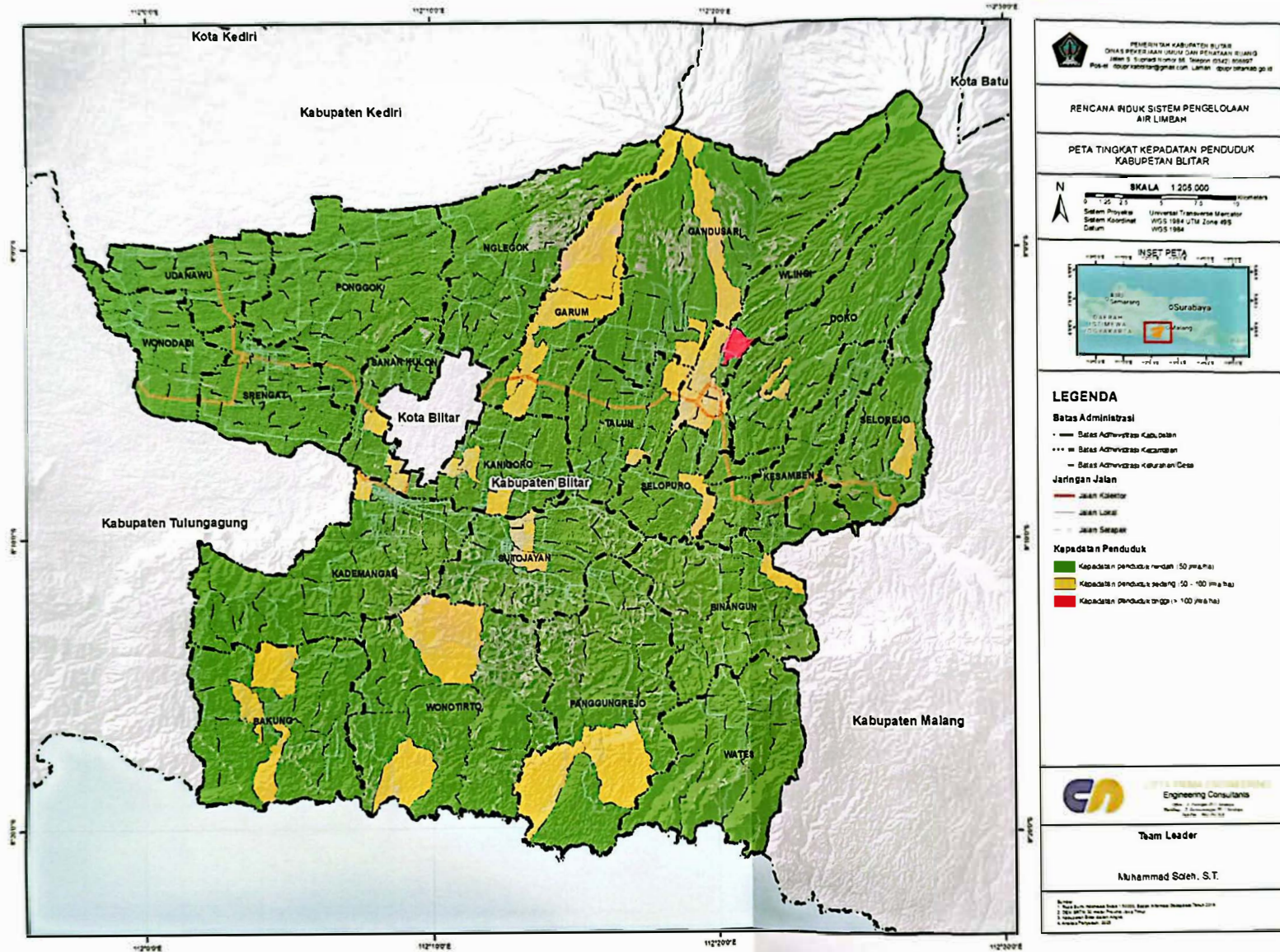
Untuk perangkingan akhir dilakukan pendekatan dengan penjumlahan angka kepadatan penduduk dan fasilitas sanitasi di Kabupaten Blitar dengan cara sebagai berikut:

- a. Prioritas 1 diberikan apabila hasil perangkingan sangat tinggi. Nilai perangkingan yang sangat rendah ini dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut memerlukan penanganan segera karena kondisi sanitasinya buruk. Untuk warna disimbolkan dengan merah. Desa/Kelurahan yang masuk pada prioritas 1 yaitu : Bululawang, Sumberdadi, Ngrejo, Jatianom, Kaweron, Doko, Beru, Babadan., Ngadirenggo, Soso, Tambakrejo, Ngadipuro, Sutojayan, Kembangarum, Jimbe, Kemloko, Dayu, Ngoran, dan Nglegok.
- b. Prioritas 2 diberikan apabila hasil perangkingan dikatakan tinggi. Nilai perangkingan yang sedang ini dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut harus diperhatikan kondisi sanitasinya, karena tidak menutup kemungkinan kondisi sanitasi ini berubah menjadi buruk. Untuk warna disimbolkan dengan kuning. Desa/kelurahan yang masuk pada prioritas 2 yaitu : Plandirejo, Tumpakoyot, Sidomulyo, Tumpakkepuh, Kedungbanteng, Pulerejo, Minggirsari, Gogodeso, Karangsono, Gaprang, Kuningan, Tumpang, Jabung, Jeblog, Bendosewu, Pasirharjo, Kamulan, Talun, Bajang, Jajar, Slorok, Jambepawon, Sidorejo, Suru, Plumbangan, Sumberurip, Resapombo, Kalimanis, Wlingi, Tangkil, Tegalsari, Balerejo, Slumbung, Tulungrejo, Serang, Summersih, Kaligambir, Sukorejo, Tugurejo, Wates, Sumberarum, Kedungbunder, Sukorejo, Kalipang, Panggungduwet, Pakisaji, Sumberjo, Dawuhan, Rejowinangun, Plosorejo, Darungan, Bangsri, Modangan, Penataran, Kedawung, Sumberasri, Plosoarang, Tuliskriyo, Bendowulung, Purworejo, Sumberjo, Jeding, Gledug, Sumberingin, Langon, Karangbendo, Purwokerto, Ngaglik, Pakisrejo, Karanggayam, Kerjen, Kauman, Kandangan, Kendalrejo, Begelenan, Dermojayan, dan Bakung.

- c. Prioritas 3 diberikan apabila hasil perangkingan sedang. Nilai perangkingan ini dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut masih mempunyai sistem sanitasi yang cukup baik. Untuk warna disimbolkan dengan hijau. Desa/Kelurahan yang masuk pada prioritas 3 yaitu : Lorejo, Sateryan, Kanigoro, Tlogo, Papungan, Banggle, Sawentar, Duren, Sragi, Wonorejo, Tapakrejo, Boro, Genengan, Klemunan, Tembalang, Tambakan, Butun, Gadungan, Sumberdiren, Garum, Tawang Sari, Sidodadi, Karangrejo, Kaligrenjeng, Pasiraman, Sumberboto, Gununggede, Ngeni, Wonotirto, Ploso, Sumberagung, Panggungrejo, Kalitengah, Bumiayu, Ringinrejo, Tulungrejo, Pureorejo, Mojorejo, Birowo, Ngadri, Pandanarum, Bacem, Sumberjo, Jingglong, Kaulon, Maron, Kebonsari, Bendosari, Suruhwadang, Sumberjati, Plumpungrejo, Kademangan, Jiwut, Bendosari, Sanankulon, Kalipucung, Sumber, Bendo, Maliran, Dadaplangu, Selokajang, Maron, Wonorejo, Dandong, Srengat, Togogan, Karanggondang, Tunjung, dan Slemanan.
- d. Prioritas 4 diberikan apabila hasil perangkingan rendah. Nilai perangkingan ini dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut masih mempunyai sistem sanitasi yang cukup baik. Untuk warna disimbolkan dengan biru. Namun tetap harus dilakukan perbaikan dan peningkatan terutama bagi daerah yang mempunyai kepadatan yang cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya peningkatan kepadatan maka kondisi sanitasi menjadi buruk. Desa/Kelurahan yang masuk pada prioritas 4 yaitu : Bakung, Kendalrejo, Siraman, Kesamben, Jugo, Pagerwojo, Pagergunung, Tepas, Kemirigede, Bumirejo, Sukoanyar, Pohgajih, Selorejo, Ngreco, Olan Alen, Sumberagung, Banjarsari, Ngrendeng, Sidomulyo, Ampelgading, Sumberagung, Gondang, Kotes, Gandusari, Sukosewu, Ngaringan, Semen, Krisik, Pojok, Tingal, Bence, Slorok, Mronjo, Mandesan, Selopuro, Jatitengah, Jambewangi, Tegalrejo, Popoh, Balerejo, Margomulyo, Panggungasri, Salamrejo, Sumberkembar, Binangun, Sukorame, Sambigede, Rejosari, Umbuldamar, Tawangrejo, Ngembul, Kedungwungu, Jegu, Krenceng, Jatilengger, Kawedusan, Kebonduren, Pojok, Ponggok, Candirejo, Bacem, Ringinanyar, Gembongan, Sidorejo, Gandekan, Kunir, Kolomayan, Pikatan, Wonodadi, Kaliboto, Rejosari, Tawangrejo, Kebonagung, Salam, Jaten, Ringinanom, Sumbersari, Jati, Tumenggungan, Besuki, Mangunan, Sukorejo, dan Bendorejo.

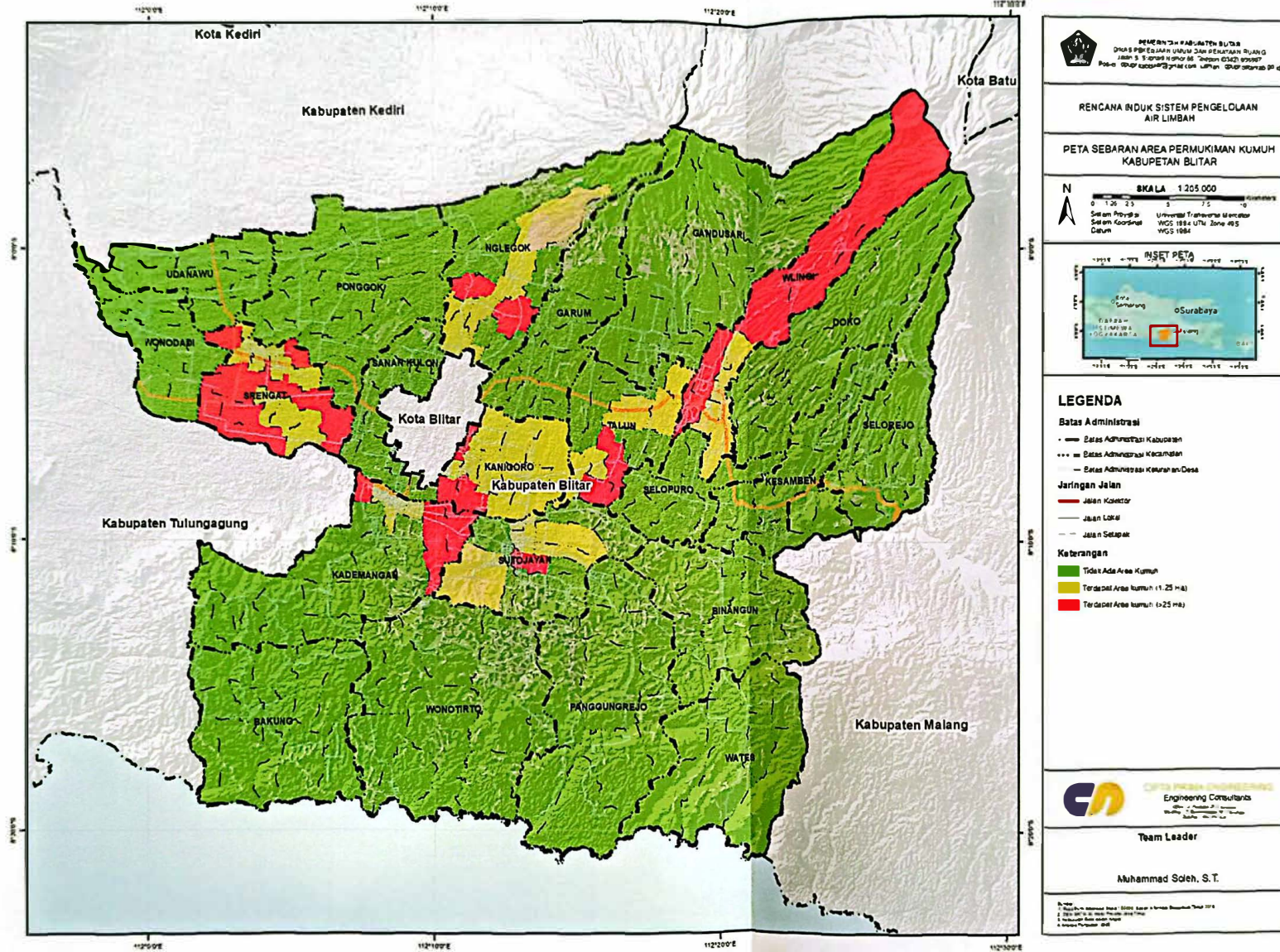
Detail dari nilai hasil perangkingan akhir pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten Blitar tertera pada Lampiran.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



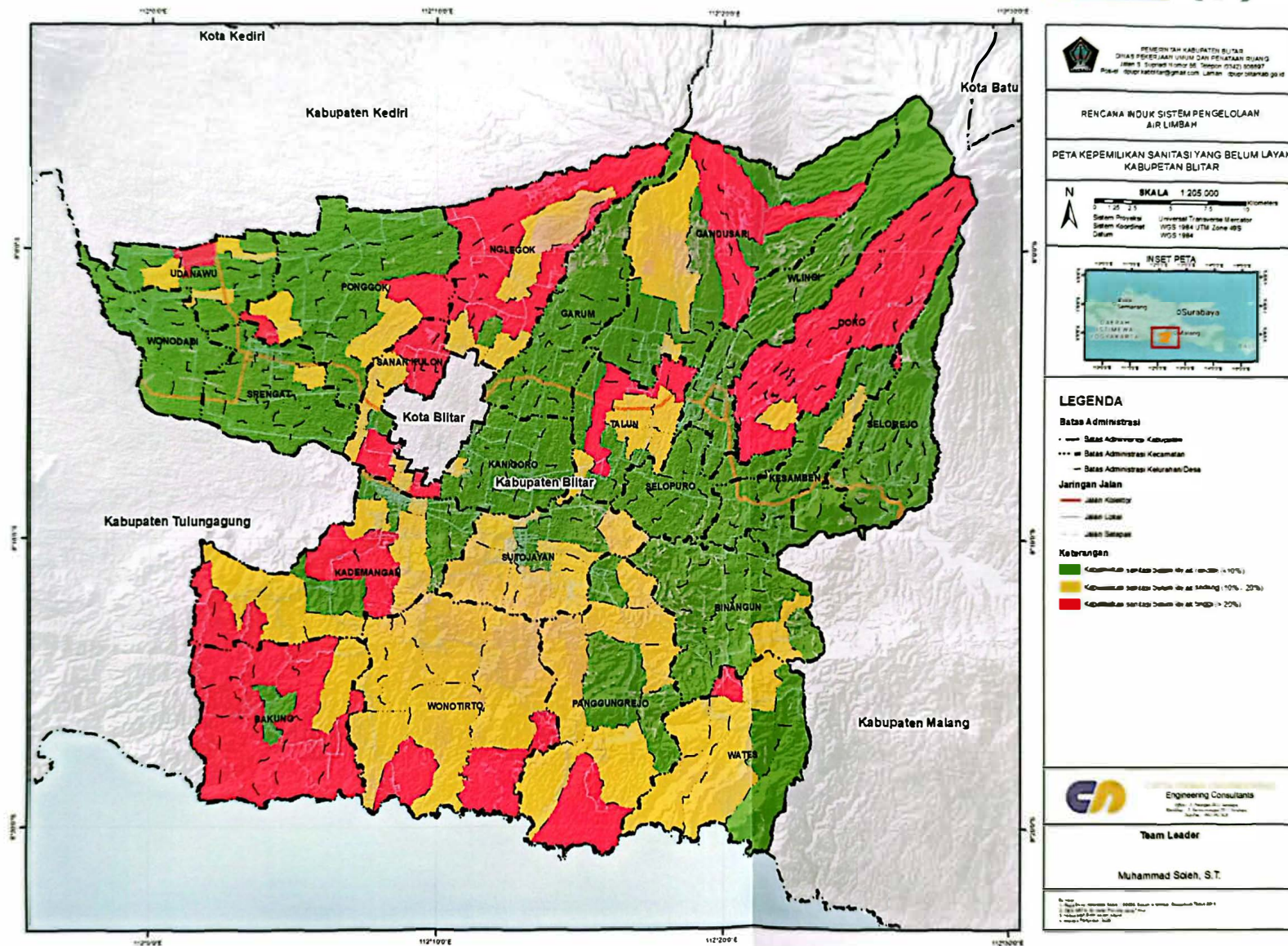
Gambar 5. 2 Peta Angka Kepadatan Penduduk

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



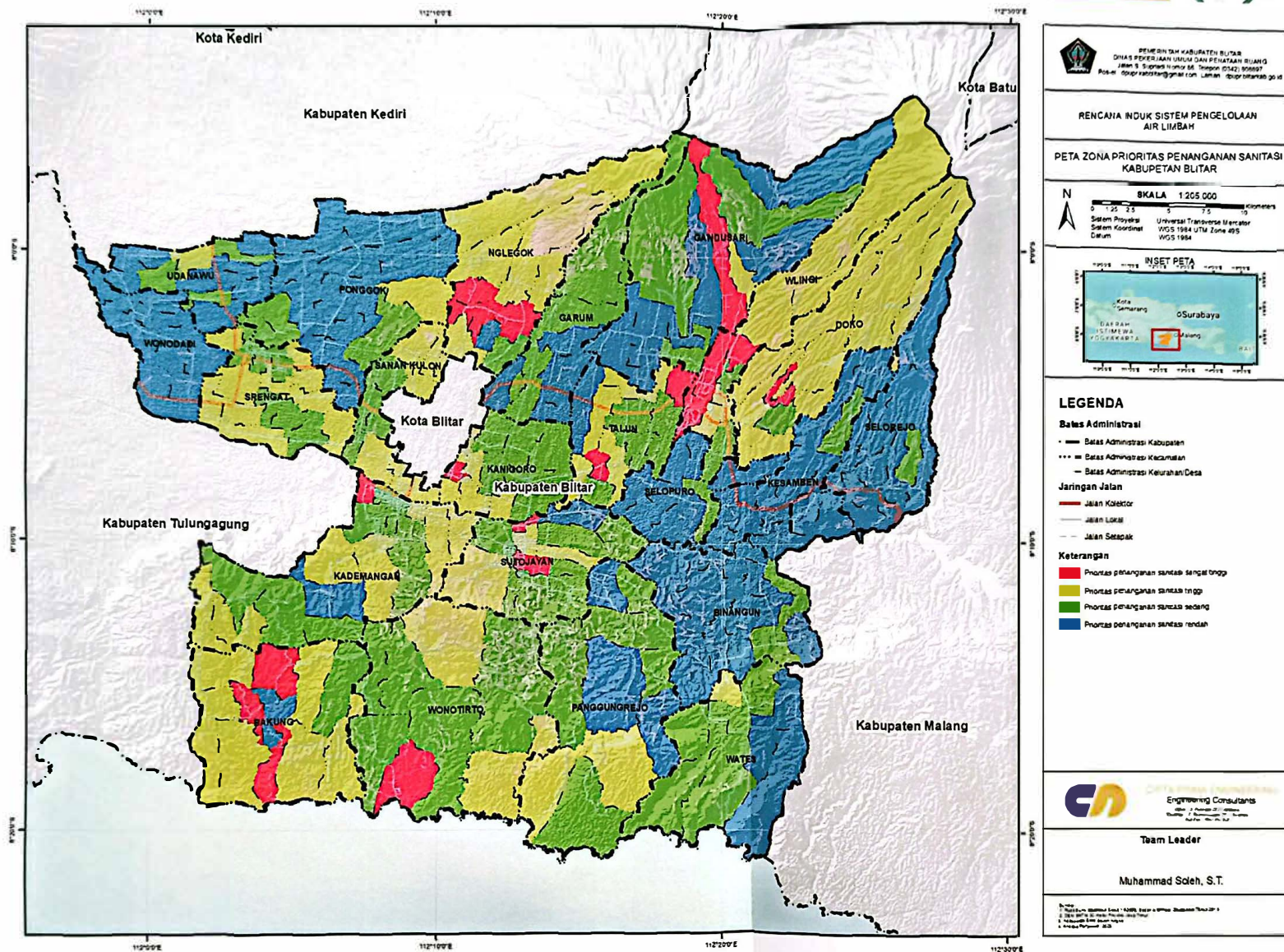
Gambar 5. 3 Peta Angka Sebaran Permukiman Kumuh

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar



Gambar 5. 4 Peta Angka Kepemilikan Sanitasi

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

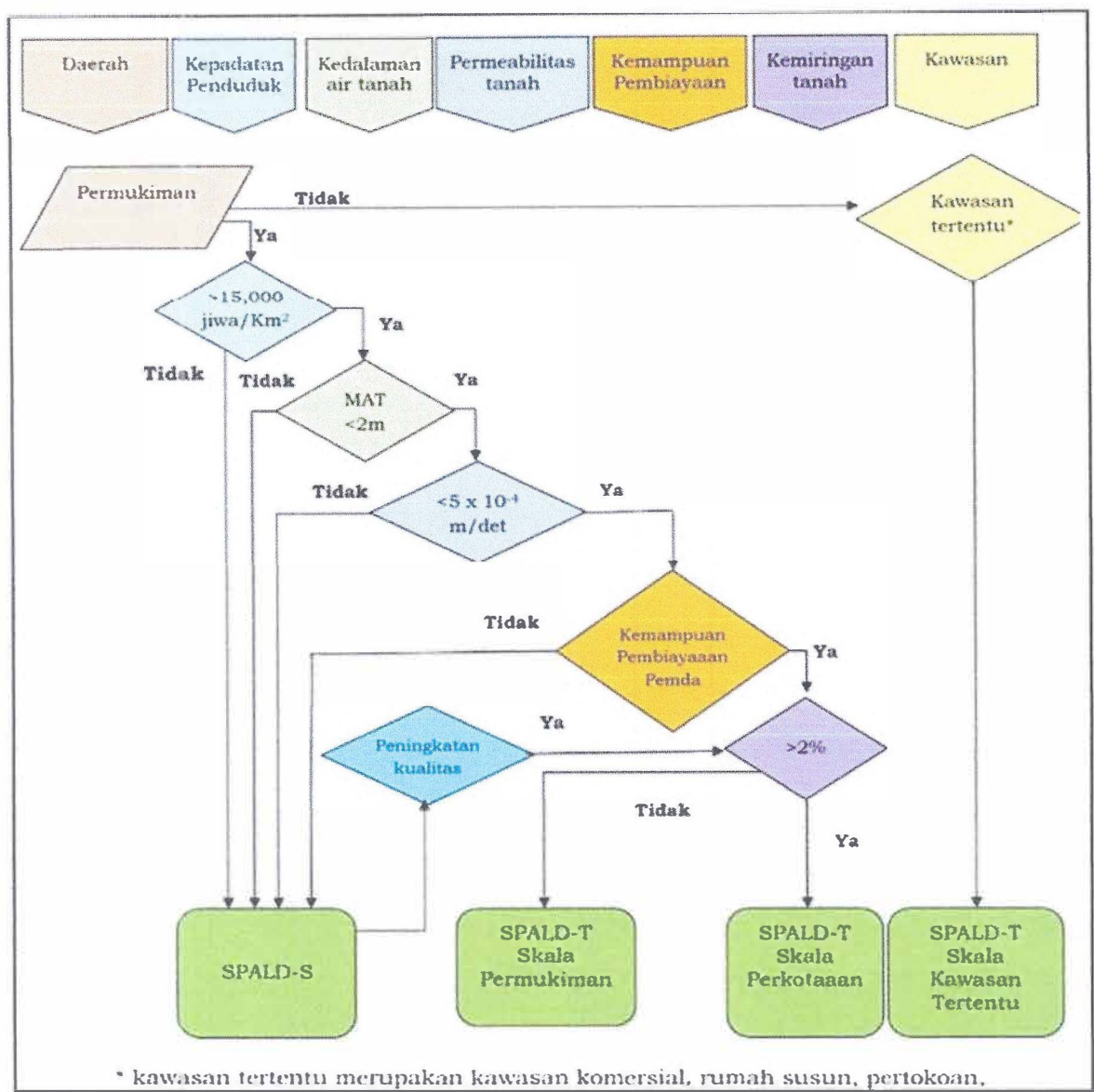


Gambar 5.5 Peta Overlay Zona Prioritas

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Blitar

5.1.4 Pemilihan Jenis SPALD

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik penerapan jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dapat ditentukan berdasarkan kepadatan penduduk seperti pada Gambar berikut.



Sumber: Peraturan menteri PUPR No 04 tahun 2017

Gambar 5. 6 Kriteria Penentuan Jenis SPALD

Kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar rata-rata dibawah 150 jiwa/ha sehingga diusulkan jenis SPALD berupa SPALD-Setempat. Bangunan SPALD-Setempat diusulkan pada desa/kelurahan yang masuk dalam area perkotaan, area pasar, area porositas tanah tinggi, dan area wisata. Detail dari pembagian sarana prasarana pengolahan air limbah pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten Blitar tertera pada Lampiran.

5.1.5 Rencana Program dan Capaian Akses Sanitasi

RISPALD Kabupaten Blitar disusun untuk memberikan arah pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan target nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan peningkatan **akses sanitasi layak dan aman** bagi seluruh masyarakat.

Apabila rencana program disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, maka prioritas kegiatan yang dapat direncanakan adalah program-program yang dianggap paling mendesak dan strategis sesuai kondisi wilayah. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan, meskipun ruang lingkup kegiatan menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan skenario ideal.

Dengan demikian, capaian akses sanitasi yang dihasilkan kemungkinan tidak setinggi apabila tersedia anggaran yang lebih besar dan program dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. Namun, melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan pemilihan program prioritas, diharapkan target peningkatan akses sanitasi tetap dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan daerah. Berikut adalah capaian akses sanitasi apabila rencana program yang telah disusun dalam RISPALD Kabupaten Blitar ini dilaksanakan.

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD)
Kabupaten Blitar

Tabel 5. 2 Rencana Capaian

Akses Capaian Sanitasi	Capaian 2025 (%)	Rencana Capaian (%)									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Akses Layak (tidak termasuk aman)	87.7%	87.8%	87.9%	88.0%	88.1%	88.3%	88.4%	88.5%	88.6%	88.7%	88.8%
Akses Aman	1.9%	2.2%	3.3%	3.6%	3.9%	4.2%	4.4%	4.7%	5.0%	5.3%	6.5%
Akses Belum Layak	10.4%	10.1%	8.7%	8.4%	8.0%	7.6%	7.2%	6.8%	6.4%	6.0%	4.7%
BABS	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Akses Capaian Sanitasi	Capaian 2025 (%)	Rencana Capaian (%)									
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Akses Layak (tidak termasuk aman)	87.7%	88.9%	89.0%	89.1%	89.3%	89.4%	89.5%	89.6%	89.7%	89.8%	88.5%
Akses Aman	1.9%	6.8%	7.2%	7.5%	7.8%	9.0%	9.3%	9.6%	9.9%	10.2%	11.5%
Akses Belum Layak	10.4%	4.2%	3.8%	3.4%	3.0%	1.6%	1.2%	0.8%	0.3%	0.0%	0.0%
BABS	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Analisis Konsultan, 2025

Opsi Urutan 1

[illegible]

Opsi Urutan 2

[illegible]

Lampiran Tabel Hasil Skoring Zona Prioritas dan Jenis SPALD

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jlwa)	Luas Area Permukiman (ha)	Kepadatan Penduduk (Jlwa/ha)	kepadatan penduduk (nilai)	Permukiman Kumuh (ha)	Permukiman Kumuh (nilai)	Akses Sanitasi Belum Layak (%)	Akses Sanitasi Belum Layak (nilai)	Hasil Skoring (nilai)	Hasil Perankingan	Jenis SPALD	Keterangan
BAKUNG													
1	Plandirejo	3404	77.42	44	1	-	1	28%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
2	Tumpakoyot	1863	46.27	40	1	-	1	33%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
3	Bululawang	3366	28	120	2	-	1	39%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
4	Sidomulyo	1450	227.3	6	1	-	1	23%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
5	Tumpakkepuh	1689	71.2	24	1	-	1	26%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
6	Lorejo	2100	68.43	31	1	-	1	20%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
7	Kedungbanteng	1147	72.15	16	1	-	1	28%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
8	Bakung	3470	255.39	14	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
9	Sumberdadi	3421	37.01	92	2	-	1	33%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
10	Pulerejo	3456	79.29	44	1	-	1	31%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
11	Ngrejo	3339	57.6	58	2	-	1	22%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
KANIGORO													
1	Minggirsari	3756	173.87	22	1	36	3	3%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
2	Gogodeso	5511	149.89	37	1	31	3	10%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
3	Karangsono	6225	88.25	71	2	25	2	5%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
4	Satreyan	8722	209.58	42	1	15	2	4%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
5	Kanigoro	6088	173.87	35	1	8	2	5%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
6	Tlago	6863	180.79	38	1	16	2	7%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
7	Gaprang	5548	89.36	62	2	21	2	6%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
8	Jatinom	5312	66.12	80	2	12	2	14%	2	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
9	Kuningan	3012	70.59	43	1	26	3	10%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
10	Papungan	6532	185.56	35	1	19	2	9%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
11	Banggle	8954	195.25	46	1	23	2	2%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
12	Sawentar	14174	313.87	45	1	21	2	11%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
TALUN													
1	Tumpang	5502	201.26	27	1	17	2	16%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
2	Jabung	3769	90.81	42	1	46	3	8%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
3	Jeblog	4390	88.85	49	1	25	2	21%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
4	Bendosewu	5651	145.69	39	1	29	3	11%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
5	Duren	2876	36.07	80	2	-	1	14%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
6	Sragi	2217	61.4	36	1	-	1	19%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
7	Wonorejo	4668	234.6	20	1	-	1	20%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
8	Pasirharjo	3829	85	45	1	-	1	22%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
9	Kendalrejo	11201	402.3	28	1	-	1	3%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
10	Kamulan	3336	68.11	49	1	-	1	29%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
11	Talun	6576	172.75	38	1	16	2	19%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
12	Bajang	5384	146.35	37	1	18	2	16%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
13	Kaweron	4132	80.09	52	2	6	2	24%	3	7.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
14	Jajar	2902	60.51	48	1	-	1	23%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
KESAMBEN													
1	Siraman	9270	218.94	42	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
2	Kesamben	7628	170.15	45	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
3	Jugo	6706	147	46	1	-	1	0%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	

No	Desa/Keluurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Area Permukiman (ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)	kepadatan penduduk (nllai)	Permukiman Kumuh (ha)	Permukiman Kumuh (nllai)	Akses Sanitasi Belum Layak (%)	Akses Sanitasi Belum Layak (nllai)	Hasil Skoring (nllai)	Hasil Perankingan	Jenis SPALD	Keterangan
4	Pagerwojo	7509	246.14	31	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
5	Pagergunung	5549	129.29	43	1	-	1	9%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
6	Tepas	5865	122.82	48	1	-	1	4%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
7	Kemirigede	1729	49.73	35	1	-	1	0%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
8	Tapakrejo	3300	100.37	33	1	-	1	13%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
9	Bumirejo	5380	116.12	46	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
10	Sukoanyar	1473	46.07	32	1	-	1	0%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
SELOREJO													
1	Pohgajih	2588	60.37	43	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
2	Selorejo	4276	132.4	32	1	-	1	4%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
3	Ngreco	1893	87.66	22	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
4	Boro	4461	60.71	73	2	-	1	3%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
5	Olak Alen	3402	111.44	31	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
6	Sumberagung	5011	336.53	15	1	-	1	3%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
7	Banjarsari	3890	128.54	30	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
8	Ngrendeng	4991	114.48	44	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
9	Sidomulyo	5911	227.3	26	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
10	Ampelgading	3483	81.69	43	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
DOKO													
1	Slorok	4718	410.13	12	1	-	1	34%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
2	Genengan	2528	81.59	31	1	-	1	16%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
3	Jambepawon	2191	76.2	29	1	-	1	28%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
4	Sidorejo	4151	552.76	8	1	-	1	28%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
5	Doko	3708	51.46	72	2	-	1	30%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	
6	Suru	3880	106.85	36	1	-	1	29%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
7	Plumbangan	4741	98.36	48	1	-	1	23%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
8	Sumberurip	4607	98.53	47	1	-	1	27%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
9	Resapombo	8631	198.47	43	1	-	1	37%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
10	Kalimanis	2869	74.07	39	1	-	1	26%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
WLINGI													
1	Klemunan	4416	110.05	40	1	4	2	3%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
2	Wlingi	6813	82.93	82	2	13	2	2%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
3	Tangkil	6403	97.23	66	2	20	2	3%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
4	Beru	8035	125.96	64	2	32	3	3%	1	6.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
5	Babadan	9827	193.33	51	2	33	3	2%	1	6.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
6	Tembalang	1587	34.11	47	1	11	2	1%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
7	Ngadirenggo	5944	59.29	100	3	16	2	5%	1	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
8	Tegalsari	8222	271.41	30	1	46	3	9%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
9	Balerejo	3830	140.49	27	1	39	3	3%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
GANDUSARI													
1	Sumberagung	7124	261.58	27	1	-	1	0%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
2	Gondang	1678	53.92	31	1	-	1	3%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
3	Kotes	2042	64.38	32	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
4	Tambakan	3318	67.09	49	1	-	1	12%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
5	Butun	5248	97.28	54	2	-	1	1%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
6	Gandusari	2906	261.58	11	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Area Permukiman (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	kepadatan penduduk (nllal)	Permukiman Kumuh (ha)	Permukiman Kumuh (nllal)	Akses Sanitasi Belum Layak (%)	Akses Sanitasi Belum Layak (nllal)	Hasil Skorling (nllal)	Hasil Peranklengan	Jenis SPALD	Keterangan
7	Sukosewu	11502	258.26	45	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
8	Gadungan	6914			1	-	1	15%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
9	Ngaringan	8041	327.45	25	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
10	Soso	4600	87.65	52	2	-	1	30%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
11	Slumbung	3242	121.16	27	1	-	1	30%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
12	Semen	7390	158.92	47	1	-	1	4%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
13	Tulungrejo	4502	160.5	28	1	-	1	31%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
14	Krisik	6698	138.41	48	1	-	1	10%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
GARUM													
1	Pojok	7901	301.79	26	1	-	1	0%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
2	Sumberdiren	1989	37.75	53	2	-	1	0%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
3	Garum	6045	118.13	51	2	-	1	3%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
4	Tingal	4868	115.97	42	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
5	Bence	9286	200.05	46	1	-	1	3%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
6	Tawangsari	7861	148.7	53	2	-	1	1%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
7	Slorok	8487	410.13	21	1	-	1	3%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
8	Sidodadi	12287	224.77	55	2	-	1	1%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
9	Karangrejo	10251	185.84	55	2	-	1	3%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
WONOTIRTO													
1	Tambakrejo	5947	97.84	61	2	-	1	23%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat/SPALDT	Area Wisata
2	Kaligrenjeng	3006	86.06	35	1	-	1	20%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
3	Pasiraman	3604	79.15	46	1	-	1	11%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
4	Sumberboto	3926	80.21	49	1	-	1	13%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
5	Gununggede	3558	95.69	37	1	-	1	20%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
6	Ngadipuro	3901	75.05	52	2	-	1	27%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
7	Ngeni	10065	252.42	40	1	-	1	20%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Area Pasar
8	Wonotirto	6007	150.71	40	1	-	1	12%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
SELOPURO													
1	Mronjo	6134	151.53	40	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
2	Mandesan	4688	145.75	32	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
3	Selopuro	9481	229.83	41	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
4	Ploso	6392	126.06	51	2	-	1	1%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
5	Jatitengah	3806	102.82	37	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
6	Jambewangi	4395	125.5	35	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
7	Tegalrejo	4877	148.22	33	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
8	Popoh	5658	148.39	38	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
PANGGUNGREJO													
1	Serang	4301	77.97	55	2	-	1	20%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat/SPALDT	Area Wisata
2	Sumbersih	2439	66.57	37	1	-	1	25%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
3	Kaligambir	5725	103.43	55	2	-	1	14%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
4	Balerejo	3225	140.49	23	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
5	Sumberagung	2671	336.53	8	1	-	1	11%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
6	Panggungrejo	8223	253.92	32	1	-	1	15%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
7	Kalitengah	6476	153.21	42	1	-	1	17%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
8	Margomulyo	5312	151.43	35	1	-	1	9%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
9	Bumiayu	2648	86.56	31	1	-	1	17%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jlwa)	Luas Area Permukiman (ha)	Kepadatan Penduduk (Jlwa/ha)	kepadatan penduduk (nilai)	Permukiman Kumuh (ha)	Permukiman Kumuh (nilai)	Akses Sanitasi Belum Layak (%)	Akses Sanitasi Belum Layak (nilai)	Hasil Skorling (nilai)	Hasil Perankingan	Jenis SPALD	Keterangan
10	Pangungasri	3142	77.39	41	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
WATES													
1	Ringinrejo	5768	153.05	38	1	-	1	12%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
2	Sukorejo	2973	320.73	9	1	-	1	5%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
3	Tugurejo	5020	147.3	34	1	-	1	3%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
4	Wates	5148	119.92	43	1	-	1	5%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
5	Tulungrejo	3002	160.5	19	1	-	1	15%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
6	Purworejo	4142	345.55	12	1	-	1	19%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
7	Sumberarum	1522	60.57	25	1	-	1	31%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
8	Mojorejo	3404	92.62	37	1	-	1	16%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
BINANGUN													
1	Salamrejo	1860	56.57	33	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
2	Sumberkembar	4398	118.84	37	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
3	Binangun	6019	165.09	36	1	-	1	9%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
4	Birowo	4738	115.74	41	1	-	1	11%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
5	Sukorame	1821	58.2	31	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
6	Ngadri	5110	64.69	79	2	-	1	7%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
7	Sambigede	5078	126.46	40	1	-	1	8%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
8	Rejoso	4048	123.62	33	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
9	Umbuldamar	2228	83.82	27	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
10	Tawangrejo	2268	192.84	12	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
11	Ngembul	5240	107.63	49	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
12	Kedungwungu	4455	108.62	41	1	-	1	8%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
SUTOJAYAN													
1	Pandanarum	7207	151.22	48	1	-	1	13%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
2	Kedungbunder	4117	86.64	48	1	9	2	11%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
3	Sutojayan	7156	83.62	86	2	34	3	8%	1	6.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
4	Bacem	6620	444.92	15	1	-	1	12%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
5	Sumberjo	1304	317.18	4	1	-	1	18%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
6	Sukorejo	3607	320.73	11	1	12	2	15%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
7	Kalipang	8076	146.7	55	2	19	2	8%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
8	Kembangarum	1973	41.4	48	2	15	2	14%	2	6.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
9	Jingglong	6091	149.17	41	1	17	2	7%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
10	Kaulon	2198	48.42	45	1	-	1	10%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
11	Jegu	3930	112.82	35	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
Total		52279	1902.82	27									
KADEMANGAN													
1	Pangungduwet	3765	89.84	42	1	-	1	23%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
2	Pakisaji	2173	48.49	45	1	-	1	32%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
3	Maron	4790	257.23	19	1	-	1	17%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
4	Kebonsari	3614	77.96	46	1	-	1	18%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
5	Bendosari	3387	126.03	27	1	-	1	18%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
6	Suruhwadang	5032	135.81	37	1	-	1	15%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
7	Sumberjo	4201	317.18	13	1	-	1	21%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
8	Dawuhan	7999	187.77	43	1	-	1	24%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
9	Sumberjati	4305	105.83	41	1	-	1	11%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jlwa)	Luas Area Permukiman (ha)	Kepadatan Penduduk (Jlwa/ha)	kepadatan penduduk (nilai)	Permukiman Kumuh (ha)	Permukiman Kumuh (nilai)	Akses Sanitasi Belum Layak (%)	Akses Sanitasi Belum Layak (nilai)	Hasil Skorling (nilai)	Hasil Perankingan	Jenis SPALD	Keterangan
10	Plumpungrejo	3911	139	28	1	-	1	12%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
11	Jimbe	4417	83.43	53	2	30	3	10%	1	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
12	Kademangan	8039	207.85	39	1	24	2	6%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
13	Rejowinangun	3572	74.15	48	1	14	2	15%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
14	Plosorejo	7451	212.56	35	1	34	3	7%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
15	Darungan	5177	111.15	47	1	39	3	10%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
NGLEGOK													
1	Bangsri	6856	281.15	24	1	-	2	13%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
2	Jiwut	6506	179.9	36	1	-	1	12%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
3	Krenceng	2270	64.01	35	1	-	1	0%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
4	Kemloko	4740	121.64	39	1	16	2	30%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
5	Dayu	5927	146.8	40	1	20	2	24%	3	6.00	1.00	SPALD-Setempat	
6	Ngoran	4040	164.92	24	1	26	3	26%	3	7.00	1.00	SPALD-Setempat	
7	Nlegok	9168	224.64	41	1	52	3	22%	3	7.00	1.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
8	Modangan	7585	167.2	45	1	-	1	21%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
9	Penataran	10376	221.39	47	1	12	2	19%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat/SPALDT	Area Wisata
10	Kedawung	7123	264.81	27	1	-	1	21%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
11	Sumberasri	10008	303.55	33	1	-	1	21%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Porositas tanah tinggi
SANANKULON													
1	Plosoarang	3001	72.09	42	1	-	1	21%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
2	Tuliskriyo	3437	43.67	79	2	-	1	20%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
3	Bendowulung	3703	60.63	61	2	-	1	20%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
4	Purworejo	7891	345.55	23	1	-	1	22%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
5	Bendosari	2722	126.03	22	1	-	1	20%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
6	Sanankulon	4982	93.8	53	2	-	1	9%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
7	Kalipucung	6419	133.89	48	1	-	1	15%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
8	Sumber	7223	215.27	34	1	-	1	18%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
9	Sumberjo	6834	317.18	22	1	-	1	23%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
10	Jeding	1623	41.56	39	1	-	1	24%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
11	Gledug	3387	123.13	28	1	-	1	26%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
12	Sumberingin	6001	212.24	28	1	-	1	29%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
PONGGOK													
1	Bendo	5471	96.67	57	2	-	1	5%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
2	Jatilengger	4056	173.23	23	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
3	Maliran	6308	247.69	25	1	-	1	18%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
4	Kawedusan	4340	187.61	23	1	-	1	9%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
5	Langon	3142	112.12	28	1	-	1	28%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
6	Dadaplangu	4900	199.71	25	1	-	1	11%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
7	Kebonduren	9989	274.41	36	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
8	Pojok	4833	301.79	16	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
9	Ponggok	12554	418.75	30	1	-	1	3%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
10	Karangbendo	7326	259.62	28	1	-	1	24%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
11	Candirejo	9760	201.3	48	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
12	Bacem	6242	444.92	14	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
13	Ringinanyar	2711	131.81	21	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
14	Gembongan	12536	387.15	32	1	-	1	7%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	

No	Desa/Keluurahan	Jumlah Penduduk (jlwa)	Luas Area Permukiman (ha)	Kepadatan Penduduk (jlwa/ha)	kepadatan penduduk (nllal)	Permukiman Kumuh (ha)	Permukiman Kumuh (nllal)	Akses Sanitasi Belum Layak (%)	Akses Sanitasi Belum Layak (nllal)	Hasil Skoring (nllal)	Hasil Perankingan	Jenis SPALD	Keterangan
15	Sidorejo	17407	552.76	31	1	-	1	8%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat/ SPALD-Terpusat	Area Pasar
SRENGAT													
1	Purwokerto	6443	210.32	31	1	28	3	5%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
2	Selokajang	6187	184.71	33	1	16	2	5%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
3	Maron	6439	257.23	25	1	21	2	10%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
4	Ngaglik	3126	168.2	19	1	52	3	5%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
5	Pakisrejo	3571	119.76	30	1	27	3	8%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
6	Karanggayam	5150	117.44	44	1	37	3	6%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
7	Kerjen	2896	139.4	21	1	34	3	10%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
8	Wonorejo	3197	234.6	14	1	17	2	9%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
9	Kauman	3665	106.06	35	1	27	3	7%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
10	Kandangan	3938	128.43	31	1	31	3	8%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
11	Kendalrejo	2771	402.3	7	1	17	2	11%	2	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
12	Dandong	3714	111.26	33	1	15	2	7%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
13	Begelenan	3697	97.15	38	1	39	3	9%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
14	Srengat	6719	173.25	39	1	23	2	5%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
15	Togogan	3528	111.4	32	1	17	2	8%	1	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
16	Dermojoyan	4218	145.71	29	1	50	3	7%	1	5.00	2.00	SPALD-Setempat	
WONODADI													
1	Gandekan	6670	193.49	34	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
2	Kunir	6727	208.4	32	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
3	Kolomayan	6934	196.84	35	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
4	Pikatan	5950	149.8	40	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
5	Wonodadi	7228	161.49	45	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
6	Kaliboto	1901	38.58	49	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
7	Rejosari	2124	56.58	38	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
8	Tawangrejo	4207	192.84	22	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
9	Kebonagung	4350	128.48	34	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
10	Salam	2429	63.49	38	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
11	Jaten	1898	56.23	34	1	-	1	3%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
UDANAWU													
1	Ringinanom	5757	219.5	26	1	-	1	5%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
2	Sumbersari	3365	74.88	45	1	-	1	10%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
3	Karanggondang	2716	62.6	43	1	-	1	12%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
4	Tunjung	3213	113.04	28	1	-	1	14%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat	
5	Jati	2621	68.97	38	1	-	1	1%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
6	Tumenggungan	2909	84.98	34	1	-	1	8%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
7	Besuki	2618	76.61	34	1	-	1	2%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	
8	Bakung	6028	255.39	24	1	-	1	35%	3	5.00	2.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
9	Mangunan	3088	92.05	34	1	-	1	6%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
10	Sukorejo	5230	320.73	16	1	-	1	4%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
11	Slemanan	4377	121.66	36	1	-	1	11%	2	4.00	3.00	SPALD-Setempat / SPALD-Terpusat	Perkotaan
12	Bendorejo	1691	62.39	27	1	-	1	0%	1	3.00	4.00	SPALD-Setempat	

Tabel Rencana Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar tahun 2026-2030

No.	Program	Aspek	Rencana Tindak	Target (KK)	Lokasi	Jumlah			Harga Satuan (Rp juta)	Jadwal Pelaksanaan & Nilai					Sumber Dana	OPD
						KK tiap paket	Paket	Unit		2026	2027	2028	2029	2030		
1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program bantuan SPALD-S untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Total KK yang diberikan bantuan SPALD-S = 5.800 KK untuk MBR, Setiap tahun melayani 290 KK.	Tahun 2026-2027 : desa/xel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/xel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/xel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	290	20	Paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU, PMD
		Teknis	Penyusunan DED Tangki Septik Individual / Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	200	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Teknis	Pembangunan Tangki septik Individual/Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	2320	2320	2320	2320	2320	2320	APBD Kab., APBN, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD
		Teknis	Pengawasan Pembangunan Tangki septik Individual/Komunal				20	Paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas PU, PMD
		Teknis	Bantuan penyedotan tangki septik untuk MBR			200	17	Paket	100				100	100	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (I PLT)	Teknis	Studi Kelayakan Pembangunan IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044	Zona Barat Zona Tengah (Pengembangan) Zona Timur		3	Paket	200						APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, BPKAD, Dinas Perkim
		Teknis	Penyusunan DED IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044			3	Paket	500						APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, DLH, Dinas Perkim
		Teknis	Penetapan Lokasi				3	Paket	10						APBD Kab.	Dinas PU
		Teknis	Dokumen lingkungan UKL-UPL				3	Paket	200						APBD Kab.	DLH
		Teknis	Persetujuan teknis BMAL				3	Paket	150						APBD Kab.	DLH
		Teknis	Pembangunan IPLT (baru)	Zona Tengah : 2027 (10 m3/hari) Zona Barat : 2034 (20 m3/hari) Zona Timur : 2039 (20 m3/hari)			2	Paket	12000		12000				APBN	Dinas PU
		Teknis	Pengembangan/ Peningkatan Kapasitas IPLT	Zona Tengah (Pengembangan) : 2044 dari 10 m3/hari menjadi 20 m3/hari			1	Paket	8000						APBD Kab.	Dinas PU
		Teknis	Pengawasan pembangunan IPLT				3	Paket	5% konstruksi						APBD Kab.	Dinas PU
3	Penyediaan Armada Penyedotan Lumpur Tinja dan Kerasama Penyedotan dengan Pihak Swasta	Teknis	Pengadaan truk tinja	2 truk untuk masing-masing lokasi IPLT. Perkiraan harga 1 truk = 800jt	2 truk per paket	6	Truk	800			1600				APBD Kab.	Dinas PU
		Peran serta swasta	Sosialisasi, fasilitasi, dan monitoring penyedotan lumpur tinja oleh jasa sedot swasta	3 tahun sekali		7	kegiatan	75	75				75		APBD Kab.	DLH, Satpol PP, Dinas PU
4	Program Layanan Lumpur Tinja Swasta dan Tangki Septik ber-SNI	Teknis	Sensus kondisi Septiktank dan identifikasi pelanggan LLTT			6	kegiatan	100			100	100			APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Teknis	Sosialisasi & Pelaksanaan Program LLTT			8	kegiatan	75			75	75	75		APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Teknis	Stimulus/Pemicuan pembangunan jamban layak dan penggantian tangki septik menjadi SNI	Total KK dilayani 3.000 KK. 150 KK per tahun	150 KK	20	paket	1200	1200	1200	1200	1200	1200		APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Peran serta swasta	- Pelatihan dan bantuan alat&teknis untuk pengusaha sanitasi (demand activator)			7	kegiatan	75		75			75		APBD Kab.	Dinas PU
5	Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat (50 KK)	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program IPAL Komunal untuk area perkotaan, permukiman kumuh, padat, daerah wisata, dan wilayah dengan geologi yg porositasnya tinggi		Tahun 2026-2027 : desa/xel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/xel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/xel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	375	20	kegiatan	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU, PMD
		Teknis	Penyusunan DED IPAL Komunal / IPAL LPK				20	Paket	200	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU
		Teknis	Pembangunan IPAL Komunal/ IPAL LPK				100	IPAL	400	400	400	400	400	400	APBN, APBD, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD
		Teknis	Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal	5 IPAL per tahun dengan cakupan 50-100 KK			100	IPAL	400	400	400	400	400	400	APBD Kab.	Dinas PU, PMD
		Teknis	Bantuan operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal (penyedotan lumpur)	30 IPAL per tahun			20	paket	45	45	45	45	45	45	APBD Kab.	Dinas PU
		Peran Serta Masyarakat	Pembinaan dan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal bagi MDM/KP P				7	kegiatan	75	75			75		APBD Kab.	Dinas PU
		Peran Serta Masyarakat	Pembentukan dan legalitas KSM/KPP				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	
		Peraturan	Penyusunan naskah akademik perda Pengelolaan Air Limbah Domestik				1	kegiatan	100		100				APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Penyusunan raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik				1	kegiatan	200		200				APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik				3	kegiatan	50			50	50	50	APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo
		Peraturan	Pembentukan raperbup UPTO Air Limbah Domestik.				1	kegiatan	50		50				APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, dinas PU
		Peraturan	Penyusunan raperbup yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi air limbah domestik (opsional)				1	kegiatan	50		50				APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim

No.	Program	Aspek	Rencana Tindak	Target (KK)	Lokasi	Jumlah			Marga Satuan (Rp juta)	Jadwal Pelaksanaan & Nilai					Sumber Dana	OPD	
						KK tiap paket	Paket	Unit		2026	2027	2028	2029	2030			
6	Penguatan Pengaturan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan	Sosialisasi perbup Retribusi				4	kegiatan	50			50			APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo	
		Peraturan	Penyusunan raperbup tentang layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)				1	kegiatan	50		50				APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim	
		Peraturan	Sosialisasi perbup LLTT				4	kegiatan	50			50			APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo	
		Peraturan	Pengawasan penerapan Perda Air Limbah dan Perbup LLTT				6	kegiatan	50			50			APBD Kab.	Bagian hukum, Satpol PP, DLH	
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perda Air Limbah				1	kegiatan	200						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim	
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perbup LLTT				1	kegiatan	100						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kelembagaan	Penyusunan kajian akademik pemisahan UPTD khusus limbah domestik.				1	kegiatan	50	50					APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, Dinas PU	
		Kelembagaan	Rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan ruang lingkup tugas UPTD.				1	kegiatan	50		50				APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola UPTD dalam bentuk pelatihan teknis.				2	kegiatan	100			100		100	APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Pelatihan jabatan fungsional				1	kegiatan	100			100			APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Fasilitasi pengembangan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan swasta				4	kegiatan	50				50		APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perkim, DLH, Dinas Kominfo	
		Kelembagaan	Evaluasi dan revisi SOP				3	kegiatan	100						APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Evaluasi dan perubahan bentuk kelembagaan (jika diperlukan)				2	kegiatan	200						APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, Dinas PU	
8	Promosi dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPiAD) dan PHBS	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Masyarakat tentang Pengelolaan SPAL dan Septic tank yang sesuai Standart				7	kegiatan	75		75			75	APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo	
		Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, pengembangan, pembinaan, pemcuan media informasi dan promosi sadar hidup sehat berbasis masyarakat dan STBM				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo	
		Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi tentang pendidikan sanitasi bagi siswa sekolah melalui penyebaran pengetahuan secara terpadu dan terstruktur pada siswa SD, SMP dan SMA				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan	
9	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air	Monev	Monitoring kualitas effluent IPLT				19	paket	50		50	50	50	50	APBD Kab.	Dinas PU, DLH	
		Monev	Monitoring kualitas air tanah				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinkes	
		Monev	Monitoring kualitas air permukaan				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	DLH	
		Monev	Monitoring kualitas effluen IPAL Komunal	1 paket = 150 IPAL			20	paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	DLH	
10	Review dokumen RISPAL dan SSK	Teknis	Review dokumen RISPAL (setiap 5 tahun sekali) 2025				4	paket	450					450	APBD Kab.	Bappeda, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perkim	
		Teknis	Review dokumen SSK (5 tahun sekali) 2023-2027				4	paket	200			200			APBD Kab.	Bappeda, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perkim	
Total Pembiayaan											5640	19740	6765	6515	6915		
Sumber Pembiayaan APBN											1360	13360	1360	1360	1360		
Sumber Pembiayaan APBD Kabupa											4280	6380	5405	5155	5555		

Tabel Rencana Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar tahun 2031-2035

No.	Program	Aspek	Rencana Tindak	Target (KK)	Lokasi	Jumlah		Harga Satuan (Rp. Juta)	Jadwal Pelaksanaan & Nilai					Sumber Dana	OPD
						KK tiap paket	Paket	Unit	2031	2032	2033	2034	2035		
1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program bantuan SPALD-S untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Total KK yang diberikan bantuan SPALD-S = 5.800 KK untuk MBR, Setiap tahun melayani 290 KK.	Tahun 2026-2027 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	290	20	Paket	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU, PMD
		Teknis	Penyusunan DED Tangki Septik Individual / Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Teknis	Pembangunan Tangki septik Individual/Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	2320	2320	2320	2320	2320	APBD Kab., APBN, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD
		Teknis	Pengawasan Pembangunan Tangki septik Individual/Komunal				20	Paket	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas PU, PMD
		Teknis	Bantuan penyedotan tangki septik untuk MBR			200	17	Paket	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teknis	Studi Kelayakan Pembangunan IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044	Zona Barat Zona Tengah (Pengembangan) Zona Timur		3	Paket	200			200		APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, BPKAD, Dinas Perkim
		Teknis	Penyusunan DED IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044			3	Paket	500			500		APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, DLH, Dinas Perkim
		Teknis	Penetapan Lokasi				3	Paket	10			10		APBD Kab.	Dinas PU
		Teknis	Dokumen lingkungan UKL-UPL				3	Paket	200			200		APBD Kab.	DLH
		Teknis	Persetujuan teknis BMAL				3	Paket	150			150		APBD Kab.	DLH
		Teknis	Pembangunan IPLT (baru)	Zona Tengah : 2027 (10 m3/hari) Zona Barat : 2034 (20 m3/hari) Zona Timur : 2039 (20 m3/hari)			2	Paket	12000				12000	APBN	Dinas PU
		Teknis	Pengembangan/Peningkatan Kapasitas IPLT	Zona Tengah (Pengembangan) : 2044 dari 10 m3/hari menjadi 20 m3/hari			1	Paket	8000					APBD Kab.	Dinas PU
		Teknis	Pengawasan pembangunan IPLT				3	Paket	5% konstruksi				600	APBD Kab.	Dinas PU
3	Penyediaan Armada Penyedotan Lumpur Tinja dan Kerjasama Penyedotan dengan Pihak Swasta	Teknis	Pengadaan truk tinja	2 truk untuk masing-masing lokasi IPLT. Perkiraan harga 1 truk = 800jt		2 truk per paket	6	Truk	800				1600	APBD Kab.	Dinas PU
		Peran serta swasta	Sosialisasi, fasilitasi, dan monitoring penyedotan lumpur tinja oleh jasa sedot swasta	3 tahun sekali			7	kegiatan	75		75		75	APBD Kab.	DLH, Satpol P P, Dinas PU
4	Program Layanan Lumpur Tinja Swasta dan Tangki Septik ber-SNI	Teknis	Sensus kondisi Septik tank dan Identifikasi pelanggan LLTT				6	kegiatan	100					APBD Kab.	
		Peran serta masyarakat	Sosialisasi & Pelaksanaan Program LLTT				8	kegiatan	75		75			APBD Kab.	Dinkes, Dinas kominfo, Dinas PU
		Teknis	Stimulasi/ Pemicuan pembangunan jamban layak dan pengantian tangki septik menjadi SNI	Total KK dilayani 3.000 KK. 150 KK per tahun		150 KK	20	paket	1200	1200	1200	1200	1200	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Peran serta swasta	- Pelatihan dan bantuan alat&teknis untuk pengusaha sanitasi (demand activator)				7	kegiatan	75		75			APBD Kab.	Dinas PU
5	Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat (50 KK)	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program IPAL Komunal untuk area perkotaan, permukiman kumuh, padat, daerah wisata, dan wilayah dengan geologi yg porositasnya tinggi		Tahun 2026-2027 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	375	20	kegiatan	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU, PMD
		Teknis	Penyusunan DED IPAL Komunal / IPAL LPK				20	Paket	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU
		Teknis	Pembangunan IPAL Komunal/ IPAL LPK				100	IPAL	400	400	400	400	400	APBN, APBD, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD
		Teknis	Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal	5 IPAL per tahun dengan cakupan 50-100 KK			100	IPAL	400	400	400	400	400	APBD Kab.	Dinas PU, PMD
		Teknis	Bantuan operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal (penyedotan lumpur)	30 IPAL per tahun			20	paket	45	45	45	45	45	APBD Kab.	Dinas PU
		Peran Serta Masyarakat	Pembinaan dan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal bagi KSM/KPP				7	kegiatan	75		75		75	APBD Kab.	Dinas PU
		Peran Serta Masyarakat	Pembentukan dan legalitas KSM/KPP				20	kegiatan	75	75	75	75	75	APBD Kab.	
		Peraturan	Penyusunan naskah akademik perda Pengelolaan Air Limbah Domestik				1	kegiatan	100					APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Penyusunan raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik				1	kegiatan	200					APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik				3	kegiatan	50					APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo
		Peraturan	Pembentukan raperbup UPTD Air Limbah Domestik.				1	kegiatan	50					APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, dinas PU
		Peraturan	Penyusunan raperbup yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi air limbah domestik. (opsional)				1	kegiatan	50					APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim

No.	Program	Aspek	Rencana Tindak	Target (KK)	Lokasi	Jumlah			Harga Satuan (Rp. juta)	Jadwal Pelaksanaan & Misi					Sumber Dana	OPD	
						KK tiap paket	Paket	Unit		2031	2032	2033	2034	2035			
6	Penguatan Pengaturan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan	Sosialisasi perbup Retribusi				4	kegiatan	50			50			APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo	
		Peraturan	Penyusunan raperbup tentang layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim	
		Peraturan	Sosialisasi perbup LLTT				4	kegiatan	50			50			APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo	
		Peraturan	Pengawasan Penerapan Perda Air Limbah dan Perbup LLTT				6	kegiatan	50	50			50		APBD Kab.	Bagian hukum, Satpol PP, DLH	
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perda Air Limbah				1	kegiatan	200						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim	
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perbup LLTT				1	kegiatan	100						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kelembagaan	Penyusunan kajian akademik pemisahan UPTD khusus limbah domestik.				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, Dinas PU	
		Kelembagaan	Rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan ruang lingkup tugas UPTD.				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola UPTD dalam bentuk pelatihan teknis.				2	kegiatan	100						APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Pelatihan jabatan fungsional				1	kegiatan	100						APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Fasilitasi pengembangan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan swasta				4	kegiatan	50				50		APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perkim, DLH, Dinas Kominfo	
		Kelembagaan	Evaluasi dan revisi SOP				3	kegiatan	100	100					APBD Kab.	Dinas PU	
		Kelembagaan	Evaluasi dan perubahan bentuk kelembagaan (jika diperlukan)				2	kegiatan	200						APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, Dinas PU	
6	Promosi dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SP-LAD) dan PHBS	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Masyarakat tentang Pengelolaan SPAL dan Septic tank yang sesuai Standart				7	kegiatan	75			75			APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo	
		Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, pengembangan, pembinaan, pemecuan media Informasi dan promosi sadar hidup sehat berbasis masyarakat dan STBM				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo	
		Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi tentang pendidikan sanitasi bagi siswa sekolah melalui penyebaran pengetahuan secara terpadu dan terstruktur pada siswa SD, SMP dan SMA				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan	
9	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air	Monev	Monitoring kualitas effluent IPLT				19	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinas PU, DLH	
		Monev	Monitoring kualitas air tanah				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinkes	
		Monev	Monitoring kualitas air permukaan				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	DLH	
		Monev	Monitoring kualitas effluen IPAL Komunal	1 paket = 150 IPAL			20	paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	DLH	
10	Review dokumen RISPAL dan SSK	Teknis	Review dokumen RISPAL (setiap 5 tahun sekali) 2025				4	paket	450					450	APBD Kab.	Bappeda, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perkim	
		Teknis	Review dokumen SSK (5 tahun sekali) 2023-2027				4	paket	200			200			APBD Kab.	Bappeda, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perkim	
Total Pembiayaan											6240	6240	6615	7250	20890		
Sumber Pembiayaan APBDN											1360	1360	1360	1360	13380		
Sumber Pembiayaan APBD Kabupaten											4880	4880	5255	5890	7530		

Tabel Rencana Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar tahun 2036-2040

No.	Program	Aspek	Rencana Tindak	Target (KK)	Lokasi	Jumlah			Harga Satuan (Rp juta)	Jadwal Pelaksanaan & Nilai						Sumber Dana	OPD
						KK tiap paket	Paket	Unit		2036	2037	2038	2039	2040			
1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program bantuan SPALD-S untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Total KK yang diberikan bantuan SPALD-S = 5.800 KK untuk MBR, Setiap tahun melayani 290 KK.	Tahun 2026-2027 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	290	20	Paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU, PMD	
		Teknis	Penyusunan DED Tangki Septik Individual / Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	200	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinsos, DinasPU	
		Teknis	Pembangunan Tangki septik individual/Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	2320	2320	2320	2320	2320	2320	APBD Kab., APBN, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD	
		Teknis	Pengawasan Pembangunan Tangki septik Individual/Komunal				20	Paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas PU, PMD	
		Teknis	Bantuan penyedotan tangki septik untuk MBR			Total KK terlayani 3.400 KK. Setiap tahun melayani 200 KK	200	17	Paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teknis	Studi Kelayakan Pembangunan IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044	Zona Barat Zona Tengah (Pengembangan) Zona Timur		3	Paket	200				200		APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, BPKAD, Dinas Perkim	
		Teknis	Penyusunan DED IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044			3	Paket	500				500		APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, DLH, Dinas Perkim	
		Teknis	Penetapan Lokasi				3	Paket	10				10		APBD Kab.	DinasPU	
		Teknis	Dokumen lingkungan UKL-UPL				3	Paket	200				200		APBD Kab.	DLH	
		Teknis	Persetujuan teknis BMAL				3	Paket	150				150		APBD Kab.	DLH	
		Teknis	Pembangunan IPLT (baru)	Zona Tengah : 2027 (10 m3/hari) Zona Barat : 2034 (20 m3/hari) Zona Timur : 2039 (20 m3/hari)			2	Paket	12000					12000	APBN	DinasPU	
		Teknis	Pengembangan/Peningkatan Kapasitas IPLT	Zona Tengah (Pengembangan) : 2044dari 10 m3/hari menjadi 20 m3/hari			1	Paket	8000						APBD Kab.	DinasPU	
		Teknis	Pengawasan pembangunan IPLT				3	Paket	5% konstruksi					600	APBD Kab.	Dinas PU	
3	Penyediaan Armada Penyedotan Lumpur Tinja dan Kerjasama Penyedotan dengan Pihak Swasta	Teknis	Operasional dan pemeliharaan IPLT dan armada truk tinja			18	Paket	500	1000	1000	1000	1000	1000	APBD Kab.	DinasPU		
		Teknis	Pengadaan truk tinja	2 truk untuk masing-masing lokasi IPLT. Perkiraan harga 1 truk = 800jt	2 truk per paket	6	Truk	800					1600	APBD Kab.	DinasPU		
		Peran serta swasta	Sosialisasi, fasilitasi, dan monitoring penyedotan lumpurtinja oleh jasa sedot swasta	3 tahun sekali		7	kegiatan	75				75		APBD Kab.	DLH, Satpol PP, Dinas PU		
		Teknis	Sensus kondisi Septik tank dan Identifikasi pelanggan LLTT			6	kegiatan	100	100	100				APBD Kab.			
4	Program Layanan Lumpur Tinja Swasta dan Tangki Septik ber-SNI	Peran serta masyarakat	Sosialisasi & Pelaksanaan Prottam LLTT				8	kegiatan	75	75			75		APBD Kab.	Dinkes, Dinas kominfo, Dinas PU	
		Teknis	Stimulasi/Pemicuan pembangunan jamban layak dan penggantian tangki septik menjadi SNI	Total KK dilayani 3.000 KK. 150 KK per tahun	150 KK	20	paket	1200	1200	1200	1200	1200	1200	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU		
		Peran serta swasta	- Pelatihan dan bantuan alat&teknis untuk pengusaha sanitasi (demand activator)			7	kegiatan	75	75			75		APBDKab.	DinasPU		
		Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program IPAL Komunal untuk area perkotaan, permukiman kumuh, padat, daerah wisata, dan wilayah dengan geologi yg porositasnya tinggi		Tahun 2026-2027 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	375	20	kegiatan	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU, PMD	
Teknis	Penyusunan DED IPAL Komunal / IPAL LPK		20	Paket			200	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU			
Teknis	Pembangunan IPAL Komuna/ / IPAL LPK		100	IPAL			400	400	400	400	400	400	APBN, APBD, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD			
Teknis	Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal	5 IPAL pertahun dengancakupan 50-100 KK	100	IPAL			400	400	400	400	400	400	APBD Kab.	Dinas PU, PMD			
Teknis	Bantuan operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal (penyedotan lumpur)	30 IPAL per tahun	20	paket			45	45	45	45	45	45	APBD Kab.	Dinas PU			
Peran Serta Masyarakat	Pembinaan dan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal bagi KSM/KPP		7	kegiatan			75			75			APBD Kab.	Dinas PU			
Peran Serta Masyarakat	Pembentukan dan legalitas KSM/KPP		20	kegiatan			75	75	75	75	75	75	APBD Kab.				
		Peraturan	Penyusunan naskah akademik perda Pengelolaan Air Limbah Domestik					1	kegiatan	100						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Penyusunan raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik			1	kegiatan	200						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim		
		Peraturan	Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik			3	kegiatan	50						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas komInfo		
		Peraturan	Pembentukan raperbup UPTD Air Limbah Domestik.			1	kegiatan	50						APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, dinas PU		
		Peraturan	Penyusunan raperbup yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi air limbah domestik. (opsional)			1	kegiatan	50						APBDKab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim		

No.	Program	Aspek	Rencana Tindak	Target (KK)	Lokasi	Jumlah			Harga Satuan (Rp juta)	Jadwal Pelaksanaan & Nilai					Sumber Dana	OPD
						KK/tiap paket	Paket	Unit		2036	2037	2038	2039	2040		
6	Penguatan Pengaturan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan	Sosialisasi perbup Retribusi				4	kegiatan	50			50			APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo
		Peraturan	Penyusunan raperbup tentang layanan lumpurtinja terjadwal (LLTT)				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Sosialisasi perbup LLTT				4	kegiatan	50			50			APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo
		Peraturan	Pengawasan penerapan Perda Air Limbah dan Perbup LLTT				6	kegiatan	50		50			50	APBD Kab.	Bagian hukum, Satpol PP, DLH
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perda Air Limbah				1	kegiatan	200						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perbup LLTT				1	kegiatan	100						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kelembagaan	Penyusunan kajian akademik pemisahan UPTD khusus limbah domestik.				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, Dinas PU
		Kelembagaan	Rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan ruang lingkup tugas UPTD.				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Dinas PU
		Kelembagaan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola UPTD dalam bentuk pelatihan teknis.				2	kegiatan	100						APBD Kab.	Dinas PU
		Kelembagaan	Pelatihan jabatan fungsional				1	kegiatan	100						APBD Kab.	Dinas PU
		Kelembagaan	Facilitasi pengembangan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan swasta				4	kegiatan	50				50		APBD Kab.	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perkim, DLH, Dinas Kominfo
		Kelembagaan	Evaluasi dan revisi SOP				3	kegiatan	100	100					APBD Kab.	Dinas PU
		Kelembagaan	Evaluasi dan perubahan bentuk kelembagaan (jika diperlukan)				2	kegiatan	200	200					APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, DinasPU
8	Promosi dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) dan PHBS	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Masyarakat tentang Pengelolaan SPAL dan Septic tank yang sesuai Standart				7	kegiatan	75	75			75		APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo
		Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, pengembangan, pembinaan, pemecuan media Informasi dan promosi sadar hidup sehatberbasis masyarakat danSTBM				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo
		Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi tentang pendidikan sanitasi bagi siswa sekolah melalui penyebaran pengetahuan secara terpadu dan terstruktur pada siswa SD, SMP dan SMA				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	Dinas PU, Dinkes, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan
9	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air	Monev	Monitoring kualitas effluent IPLT				19	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinas PU, DLH
		Monev	Monitoring kualitas airtanah				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinkes
		Monev	Monitoring kualitas air permukaan				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	DLH
		Monev	Monitoring kualitas effluen IPAL Komunal	1 paket = 150 IPAL			20	paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	DLH
10	Review dokumen RISPAL dan SSK	Teknis	Review dokumen RISPAL (setiap 5 tahun sekali) 2025				4	paket	450					450	APBD Kab.	Bappeda, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perkim
		Teknis	Review dokumen SSK (5 tahun sekali) 2023-2027				4	paket	200			200			APBD Kab.	Bappeda, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perkim
Total Pembiayaan											7215	6740	7040	7925	21290	
Sumber Pembiayaan APBN											1360	1360	1360	1360	13360	
Sumber Pembiayaan APBD Kabupa											5855	5380	5680	6565	7930	

Tabel Rencana Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar tahun 2041-2045

No.	Program	Aspek	Rencana Tindak	Target (KK)	Lokasi	Jumlah			Harga Satuan (Rp juta)	Jadwal Pelaksanaan & Nilai					Sumber Dana	OPD
						KK tiap paket	Paket	Unit		2041	2042	2043	2044	2045		
1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program bantuan SPALD-S untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Total KK yang diberikan bantuan SPALD-S = 5.800 KK untuk MBR, Setiap tahun melayani 290 KK.	Tahun 2026-2027 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	290	20	Paket	50	50	50	50	50	50	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU, PMD
		Teknis	Penyusunan DED Tangki Septik Individual / Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	200	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Teknis	Pembangunan Tangki septik Individual/Komunal (untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)				20	Paket	2320	2320	2320	2320	2320	2320	APBD Kab., APBN, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD
		Teknis	Pengawasan Pembangunan Tangki septik Individual/Komunal				20	Paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas PU, PMD
		Teknis	Bantuan penyedotan tangki septik untuk MBR			200	17	Paket	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teknis	Studi Kelayakan Pembangunan IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044	Zona Barat Zona Tengah (Pengembangan) Zona Timur		3	Paket	200				200		APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, BPKAD, Dinas Perkim
		Teknis	Penyusunan DED IPLT	Zona Barat : 2034 Zona Timur : 2039 Zona Tengah (Pengembangan) : 2044			3	Paket	500				500		APBD Kab.	Dinas PU, Bappeda, DLH, Dinas Perkim
		Teknis	Penetapan Lokasi				3	Paket	10				10		APBD Kab.	Dinas PU
		Teknis	Dokumen lingkungan UKL-UPL				3	Paket	200				200		APBD Kab.	DLH
		Teknis	Peretujuan teknis BMAL				3	Paket	150				150		APBD Kab.	DLH
		Teknis	Pembangunan IPLT (baru)	Zona Tengah : 2027 (10 m3/hari) Zona Barat : 2034 (20 m3/hari) Zona Timur : 2039 (20 m3/hari)			2	Paket	12000						APBN	Dinas PU
		Teknis	Pengembangan/Peningkatan Kapasitas IPLT	Zona Tengah (Pengembangan) : 2044 dari 10 m3/hari menjadi 20 m3/hari			1	Paket	8000					8000	APBD Kab.	Dinas PU
		Teknis	Pengawasan pembangunan IPLT				3	Paket	5% konstruksi					400	APBD Kab.	Dinas PU
		Teknis	Operasional dan pemeliharaan IPLT dan armada truk tinja				18	Paket	500	1500	1500	1500	1500	1500	APBD Kab.	Dinas PU
3	Penyediaan Armada Penyedotan Lumpur Tinja dan Kerjasama Penyedotan dengan Pihak Swasta	Teknis	Pengadaan truk tinja	2 truk untuk masing-masing lokasi IPLT. Perkiraan harga 1 truk = 800jt	2 truk per paket	6	Truk	800							APBD Kab.	Dinas PU
		Peran serta swasta	Sosialisasi, fasilitasi, dan monitoring penyedotan lumpur tinja oleh jasa sedot swasta	3 tahun sekali		7	kegiatan	75	75				75		APBD Kab.	DLH, Satpol PP, Dinas PU
4	Program Layanan Lumpur Tinja Swasta dan Tangki Septik ber-SNI	Teknis	Sensus kondisi Septik tank dan Identifikasi pelanggan LLT			6	kegiatan	100	100	100					APBD Kab.	
		Peran serta masyarakat	Sosialisasi & Pelaksanaan Program LLT			8	kegiatan	75		75				75	APBD Kab.	Dinkes, Dinas kominfo, Dinas PU
		Teknis	Stimulasi/Pemicuan pembangunan jamban layak dan penggantian tangki septik menjadi SNI	Total KK dilayani 3.000 KK. 150 KK pertama	150 KK	20	paket	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	APBD Kab.	Dinsos, Dinas PU
		Peran serta swasta	-Pelatihan dan bantuan alat&teknis untuk pengusaha sanitasi (demand activator)			7	kegiatan	75		75				75	APBD Kab.	Dinas PU
5	Pembangunan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat (50 KK)	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi program IPAL Komunal untuk area perkotaan, permukiman kumuh, padat, daerah wisata, dan wilayah dengan geologi & porositasnya tinggi		Tahun 2026-2027 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 1 Tahun 2028-2030 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 2 Tahun 2031-2045 : desa/kel yang termasuk pada prioritas 3 dan 4	375	20	kegiatan	100	100	100	100	100	100	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU, PMD
		Teknis	Penyusunan DED IPAL Komunal / IPAL LPK				20	Paket	200	200	200	200	200	200	APBD Kab.	Dinas Perkim, Dinas PU
		Teknis	Pembangunan IPAL Komunal/ IPAL LPK				100	IPAL	400	400	400	400	400	400	APBN, APBD, CSR, BUMDes	Dinas PU, PMD
		Teknis	Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal	5 IPAL per tahun dengan cakupan 50-100 KK			100	IPAL	400	400	400	400	400	400	APBD Kab.	Dinas PU, PMD
		Teknis	Bantuan operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal (penyedotan lumpur)	30 IPAL per tahun			20	paket	45	45	45	45	45	45	APBD Kab.	Dinas PU
		Peran Serta Masyarakat	Pembinaan dan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal bagi KSM/KPP				7	kegiatan	75	75			75		APBD Kab.	Dinas PU
		Peran Serta Masyarakat	Pembentukan dan legalitas KSM/KPP				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Kab.	
		Peraturan	Penyusunan naskah akademik perda Pengelolaan Air Limbah Domestik				1	kegiatan	100						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Penyusunan raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik				1	kegiatan	200						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim
		Peraturan	Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik				3	kegiatan	50						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim, Dinas kominfo
		Peraturan	Pembentukan raperbup UPTD Air Limbah Domestik.				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Sekda, bagian hukum, bappeda, dinas PU
		Peraturan	Penyusunan raperbup yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi air limbah domestik. (opsional)				1	kegiatan	50						APBD Kab.	Bagian hukum, bappeda, dinas PU, DLH, Dinkes, dinas perkim

No	Program	Aspek	Berkas Tindak	Target (T)	Indikator	Jumlah UU paket	Jumlah paket	Uraian	Masa Terealisasi (Bulan)	Jadwal Pelaksanaan 2023					Sumber Dana	IPD
										2021	2022	2023	2024	2025		
6	Penguatan Penguasaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan	Kualifikasi perkapita Baurkita				2	kegiatan	50			50		APBD Lab	Bagian hukum, happepa, dinas PU, DLR, Dinas, dinas perkim, Dinas kaminfo	
		Peraturan	Pemantauan kesehatan lingkungan rumah tangga terpadu (LRTT)				1	kegiatan	50					APBD Lab	Bagian hukum, happepa, dinas PU, DLR, Dinas, dinas perkim	
		Peraturan	Kualifikasi perkapita LRTT				2	kegiatan	50			50		APBD Lab	Bagian hukum, happepa, dinas PU, DLR, Dinas, dinas perkim, Dinas kaminfo	
		Peraturan	Pengawasan penerapan Perda Air Limbah dan Perkapita LRTT				6	kegiatan	50			50		APBD Lab	Bagian hukum, Satpol PP, DLR	
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perda Air Limbah				1	kegiatan	200	200				APBD Lab	Bagian hukum, happepa, dinas PU, DLR, Dinas, dinas perkim	
		Peraturan	Evaluasi dan perubahan Perkapita LRTT				1	kegiatan	100		100			APBD Lab	Bagian hukum, happepa, dinas PU, DLR, Dinas, dinas perkim	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kelembagaan	Pemantauan kajian akademik pemukiman UPTD khusus limbah domestik				1	kegiatan	50					APBD Lab	Sebagian bagian hukum, happepa, Dinas PU	
		Kelembagaan	Rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan ruang lingkup tugas UPTD				1	kegiatan	50					APBD Lab	Dinas PU	
		Kelembagaan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola UPTD dalam bentuk pelatihan teknis				2	kegiatan	100					APBD Lab	Dinas PU	
		Kelembagaan	Pelatihan jabatan fungsional				1	kegiatan	100					APBD Lab	Dinas PU	
		Kelembagaan	Fasilitasi pengembangan kerja sama antar daerah dan kabupaten dengan swasta				4	kegiatan	50				50	APBD Lab	happepa, Dinas PU, Dinas Perkim, DLR, Dinas kaminfo	
		Kelembagaan	Evaluasi dan revisi SOP				1	kegiatan	100	100				APBD Lab	Dinas PU	
8	Peran Serta Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan PRBS	Kelembagaan	Evaluasi dan perubahan bentuk kelembagaan (jika diperlukan)				2	kegiatan	200				200	APBD Lab	Sebagian bagian hukum, happepa, Dinas PU	
		Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Masyarakat tentang Pengelolaan SPAL dan Septic tank yang sesuai standar				7	kegiatan	75		75		75	APBD Lab	Dinas PU, Dinas, Dinas kaminfo	
		Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, pengembangan, pembinaan, pemecuan media informasi dan promosi sadar hidup sehat berbasis masyarakat dan STRM				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Lab	Dinas PU, Dinas, Dinas kaminfo
9	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air	Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi tentang pendidikan sanitasi bagi siswa sekolah melalui penyebaran pengetahuan secara terpadu dan terstruktur pada siswa SD, SMP dan SMA				20	kegiatan	75	75	75	75	75	75	APBD Lab	Dinas PU, Dinas, Dinas kaminfo, Dinas Pendidikan
		Money	Monitoring kualitas effluent IPLT				10	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Lab	Dinas PU, DLR
		Money	Monitoring kualitas air tanah				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Lab	Dinas PU
		Money	Monitoring kualitas air permukaan				20	paket	50	50	50	50	50	50	APBD Lab	DLR
10	Review dokumen RISPAL dan RSL	Money	Monitoring kualitas effluent PAL Komunal	1 paket = 150 PAL			20	paket	100	100	100	100	100	100	APBD Lab	DLR
		Ikhtis	Review dokumen RISPAL (setiap 5 tahun sekali) 2025				4	paket	450					450	APBD Lab	happepa, Dinas, Dinas PU, Dinas Perkim
		Ikhtis	Review dokumen RSL (5 tahun sekali) 2023-2027				4	paket	200			200		APBD Lab	happepa, Dinas, Dinas PU, Dinas Perkim	
Total Pembinaan										7540	7515	7440	6170	5075		
Sumber Pembiayaan APBN										1360	1360	1360	1360	9360		
Sumber Pembiayaan APBD Labupa										6230	6155	6080	4810	7005		

BAB VI

PENUTUP

1. Urgensi dan Kondisi Eksisting

Kabupaten Blitar menghadapi tantangan sanitasi yang signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 1.261.699 jiwa. Meskipun cakupan akses sanitasi layak telah mencapai 87,9% pada tahun 2024, akses aman masih tergolong sangat rendah, yakni hanya 1,94%. Hal ini disebabkan oleh:

- Mayoritas tangki septik masyarakat belum sesuai standar SNI dan tidak dilakukan penyedotan secara berkala.
- Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) milik Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga pengelolaan lumpur tinja masih bergantung pada kerja sama dengan daerah lain (Kota Blitar) dan pihak swasta.
- Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah yang sistematis masih rendah, yakni hanya 38%.

2. Visi dan Strategi Pengembangan

RISPAL Kabupaten Blitar disusun sebagai pedoman strategis untuk periode 20 tahun (2026–2045). Fokus utama adalah mengubah paradigma pengelolaan air limbah dari sekadar pembuangan menjadi pengolahan yang aman dan berkelanjutan. Strategi utama meliputi:

- Pengembangan Infrastruktur Strategis: Prioritas pembangunan IPLT dalam jangka pendek (tahun 2026) untuk menjamin mata rantai sanitasi yang tuntas
- Pemerataan SPALD: Pembangunan IPAL Komunal dan peningkatan kualitas SPALD-Setempat (tangki septik kedap) di kawasan padat penduduk, daerah kumuh, serta area dengan porositas tanah tinggi
- Penguatan Kelembagaan & Regulasi: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfokus pada operasionalisasi sarana-prasarana serta penyusunan Perda Air Limbah sebagai dasar hukum pemungutan retribusi dan penegakan aturan.

3. Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan analisis teknis, Kabupaten Blitar diarahkan menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebagai sistem utama karena kepadatan penduduk rata-rata masih di bawah 150 jiwa/ha. Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi:

- Jangka Pendek (2026-2027) : Pembangunan IPLT, pengadaan armada truk tinja oleh Pemda, serta peningkatan status 150 unit IPAL Komunal.

BAB VI

PENUTUP

1. Urgensi dan Kondisi Eksisting

Kabupaten Blitar menghadapi tantangan sanitasi yang signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 1.261.699 jiwa. Meskipun cakupan akses sanitasi layak telah mencapai 87,9% pada tahun 2024, akses aman masih tergolong sangat rendah, yakni hanya 1,94%. Hal ini disebabkan oleh:

- Mayoritas tangki septik masyarakat belum sesuai standar SNI dan tidak dilakukan penyedotan secara berkala.
- Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) milik Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga pengelolaan lumpur tinja masih bergantung pada kerja sama dengan daerah lain (Kota Blitar) dan pihak swasta.
- Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah yang sistematis masih rendah, yakni hanya 38%.

2. Visi dan Strategi Pengembangan

RISPAL Kabupaten Blitar disusun sebagai pedoman strategis untuk periode 20 tahun (2026–2045). Fokus utama adalah mengubah paradigma pengelolaan air limbah dari sekadar pembuangan menjadi pengolahan yang aman dan berkelanjutan. Strategi utama meliputi:

- Pengembangan Infrastruktur Strategis: Prioritas pembangunan IPLT dalam jangka pendek (tahun 2026) untuk menjamin mata rantai sanitasi yang tuntas
- Pemerataan SPALD: Pembangunan IPAL Komunal dan peningkatan kualitas SPALD-Setempat (tangki septik kedap) di kawasan padat penduduk, daerah kumuh, serta area dengan porositas tanah tinggi
- Penguatan Kelembagaan & Regulasi: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfokus pada operasionalisasi sarana-prasarana serta penyusunan Perda Air Limbah sebagai dasar hukum pemungutan retribusi dan penegakan aturan.

3. Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan analisis teknis, Kabupaten Blitar diarahkan menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebagai sistem utama karena kepadatan penduduk rata-rata masih di bawah 150 jiwa/ha. Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi:

- Jangka Pendek (2026-2027) : Pembangunan IPLT, pengadaan armada truk tinja oleh Pemda, serta peningkatan status 150 unit IPAL Komunal.

- Jangka Menengah (2025-2030): Peningkatan cakupan tangki septik layak menjadi 95%, pembinaan intensif Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan pemantauan rutin kualitas lingkungan.
- Jangka Panjang (2025-2045):* Pencapaian target SDG's 2030 dan Indonesia Emas 2045 melalui sistem pengolahan air limbah yang terintegrasi secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Rekomendasi Penutup

Keberhasilan implementasi RISPALD ini sangat bergantung pada:

1. Dukungan Anggaran:* Peningkatan alokasi dana melalui APBD, DAK, maupun pemanfaatan bantuan APBN untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur.
2. Peran Serta Masyarakat:* Sosialisasi masif mengenai pentingnya penyedotan tinja berkala dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun oleh KSM.
3. Sinergi Antar-Sektor:* Koordinasi lintas dinas (PUPR, DLH, Dinas Kesehatan, dan Bappeda) dalam monitoring kualitas effluent dan air tanah secara terpadu.

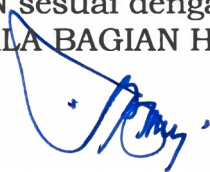
Dokumen RISPALD ini merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, menurunkan risiko penyakit berbasis air, dan menjamin keberlangsungan sumber daya air bagi generasi mendatang.

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP. 19680830 198903 1 006